



**MONITORING DAN
EVALUASI
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL (PEL)
KOTA SURAKARTA**

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil kajian antara rencana program aksi yang di siapkan oleh masing-masing OPD di bidang ekonomi dan didasarkan atas hasil kajian data kuesioner PEL dan data kinerja ekonomi tiga tahun terakhir. Elemen PEL yang digunakan terdiri atas enam dimensi: (1) Dimensi Kelompok Sasaran, (2) Dimensi Faktor Lokasi, (3) Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan, (4) Dimensi Pembangunan Berkelanjutan, (5) Dimensi Tata Pemerintahan, dan (6) Dimensi Proses Manajemen. Khusus untuk laporan ini model PEL dikembangkan lagi dengan memasukkan dimensi ekonomi kreatif dan smart economy.

Sesuai dengan visi dan misi Pemkot Surakarta, tujuan PEL adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan **Pemerataan yang berkeadilan** (equity) yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness). Artinya pembangunan juga harus adil dan dirasakan oleh seluruh penduduk Kota Surakarta. Dalam laporan ini, visi Pemkot Surakarta dan arah pembangunan PEL ini coba diterjemahkan ke dalam 7 Pilar PEL dan ekonomi kreatif dimana masing-masing pilar memiliki faktor pengungkit. Kegiatan ini juga membandingkan hasil PEL tahun 2015 dengan tahun 2019.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang dapat menjelaskan berbagai permasalahan dan penerapan kebijakan PEL, dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, namun harapan kami. Selanjutnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Surakarta,

2019

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Maksud dan Tujuan	6
I.3. Output dan Ruang Lingkup	6
Bab II Metode Penelitian	8
II.1. Model Yang Akan Dikembangkan	8
II.2. Langkah-langkah Kegiatan	10
Bab III Pemetaan Indikator Pengembangan Ekonomi Lokal	12
III.1. Model Pembangunan Ekonomi	12
III.2. Model Pengembangan Ekonomi Lokal	14
III.3. Model Ekonomi Kreatif	20
III.4. Model Ekonomi Cerdas	21
Bab IV Pengumpulan Data PEL	24
IV.1. Pengumpulan Data Objektif PEL	24
IV.2. Pengumpulan Data Objektif Responden Pelaku PEL (Pengusaha Dan Pengurus Sentra IKM)	28
IV.3. Pengumpulan Data FGD Pemanku Kepentingan PEL (FEDEP dan OPD)	33
IV.4. Bidang Ekonomi Kreatif	52
Bab V Analisis Kinerja Ekonomi Kota Surakarta	55
V.1. Isu Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi	55
V.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	56
V.1.2. Pertumbuhan Output (PDRB) per kapita	57
V.1.3. Analisis Investasi	58
V.2. Isu Kemiskinan dan Pengangguran	62
V.3. Isu Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata	68
V.4. Isu Sektor Ekonomi Unggulan	75
V.5. Analisis PEL dari Hasil Kuesioner <i>Stakeholder</i>	81
1. Dimensi Kelompok Sasaran	82
2. Dimensi Faktor Lokasi	84
3. Dimensi Kinergian dan fakus kebijakan	89
4. Dimensi pembangunan berkelanjutan	92
5. Dimensi Tata Pemerintahan	94
6. Dimensi Proses Manajemen	97
7. Dimensi Ekonomi Kreatif dan smart economy	100

8.	Status PEL Kota Surakarta	104
Bab VI	Rencana Aksi PEL Kota Surakarta	107
VI.1	Rencana Aksi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Investasi	107
VI.2.	Rencana Aksi untuk Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran	109
VI.3.	Rencana Aksi Pada Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata	112
VI.4.	Rencana Aksi Pada Dimensi Lokasi Pelaku Usaha (UKM/IKM)	115
VI.5	Rencana Aksi Pada Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	117
Bab VII.	Kesimpulan dan Saran	119
VII.1.	Kesimpulan	119
VII.1.1.	Investasi dan Dimensi Kelompok Sasaran	119
VII.1.2.	Isu Kemiskinan dan Pengangguran	120
VII.1.3.	Isu Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata	120
VII.1.4.	Lokasi Pelaku Usaha (Ukm/Ikm)	122
VII.1.5	Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	122
VII.1.6	Status Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta	122
VII.2.	Saran Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal	123
	Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar I.1.	Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah (RPJM 2020-2024)	1
Gambar III.1.	Model Pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh Konsumsi penduduk	12
Gambar III.2.	Model dasar pembangunan ekonomi yang digerakkan oleh investasi dan kewirausahaan	14
Gambar V.1.	Perbandingan laju pertumbuhan PDRB beberapa kota di Prov Jateng	57
Gambar V.2.	Kegiatan produksi di sentra industri kreatif (batik) Semanggi	61
Gambar V.3.	Peta Tingkat IPM berbagai daerah dan kota di Jawa Tengah	63
Gambar V.4.	Rencana penataan pemukiman kumuh di RW 33 Semanggi	67
Gambar V.5.	Jalan Kuta Bali dan Jalan Braga Bandung di sore hari	72
Gambar V.6.	Fasilitas toilet wisata di Kampung Batik Laweyan	72
Gambar V.7.	Tipologi sektor berdasarkan dominasi dan pertumbuhan	81
Gambar V.8.	Indeks Dimensi Kelompok Sasaran di Kota Surakarta	82
Gambar V.9.	Faktor Pengungkit Dimensi PEL Kelompok Sasaran di Kota Surakarta	83
Gambar V.10.	Nilai Indeks Dimensi Faktor Lokasi di Kota Surakarta	85
Gambar V.11.	Faktor Pengungkit PEL dimensi Faktor Lokasi di Kota Surakarta tahun 2019	86
Gambar V.12.	Indeks Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan di Kota Surakarta	89
Gambar V.13.	Faktor Pengungkit dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan di Kota Surakarta	91
Gambar V.14.	Nilai indeks dimensi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta tahun 2019	92
Gambar V.15.	Faktor Pengungkit dimensi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta tahun 2019	93
Gambar V.16.	Nilai indeks dimensi Tata Pemerintahan di Kota Surakarta 2019	94
Gambar V.17.	Faktor Pengungkit dimensi Tata Pemerintahan tahun 2019	95
Gambar V.18.	Nilai indeks dimensi Proses Manajemen di Kota Surakarta	98
Gambar V.19.	Faktor Pengungkit dimensi Proses Manajemen di Kota Surakarta 2019	99
Gambar V.20.	Nilai indeks dimensi ekonomi kreatif dan <i>smart economy</i> di Kota Surakarta 2019	101
Gambar V.21	Faktor Pengungkit dimensi ekonomi kreatif dan <i>smart economy</i>	102
Gambar V.22	Rata-rata Persentase Aktivitas Budaya Responden Di Dalam Rumah (jumlah hari dalam tiga bulan terakhir)	104
Gambar V.23	Status Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta	105

DAFTAR TABEL

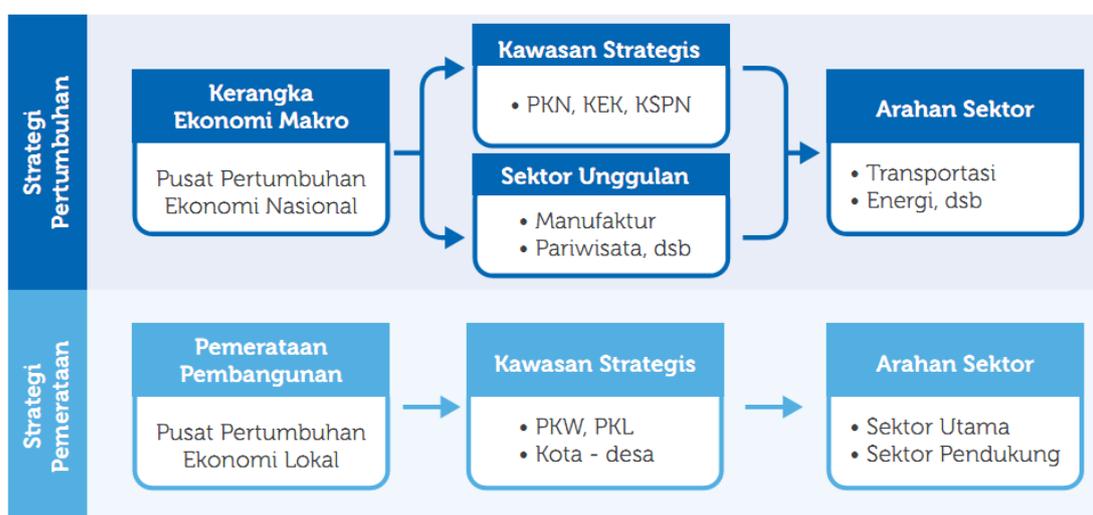
	Hal	
Tabel II.1.	Daftar faktor pengungkit ekonomi lokal kota Surakarta hasil penilaian tahun 2015	8
Tabel II.2	Indikator Model <i>Smart Economy</i>	9
Tabel II.3.	Indikator kota kreatif pada laporan <i>Creative Economic Report 2013</i>	9
Tabel II.4.	Tahapan pengukuran kinerja Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta	10
Tabel III.1.	Indikator Penilaian PEL	15
Tabel III.2.	Model Ekonomi Kreatif	20
Tabel III.3.	Data faktor-faktor Pendorong Ekonomi Kreatif	21
Tabel III.4.	Data Faktor-faktor Pendorong Ekonomi Cerdas	22
Tabel IV.1.	Penilaian Indikator PEL Yang Didasarkan Data Objektif	24
Tabel IV.2.	Penilaian Indikator PEL Yang Didasarkan Data Kuesioner 23 Responden	29
Tabel IV.3.	Indikator PEL Hasil FGD Stakeholder	34
Tabel IV.4.	Pelaku dan Perusahaan yang Bergerak di Ekonomi Kreatif	52
Tabel IV.5.	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Investasi Tahun 2016-2018	52
Tabel IV.6.	Jumlah pelaku perusahaan berdasarkan subsektor ekonomi kreatif	53
Tabel IV.7.	Jumlah sanggar di Kota Surakarta	53
Tabel IV.8.	Museum di Kota Surakarta	54
Tabel V.1.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beberapa kota di Jateng	56
Tabel V.2.	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut kota	57
Tabel V.3.	PDRB/penduduk atau Output/kapita (juta/orang)	58
Tabel V.4.	Laju pertumbuhan Output (PDRB) per kapita	58
Tabel V.5.	Pembentukan modal tetap bruto	59
Tabel V.6.	Perubahan inventory (persediaan bahan baku untuk produksi/dijual)	60
Tabel V.7.	Nilai Investasi usaha kecil, menengah dan besar Kota Surakarta	60
Tabel V.8.	Hasil kuesioner Indikator PEL terkait dengan investasi	61
Tabel V.9.	Indeks IPM Kota Surakarta	64
Tabel V.10.	Jumlah dan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk	64
Tabel V.11.	Analisis Hasil Kuesioner terhadap Isu kemiskinan dan tenaga kerja Kota	68
Tabel V.12.	Jumlah Kunjungan wisata asing dan domestik di Kota Surakarta	69
Tabel V.13.	Kunjungan wisata asing ke objek wisata di Surakarta	69
Tabel V.14.	Kunjungan wisata Nusantara ke objek wisata di Surakarta	70
Tabel V.15.	Hasil kuesioner pelaku UMKM. IKM terhadap PEL dimensi ekonomi kreatif	74
Tabel V.16.	Nilai LQ sektor ekonomi Kota Surakarta	77
Tabel V.17.	Nilai Laju Pertumbuhan sektor ekonomi Kota Surakarta	77
Tabel V.18.	Nilai Kontribusi sektor ekonomi Kota Surakarta	78
Tabel V.19.	Penyerapan Tenaga kerja sektor ekonomi Kota Surakarta	79
Tabel V.20.	Tipologi sektor berdasarkan dominasi dan pertumbuhan	79
Tabel V.21.	Status PEL Kota Surakarta	106
Tabel VI.1.	Rencana Aksi Terkait Penurunan Investasi di Sektor Industri	108
Tabel VI.2..	Rencana Aksi Terkait Isu Kemiskinan dan Pengangguran	110
Tabel VI.3.	Rencana Aksi Terkait Isu PEL dan Faktor Pengungkit PEL	113
Tabel VI.4.	Rencana Aksi Pada Dimensi Lokasi Pelaku Usaha (UKM/IKM)	116
Tabel VI.5.	Rencana Aksi Pada Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	118

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan ekonomi lokal atau kawasan merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan RPJMN tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah Indonesia dibagi menjadi dua yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan, seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar I.1. Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah (RPJM 2020-2024)

Strategi pertama melalui Strategi pertumbuhan ekonomi yaitu:

- Operasionalisasi dan peningkatan **investasi pada pusat-pusat pertumbuhan** wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan seperti: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
- Pengembangan ekonomi melalui **pengembangan sektor unggulan**: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya.

Strategi pemerataan dilakukan dengan :

- Pengembangan **ekonomi wilayah/lokal** melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk **pemanfaatan teknologi komunikasi digital**, dan **peningkatan kapasitas sumber daya manusia**, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis Kabupaten, kawasan

- transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya;
- (b) Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan

Ketika melakukan perencanaan pembangunan ekonomi maupun kegiatan monev ekonomi, tidak boleh lepas dari visi dan misi daerah. Kota Surakarta memiliki visi jauh kedepan yaitu: “Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera”. Visi ini bermakna bahwa pembangunan Kota Surakarta ditujukan untuk mewujudkan tatanan kota dan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepribadian bangsa (kota budaya), mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki dan proaktif membangun jejaring (mandiri), memiliki ciri-ciri keunggulan kompetitif (maju), dan terpenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani dalam kondisi kota yang kondusif untuk tempat tinggal maupun bekerja (sejahtera). Visi ini tentunya sejalan dengan visi Prov. Jawa Tengah, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan berdikari, tetap mboten korupsi, mboten ngapusi”. Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan. Selanjutnya Misi pimpinan daerah adalah bagaimana komitmen dan arah pembangunan harus terus dijaga oleh segenap stakeholders selakupemangku kepentingan dalam pembangunan. Misi Kota Surakarta tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan”.

Untuk mewujudkan visi dan misi kota Surakarta, maka pengembangan ekonomi lokal (PEL) harus juga mempertimbangkan berbagai macam isu yang berkembang di masyarakat dan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Kota Surakarta dimasukkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam koridor pemerataan seperti kota-kota lain di Pulau Jawa yang dianggap mempunyai tingkat pertumbuhan sudah cukup tinggi tetapi masih mengalami masalah-masalah kesenjangan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, isu-isu di bidang ekonomi diantaranya: masih rendahnya kualitas SDM dan daya saing pemasaran (promosi) produk UMKM, belum optimalnya raihan investasi (masih didominasi oleh PMDN), penguasaan teknologi pada IKM belum optimal, penurunan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB,

masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan masalah kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Permasalahan ini merupakan ciri dari permasalahan yang terjadi karena belum meratanya pembangunan ekonomi sejumlah wilayah kota Surakarta.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penetapan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) akan dilakukan dalam koridor pemerataan pembangunan ekonomi lokal yang menumbuhkan inisiatif masyarakat dan mudah diaplikasikan, salah satunya melalui penerapan konsep *Smart Economy* dan konsep ekonomi kreatif.

Konsep *smart economy* atau kota cerdas menurut Prof. Suhono Harso Supangkat, adalah sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. *Smart economy* adalah konsep kota cerdas yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan dengan memberikan kemudahan mengakses informasi dan menghubungkan antara konsumen dengan produsen dengan lebih efisien, cepat dan efektif.

Untuk mengukur pencapaian *Smart Economy*, banyak model pengukuran yang dapat diadopsi. Penelitian ini mencoba menggunakan hasil penelitian dari Patrizia Lombardi Dkk (2012) karena paling banyak digunakan dalam penelitian ilmiah dan kemudahan dalam pengukuran. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu dimensi dari enam dimensi yaitu *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas).

Konsep lain yang telah dicoba untuk diterapkan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi Kota Surakarta adalah konsep ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan Kota Surakarta telah memiliki aset budaya, dimana kota ini memiliki berbagai unsur kreatif dan telah diimplementasikan dan ditunjukkan eksistensi terutama bidang seni pertunjukan, industri batik dan seni musik tradisional. Ketiga unsur ini sering ditampilkan dalam acara pesta pernikahan adat Jawa, acara kebudayaan di lingkungan keraton dan masyarakat, maupun seni pertunjukan yang dijual secara

komersil atau non-komersil di beberapa tempat seperti Taman Hiburan Rakyat (THR), Taman Seni dan beberapa sanggar di Kota Surakarta. Sejak tahun 2017, Kota Surakarta sudah diupayakan untuk dapat masuk jaringan Kota Kreatif dari UNESCO. Untuk itu diperlukan beberapa indikator penilaian pencapaian kesiapan sebagai kota kreatif. UNESCO menggunakan beberapa indikator kreatif dalam mengukur kota kreatif di semua tahapan ekonomi kreatif, yaitu **Resource** (sumber daya), **Capacity**, dan **Outcome**.

Resource adalah unsur dasar yang harus diukur dan dievaluasi, seperti kemampuan manusia dan modal budaya. Investasi di bidang ini dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa **indikator resource** yang perlu dipertimbangkan seperti:

- jumlah pelaku ekonomi kreatif (seniman, pekerja di bidang seni, identifikasi tingkat kemampuan yang dimiliki)
- perusahaan atau industri yang menghasilkan produk ekonomi kreatif
- institusi budaya (museum, galeri, perpustakaan, pusat-pusat kebudayaan, arsip)
- Teater, tempat pertunjukan, bioskop
- Jumlah sanggar seni dan sebarannya
- Bangunan dan situs warisan budaya (*heritage*)
- Peninggalan budaya yang tidak ternilai (*Intangible cultural heritage*) seperti ritual, festival, cerita tradisional

Terkait **Capacity**, terdapat beberapa indikator yang diukur, yaitu : (1) *Government participation*, dalam bentuk dukungan pendanaan untuk kegiatan budaya, dukungan non finansial (mis. pengurangan tax), dukungan terhadap perusahaan ekonomi kreatif, adanya regulasi yang mendorong sektor budaya; (2) Peranan masyarakat atau dunia bisnis, dalam bentuk dukungan perusahaan untuk mensponsori kegiatan budaya, jumlah bantuan atau relawan yang menangani kegiatan budaya; (3) *Sosial capital*, dalam bentuk banyaknya organisasi budaya non pemerintah, program TV/Radio terkait dengan budaya dan jumlah kegiatan pendidikan/pelatihan dalam bidang seni dan budaya.

Pengukuran indikator **Outcome** terdiri atas : (1) dampak ekonomi (diantaranya PDRB sektor ekonomi kreatif, penyerapan tenaga kerja, nilai ekspor, jumlah perusahaan start-up / industri baru bidang ekonomi kreatif, jumlah kunjungan wisata); (2) *Outcome*

budaya (mis. jumlah paket seni pertunjukan baru yang ditawarkan, jumlah event kebudayaan, event pameran kebudayaan); dan (3) dampak sosial, dalam bentuk jumlah mahasiswa/siswa yang masuk jurusan seni dan budaya, jumlah masyarakat / anak sekolah yang terlibat dalam ekstrakurikuler seni budaya, jumlah lulusan/guru seni dan budaya, jumlah remaja yang mengikuti kegiatan pertukaran budaya).

Sementara itu **Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)** dari BAPPENAS harus mempertimbangkan enam dimensi dasar PEL (model hexagonal PEL) yaitu (1) Dimensi Kelompok Sasaran, (2) Dimensi Faktor Lokasi, (3) Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan, (4) Dimensi Pembangunan Berkelanjutan, (5) Dimensi Tata Pemerintahan, dan (6) Dimensi Proses Manajemen. Setiap dimensi akan diukur oleh *stakeholder* ekonomi lokal dan nilai pengukuran akan dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditetapkan oleh BAPPENAS yaitu nilai dimensi minimal yang harus dicapai adalah 80 point.

Jika diperhatikan, keenam dimensi PEL model Bappenas sejalan dengan Visi Kota Surakarta yaitu " Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera". Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi "Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan dan Papan". Dimana tiga misi berkaitan langsung dengan PEL kota Surakarta, yaitu: Misi "Wareg" merupakan misi untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani. Misi "Mapan" diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani. Dan Misi "Papan" diarahkan untuk mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Setelah penetapan **tiga konsep pengembangan ekonomi** (PEL, *Smart Economy* dan ekonomi kreatif) maka tahap berikutnya adalah melakukan **kolaborasi ketiga model tersebut**. Kolaborasi ini juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Andari dan Ella (2019) yang menggabungkan konsep model PEL dengan model

SMART RURAL; Polnaya dan Darwanto (2015) menganalisis strategi PEL pada UKM ekonomi kreatif di Pati; dan Latifah dan Damayanti (2015) mengembangkan Pariwisata Kreatif Berbasis Industri Batik sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Pekalongan. Pada tingkat operasional beberapa daerah sudah mencoba untuk menerapkan *Smart Economy* untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Seperti kota Malang yang mencoba mengembangkan infrastruktur kota cerdas (pembuatan *free wifi*, integrasi program *Smart Economy* dengan tata kelola pemerintah sehari-hari) untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan sektor unggulan seperti: *fashion*, kuliner, aplikasi, game, animasi dan film. Dari beberapa kajian ini BAPPEDA Kota Surakarta bermaksud untuk mengembangkan usulan model penilaian pengembangan ekonomi lokal (PEL) dengan melibatkan dua konsep pembangunan kota yaitu *Smart Economy* dan ekonomi kreatif.

Ke depan model yang akan dikembangkan dapat diusulkan ke Bappenas untuk dijadikan salah satu masukan penilaian kinerja PEL sebuah kota yang juga menerapkan konsep *Smart Economy* dan ekonomi kreatif sebagai dasar pengembangan ekonomi kota.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kajian ini adalah melakukan evaluasi kinerja atau rencana aksi pengembangan ekonomi lokal (PEL) Kota Surakarta dengan mempertimbangkan konsep *Smart Economy* dan ekonomi kreatif.

Tujuan dari kajian ini:

1. Mengembangkan model penilaian kinerja PEL Kota Surakarta yang mengintegrasikan konsep *Smart Economy* dan ekonomi kreatif. Pengembangan model ini melibatkan *stakeholder* Bidang Ekonomi yang menjadi rekan kerja BAPPEDA Kota Surakarta. Model ini selanjutnya diturunkan menjadi beberapa indikator.
2. Mengumpulkan data kuantitatif (cukup disajikan) dan mengukur kinerja PEL (data kualitatif akan dikumpulkan melalui kuesioner) yang didasarkan indikator model pengukuran kinerja PEL yang telah dibangun.
3. Memberikan masukan rekomendasi faktor penguangkit untuk masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya pada masing-masing OPD yang terkait bidang ekonomi.

I.3. OUTPUT DAN RUANG LINGKUP

Output dari kajian ini berupa: dokumen kajian yang berisi :

1. Dokumen kajian model integrasi model penilaian PEL dengan konsep *Smart Economy* dan ekonomi kreatif hasil kajian bersama yang melibatkan stakeholder Bidang Ekonomi.
2. Dokumen hasil evaluasi pengukuran kinerja PEL yang didasarkan hasil pengumpulan data sejumlah indikator.
3. Laporan akhir yang merangkum model yang dikembangkan, hasil penilaian kinerja PEL yang didasarkan pengumpulan data kuantitatif dan usulan faktor pengungkit / usulan isu perbaikan Kondisi PEL Kota Surakarta.
- 4.

Ruang lingkup PEL ini meliputi :

1. Model yang digunakan, yaitu model enam dimensi PEL dari BAPPENAS, konsep model *Smart Economy* dan model pengukuran ekonomi kreatif.
2. Data yang digunakan untuk evaluasi adalah data kuantitatif yang disediakan BAPPEDA dan OPD yang terkait
3. Data yang dikumpulkan untuk menghitung RALED berasal dari stakeholder terkait PEL seperti para pengusaha dan perwakilan dinas terkait dengan PEL

BAB II

METODE PENELITIAN

II.1. MODEL YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Model Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dikembangkan oleh BAPPENAS tahun 2006 terdiri atas enam dimensi dan 77 indikator (BAPPENAS, 2014). Model ini terdiri beberapa faktor pengungkit antara lain:

Tabel II.1 Daftar faktor pengungkit ekonomi lokal kota Surakarta hasil penilaian tahun 2015

	Dimensi	Faktor pengungkit
1	Kelompok Sasaran	
1.1		Pusat layanan investasi
1.2		Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi usaha baru
1.3		Pendampingan dan monitoring oleh pemda kepada pelaku baru dan IKM/UKM
1.4		Kampanye peluang berusaha
1.5		Promosi produk UMKM/IKM yang disponsori pemda/pusat
2	Faktor Lokasi	
2.1		Pelatihan tenaga kerja trampil
2.2		Penguatan peran Lembaga penelitian dalam ekonomi lokal
2.3		Peningkatan kualitas pemukiman
3	Sinergi dan Fokus Kebijakan	
3.1		Kebijakan Pengembangan keahlian (profesi)
3.2		Kebijakan informasi bursa tenaga kerja
3.3		Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ industri
3.4		Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan (agropolitan) dan perkotaan
4	Pembangunan Berkelanjutan	
4.1		Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal
4.2		Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri
4.3		Kebijakan pemda yang berkaitan permasalahan lingkungan
4.4		Pengelolaan dan pendaur ulangan limbah
5	Tata Pemerintahan	
5.1		Prosedur pelayanan administrasi publik
5.2		Status Asosiasi industri/komoditi/ Forum Bisnis
5.3		Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur
5.4		Restrukturisasi organisasi pemerintah
6	Proses Manajemen	
6.1		Analisis dan pemetaan potensi ekonomi
6.2		Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan
6.3		Frekuensi dilakukannya diskusi bagi proses pemecahan masalah
6.4		Penilaian terhadap daya saing wilayah

Model kedua yang akan menjadi pertimbangan untuk mengukur indikator kinerja PEL kota Surakarta adalah **Model Smart Economy** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.2. Indikator Model *Smart Economy*

No	Kriteria	Indikator
1	<i>Innovative spirit & Entrepreneurship</i>	<i>New startups, R& D, Employment level dan innovation</i>
2	<i>Productivity</i>	<i>GDP / capita</i>
3	<i>Local dan global connection</i>	<i>Export dan internasional event hold</i>
4	<i>Learning economy</i>	
5	<i>Digital economy</i>	
6	<i>Socially responsible economy</i>	

Model Ketiga yang akan menjadi pertimbangan untuk mengukur indikator kinerja PEL kota Surakarta adalah **indikator kota kreatif** yang ada di buku laporan Creative economic report 2013:

Tabel II.3. Indikator kota kreatif pada laporan *Creative Economic Report 2013*

No	Dimensi	Indikator
1	<i>Resource</i>	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah pelaku ekonomi kreatif (seniman, pekerja di bidang seni, identifikasi tingkat kemampuan yang dimiliki) • perusahaan atau industri yang menghasilkan produk ekonomi kreatif • institusi budaya (museum, galeri, perpustakaan, pusat-pusat kebudayaan, arsip) • Teater, tempat pertunjukan, bioskop • Jumlah sanggar seni dan sebarannya • Bangunan dan situs warisan budaya (heritage) • Peninggalan budaya yang tidak ternilai (<i>intangible cultural heritage</i>) seperti ritual, festival, cerita tradisional
2	<i>Capacity</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Government participation</i> : <ul style="list-style-type: none"> - dukungan pendanaan untuk kegiatan budaya, dukungan non-finansial (pengurangan tax) → Solo great sale, - dukungan terhadap perusahaan ekonomi kreatif (pameran, pelatihan, akses penjualan, pengembangan, ruang kreatif), - adanya regulasi yang mendorong sektor budaya, • peranan masyarakat / dunia bisnis : <ul style="list-style-type: none"> - dukungan perusahaan untuk mensponsori kegiatan budaya, - jumlah bantuan atau relawan yang menangani kegiatan budaya) → Kadin, • <i>Sosial capital</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya organisasi budaya non pemerintah, misalnya SCCN, SIPA, DILO, - program TV/Radio terkait dengan budaya dan jumlah kegiatan pendidikan training in arts and culture → TATV, RRI → solo raya
3	<i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak ekonomi (PDRB sektor ekonomi kreatif, Penyerapan tenaga kerja, nilai ekspor (dinas perdagangan), jumlah <i>start-up</i> (Disnakerperin & Dinas pariwisata) / Industri baru bidang ekonomi kreatif, jumlah kunjungan wisata),

		<ul style="list-style-type: none"> • Outcome budaya (jumlah paket seni pertunjukan baru yang ditawarkan (dinas pariwisata dan dinas kebudayaan), jumlah event kebudayaan, event pameran kebudayaan) • Dampak sosial (jumlah mahasiswa/siswa yang masuk jurusan seni dan budaya, jumlah masyarakat / anak sekolah yang terlibat dalam ekstrakurikuler seni budaya, (keterlibatan anak sekolah & mahasiswa dalam kegiatan budaya), jumlah lulusan/guru seni dan budaya, jumlah remaja yang mengikuti kegiatan pertukaran budaya)
--	--	--

II.2. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Peraturan Kepala BAPPENAS No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, menyebutkan input monev pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Pengukuran kinerja PEL dilakukan berdasarkan indikator PEL yang juga mempertimbangkan konsep *Smart Economy* dan ekonomi kreatif. Berdasarkan peraturan ini maka disusun langkah-langkah penyusunan pengukuran kinerja PEL kota Surakarta.

Tabel II.4. Tahapan pengukuran kinerja Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta

TUJUAN ANALISIS	DATA	TEKNIK	SUMBER DATA
Tahap 1. Pengembangan model Pengukuran kinerja PEL			
Mengumpulkan konsep PEL, Smart Economy dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep PEL Bappenas - Konsep Smart Economy - Konsep ekonomi kreatif 	Pengumpulan konsep dari laporan kajian	BAPPPEDA Dinas Institusi Terkait
Identifikasi indikator dan dari masing-masing model konsep	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator yang dijadikan alat ukur pada masing-masing konsep - Pembuatan matriks hubungan antar konsep yang diintegrasikan 	Review model dan indikator	BAPPPEDA Stakeholder ekonomi terkait (FEDEP)
Validasi model	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan validasi model dengan kuesioner 	Pengumpulan data dan validasi dengan metode statistik	BAPPPEDA Stakeholder ekonomi terkait (FEDEP)
Tahap 2. Pengumpulan data dan penilaian indikator kinerja PEL			
Pengumpulan data sekunder	<ul style="list-style-type: none"> - laporan pelaksanaan PEL Kota Surakarta - Laporan <i>Smart Economy</i> - Laporan Ekonomi kreatif 	Review laporan pelaksanaan PEL, <i>Smart Economy</i> dan ekonomi kreatif	BAPPPEDA Dinas UMKM dan koperasi Dinas TK dan industri STP, inkubator

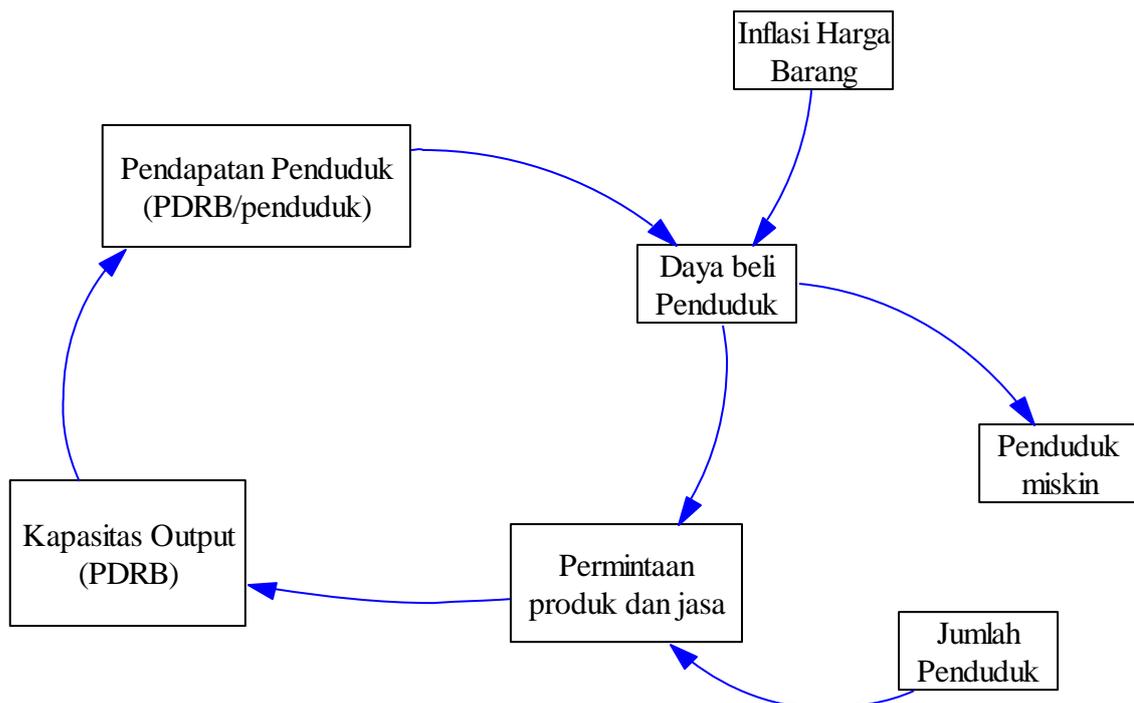
TUJUAN ANALISIS	DATA	TEKNIK	SUMBER DATA
			Badan penanaman modal daerah
Penilaian PEL Kota Surakarta	- Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, dilakukan pengukuran kinerja PEL	Penilaian kinerja didasarkan data kuantitatif dari BAPPEDA dan OPD	BAPPEDA dan OPD terkait
Tahap 3. Membuat masukan usulan kebijakan atas hasil evaluasi PEL			
Melakukan FGD dengan stakeholder	- Memaparkan hasil evaluasi kinerja PEL - FGD memberikan masukan terhadap kinerja PEL kota Surakarta	Analisis capaian dan usulan kebijakan atau program PEL	BAPPEDA dan OPD terkait I
Tahap 4. Laporan akhir			
Pembuatan laporan	Semua bahan hasil analisis dan FGD		TIM penyusun

BAB III

PEMETAAN INDIKATOR PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

III.1. Model Pembangunan Ekonomi

Model pengembangan ekonomi lokal memiliki makna sesuai dengan teori pembangunan ekonomi dari Schumpeter (*The Theory of Economic Development*) yang dapat ditempuh melalui Pembangunan ekonomi (*economic development*) dan Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Menurut Schumpeter kenaikan ekonomi (output ekonomi atau kenaikan PDRB) suatu daerah atau wilayah dapat karena pertumbuhan jumlah penduduk dan kenaikan jumlah tabungan penduduk tanpa adanya usaha keras melakukan perbaikan kondisi faktor-faktor pendorong ekonomi. Kenaikan ini dikenal dengan istilah dorongan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi penduduk (pertumbuhan penduduk). Seperti pada gambar berikut ini:



Gambar III.1 Model Pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh Konsumsi penduduk

Ciri pertumbuhan ini bergerak lambat dan setara dengan laju inflasi ditambah laju pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan model ini maka beberapa indikator ekonomi menjadi penting seperti kenaikan jumlah penduduk, laju kenaikan PDRB, laju inflasi barang, daya beli penduduk, dan penduduk miskin. Dari model dasar tersebut terdapat

beberapa indikator ekonomi yang penting yaitu : 1) Pertumbuhan jumlah penduduk, 2) Pertumbuhan PDRB, 3) Pendapatan per kapita, 4) Inflasi harga produk/jasa, dan 5) Penduduk miskin.

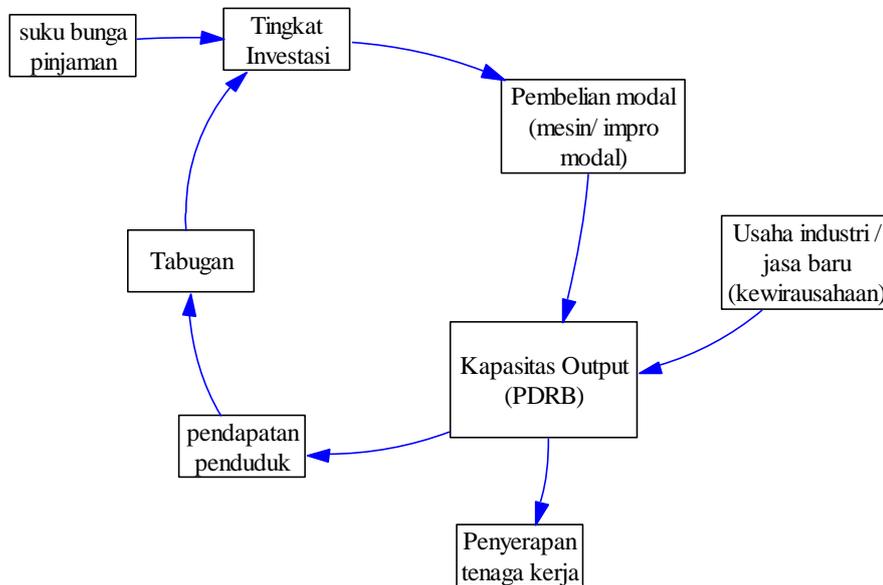
Sementara itu Schumpeter juga menawarkan strategi kedua yaitu melalui pembangunan ekonomi melalui peningkatan kegiatan inovasi (produktivitas) dan penumbuhan usaha-usaha baru (kewirausahaan). Inovasi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi ini dapat dijabarkan dalam bentuk inovasi produk (desain produk, kemasan, dan bahan yang digunakan), inovasi teknologi produksi (otomasi, permesinan) dan inovasi pemasaran (membuka pasar baru, media pemasaran). Sementara itu, syarat-syarat terjadinya inovasi:

- a. harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi (inovator dan wiraswasta) di dalam masyarakat.
- b. harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa merangsang semangat inovasi dan pelaksanaan ide-ide untuk berinovasi. Jelas bahwa seorang inovator atau entrepreneur, menurut Schumpeter, bukanlah sekadar pengusaha atau wiraswasta biasa. Hanya mereka yang berani mencoba dan melaksanakan ide-ide baru yang bisa tersebut entrepreneur.

Teori ini sejalan dengan teori ekonomi modern Keynes, dimana Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Pasar Bebas sebagai kekuatan utama pembangunan ekonomi. Justru kunci utama dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi ekonomi. Karena itu Pemerintah dan masyarakat menjadi penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif sehingga para investor tertarik menanamkan modal di suatu daerah. Dengan kondisi ekonomi yang terus tumbuh juga dapat mendorong industri yang sudah ada untuk menanamkan kembali modalnya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Efek dari peningkatan kapasitas produksi adalah penyerapan tenaga kerja dan pendapatan penduduk. Model inilah yang menjadi dasar pergerakan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development economic).

Dari konsep pembangunan ekonomi ini maka dibutuhkan indikator jumlah pengusaha baru (kewirausahaan), indikator investasi (investasi teknologi permesinan, investor baru masuk) dan laju kenaikan PDRB. Model ini memiliki beberapa variabel ekonomi antara lain :1) tingkat suku bunga pinjaman, 2) Tingkat investasi, 3) Impor barang modal dan

investasi, 4) PDRB, 5) Jumlah perusahaan baru, 6) PDRB, 7) Pendapatan penduduk dan tabungan.



Gambar III.2 Model dasar pembangunan ekonomi yang digerakkan oleh investasi dan kewirausahaan

Karena keterbatasan sumber daya dan agar pembangunan ekonomi terarah pada kemampuan daya saing nasional dan internasional, maka pemerintah pusat dan daerah (propensi Jateng) menerapkan strategi pembangunan pusat pertumbuhan (seperti sentra industri) dan pembangunan sektor unggulan (industri, pertanian dan jasa). Dengan strategi ini maka dibutuhkan suatu metode untuk menentukan sektor unggulan di kota Surakarta. Nantinya setelah dipilih dan dikembangkan, diharapkan sektor ini dapat memberikan multi efek yang luas dan dapat menjadi lokomotif ekonomi di daerah.

III.2 MODEL PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Model Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dikembangkan oleh BAPPENAS tahun 2006 terdiri atas enam dimensi dan 77 indikator (BAPPENAS, 2014). Model besar ini terdiri beberapa faktor pengungkit antara lain:

Tabel III.1. Indikator Penilaian PEL (sumber: Kuesioner Bappenas, 2014)

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Target responden
1	Dimensi pertama= pelaku Usaha		
1.1	Peraturan (Perda/Perkada/SK Ka. SKPD) tentang kemudahan investasi dalam bentuk (item); a. Insentif fiskal b. Penyederhanaan perijinan c. Penyediaan lokasi/lahan d. Ketenagakerjaan	0 = 0 - 1 item peraturan 1 = 2 - 3 item peraturan 2 = ≥ 4 item peraturan	Data BAPPEDA
1.2	Informasi prospek bisnis (buku/booklet/leaflet peluang investasi, official web site)	0 = tidak tersedia 1 = tersedia tetapi kurang informatif/lengkap/tidak mutakhir 2 = tersedia dan informatif, lengkap dan mutakhir	Kuesioner pengusaha
1.3	Kepastian berusaha dan hukum (a.l. ijin lokasi usaha, tata ruang, arbitrase, persaingan usaha, peradilan niaga)	0 = tidak ada (sering terjadi perubahan kebijakan, lemahnya penegakan hukum) 1 = ada (tidak terjadi erubahan kebijakan, ada penegakan hukum)	FDG FEDEP
1.4	Keamanan (penjarahan, konflik sosial, premanisme dan buruh mogok)	0 = Tidak ada 1 = ada intensitas 2x/thn 2 = ada intensitas $> 2x/th$	Data /TIM bappeda
1.5	Kampanye peluang usaha melalui ; a. Media massa (media cetak, elektronik, web site) b. 2. Kegiatan interaktif (temu usaha/pameran/seminar potensi daerah).	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	Kuesioner pengusaha
1.6	Pusat pelayanan investasi dengan Jasa layanan konsultasi investasi	0 = tidak tersedia 1 = tersedia namun layanan tidak memadai 2 = tersedia dan layanan memadai	Kuesioner pengusaha
1.7	Upaya fasilitasi permodalan bagi dunia usaha oleh Pemda	0 = tidak ada 1 = Ada	Kuesioner pengusaha
1.8	Promosi produk UKM untuk memperluas pasar oleh pemda	0 = tidak ada 1 = Ada	Kuesioner pengusaha
1.9	Upaya Pemda untuk peningkatan teknologi, manajemen, dan kelembagaan usaha lokal (aspek izin usaha, badan hukum, organisasi usaha)	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda
1.10	Fasilitasi Pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha baru (Kemampuan Teknik dan entrepreneurship)	0= tidak 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	FDG FEDEP

1.11	Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru	0= tidak ada 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	Kuesioner pengusaha
1.12	Insentif pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya perijinan.	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda
1.3	Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru	0 = Lebih dari 12 hari 1 = 10 – 12 hari (standard SPM) 2 = Kurang dari 10 hari	Kuesioner pengusaha
	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Target responden
2	Dimensi Kedua= Faktor Lokasi		
2.1	Aksesibilitas dari dan ke lokasi Pabrik/Toko tempat beraktivitas	0 = buruk 1 = sedang 2 = mantap	Kuesioner pengusaha
2.2	Akses ke pelabuhan laut	0 = sulit 1 = mudah	FDG FEDEP
2.3	Akses ke pelabuhan udara	0 = sulit 1 = mudah	FDG FEDEP
2.4	Sarana transportasi (angkot / bus trans solo)	0 = tidak tersedia 1 = tersedia namun tidak memadai 2 = tersedia dengan kualitas baik	Kuesioner pengusaha
2.5	Infrastruktur komunikasi	0 = tidak tersedia 1 = tersedia kualitas rendah 2 = tersedia kualitas baik	FDG FEDEP
2.6	Infrastruktur energi	0 = tidak tersedia 1 = tersedia kualitas rendah 2 = tersedia kualitas baik	FDG FEDEP
2.7	Ketersediaan air bersih	0 = tidak tersedia 1 = tersedia kualitas rendah 2 = tersedia kualitas baik	Kuesioner pengusaha
2.8	Tenaga kerja terampil	0 = tidak tersedia 1 = tersedia terbatas 2 = tersedia mencukupi	Kuesioner pengusaha
2.9	Jumlah Lembaga keuangan lokal (Bank Umum, BPR, LKM, KSP/ USP)	0 = lebih rendah dari rata-rata daerah sekitar 1 = sama dengan rata2 daerah sekitar 2 = lebih tinggi dari rata-rata daerah sekitar	FDG FEDEP
2.10	Peluang kerjasama dalam industri sejenis (sentra) maupun industri hulu-hilir	0 = tidak ada 1 = kecil 2 = besar	FDG FEDEP
2.11	Lembaga penelitian	0 = tidak berperan 1= berperan namun terbatas 2 = berperan optimal	FDG FEDEP
2.12	Kualitas permukiman	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP

2.13	Kualitas lingkungan	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP
2.14	Kualitas dari fasilitas pendidikan	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP
2.15	Kualitas pelayanan kesehatan	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP
2.16	Fasilitas umum dan fasilitas sosial	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP
2.17	Etos kerja SDM	0= SDM lokal tidak terbiasa berusaha/bekerja pada kegiatan komoditi yang diunggulkan 1=SDM sudah terbiasa berusaha/bekerja pada kegiatan komoditi yang diunggulkan	Kuesioner pengusaha
3	Dimensi Ketiga = KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN		
3.1	Adakah program/ Kebijakan peningkatan investasi	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.2	Adakah program / Kebijakan promosi daerah	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.3	Adakah kebijakan persaingan usaha (contoh tentang pembatasan lokasi pasar modern/ supermarket/ hypermarket)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.4	Adakah program / Kebijakan pemberdayaan UKM (a.l; kemitraan dan subkontrak)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
3.5	Adakah program / Kebijakan peningkatan peran Perusahaan Daerah	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.6	Adakah program / Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
3.7	Adakah program / Kebijakan informasi bursa tenaga kerja	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
3.8	Adakah program / Kebijakan Pengembangan keahlian (peningkatan keterampilan)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
3.9	Adakah program / Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan dunia usaha (memanfaatkan dana CSR)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
3.10	Adakah program / Kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP

3.11	Adakah program / Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ industri	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.12	Adakah program / Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan (agropolitan) dan perkotaan (Central Business District)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.13	Adakah program / Kebijakan pengembangan komunitas sep: perbaikan lingkungan, perbaikan kampung	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.14	Adakah program /Kebijakan kerjasama antar daerah/ pemda	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.15	Adakah program /Kebijakan tata ruang PEL	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
3.16	Adakah program /Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar sentra usaha	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Target responden
4	Dimensi Keempat = PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
4.1	Sistem industri yang berkelanjutan (adanya keterkaitan pengadaan bahan baku, produksi, dan pengolahan)	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda
4.2	Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda
4.3	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Business plan	0 = < 25 % 1 = 25 – 50 % 2 = > 50 %	Data bappeda
4.4	Jumlah perusahaan yang melakukan Inovasi pengembangan produk dan pasar	0 = < 25 % 1 = 25 – 50 % 2 = > 50 %	Data Bappeda
4.5	Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal	0 = tidak ada 1 = ada	FDG FEDEP
4.6	PEL mempertimbangkan Keberadaan adat dan kelembagaan lokal	0 = tidak dipertimbangkan 1 = dipertimbangkan	FDG FEDEP
4.7	Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan (a.l.: penerapan amdal)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
4.8	Program Pengelolaan dan pendaur ulangan limbah (a.l.: produk organik)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
4.9	Kebijakan konservasi sumber daya alam dalam PEL	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Target responden
5	Dimensi Lima = TATA PEMERINTAHAN		
5.1	Kemitraan / koordinasi antar OPD di bidang infrastruktur (a.l.: BOT)	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	Kuesioner pengusaha
5.2	Kemitraan / koordinasi antar OPD di bidang promosi dan perdagangan	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	Kuesioner pengusaha
5.3	Kemitraan / koordinasi antar OPD di bidang pembiayaan usaha (a.l.: penjaminan, penyaluran kredit, PKBL)	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	Kuesioner pengusaha
5.4	Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur efektif berdampak pada pelayanan (a.l.: remunerasi, jenjang karir)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
5.5	Restrukturisasi organisasi pemerintah	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
5.6	Prosedur pelayanan administrasi publik: 1. sederhana 2. jelas 3. cepat 4. terjangkau	0 = 0 – 1 aspek 1 = 2 – 3 aspek 2 = 4 aspek	Kuesioner pengusaha
5.7	Status Asosiasi industri/ komoditi/ Forum Bisnis yang anda (pengusaha) terlibat	0 = tidak ada 1 = mati suri 2 = Ada dan aktif (komunikasi dgn pelaku usaha dan pemda)	Kuesioner pengusaha
5.8	Peran Asosiasi industri/ komoditi/ Forum bisnis terhadap perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL	0 = tidak efektif karena bersifat politis 1 = tidak efektif karena kendala internal 2 = efektif	Kuesioner pengusaha
5.9	Manfaat asosiasi/organisasi bagi anggotanya	0 = tidak ada 1 = ada tetapi rendah 2 = ada dan optima	Kuesioner pengusaha
	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Target responden
6	Dimensi enam = PROSES MANAJEMEN		
6.1	Analisis dan pemetaan potensi ekonomi	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappedda
6.2	Penilaian terhadap daya saing wilayah	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappedda
6.3	Pemetaan kondisi politis lokal	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappedda
6.4	Identifikasi stakeholder PEL	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappedda
6.5	Penggunaan hasil diagnosis sebagai dasar perencanaan PEL	0 = < 25% 1 = 25-75%	Data /TIM bappedda

		2 = >75%	
6.6	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan PEL	0 = <25% terlibat 1 = 25%-50% terlibat 2 = >50% terlibat aktif	Data /TIM bappeda
6.7	Kesesuaian implementasi dengan perencanaan	0 = <25% sejalan 1 = 25%-75% sejalan 2 =>75% sejalan	FDG FEDEP
6.8	Keterlibatan Stakholder dalam proses penyusunan indikator evaluasi	0 = <25% terlibat 1 = 25%-50% terlibat 2 = >50% terlibat aktif	Data /TIM bappeda
6.9	Keterlibatan stakeholder dalam proses monitoring dan evaluasi	0 = <25% terlibat 1 = 25%-50% terlibat 2 = >50% terlibat aktif	Data /TIM bappeda
6.10	Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri (self evaluation)	0 = Tidak pernah dilakukan 1 = dilakukan	FDG FEDEP
6.11	Frekuensi dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan	0 = Tidak pernah dilakukan 1 = dilakukan	FDG FEDEP
6.12	Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan.	0 = <25% 1 = 25%-75% 2 = >75%	Data /TIM bappeda

III.3. MODEL EKONOMI KREATIF

Data Ekonomi kreatif yang bisa dikumpulkan berdasarkan hasil kajian Bappeda terhadap ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan tahun 2018, sebagai berikut=

Tabel III.2. Model Ekonomi Kreatif

7.1	Indikator Sumber daya Ekonomi kreatif		
	jumlah pelaku ekonomi kreatif (seniman dan pekerja di bidang seni)	... Orang	Data /TIM bappeda
	Jumlah perusahaan atau industri yang menghasilkan produk ekonomi kreatif	... Perusahaan	Data /TIM bappeda
	Jumlah institusi budaya (Museums, galleries, libraries, archives, cultural centres)Tempat (bangunan)	Data /TIM bappeda
	Jumlah Theatres, cinemas, performing arts venuesTempat (bangunan)	Data /TIM bappeda
	Jumlah sanggar seni dan sebarannya	Jumlah sanggar / kecamatan	Data /TIM bappeda
	Jumlah Bangunan dan situs warisan budaya (Heritage)Tempat (bangunan)	Data /TIM bappeda
	Jumlah Intangible cultural heritage (Rituals, fairs, festivals, Cerita tradisional)Tempat (bangunan)	Data /TIM bappeda
	Jumlah program TV/Radio terkait dengan budaya (TATV, RRI-→ solo raya)buah	Data /TIM bappeda
	jumlah kegiatan pendidikan training in arts and culture buah	Data /TIM bappeda
	Penyerapan tenaga kerja,		Data /TIM bappeda

	jumlah star-up/ Industri baru bidang ekonomi kreatif, jumlah kunjungan wisata),		Data / Dinas pariwisata
7.2	Indikator output ekonomi kreatif		
	jumlah paket seni pertunjukan baru yang ditawarkan		Data / Dinas pariwisata
	jumlah event kebudayaan, event pameran kebudayaan)		Data / Dinas pariwisata
	PDRB sektor ekonomi kreatif, (Jasa hotel dan restoran)		Data /TIM bappedda
	nilai ekspor (dinas perdagangan		Data /TIM bappedda

Data Ekonomi kreatif yang hanya bisa ditanyakan langsung ke Pengusaha khususnya yang terkait dengan Ekonomi Kreatif

Tabel III.3. Data faktor –faktor Pendorong Ekonomi Kreatif

7	Indikator Kapasitas ekonomi Kreatif		
7.1	Partisipasi pemerintah dalam kegiatan ekonomi kreatif (dukungan pendanaan untuk kegiatan budaya, dukungan non-finansial (pengurangan tax) spt= Solo grate sales,	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	Kuesioner pengusaha
7.2	Dukungan terhadap perusahaan/pelaku ekonomi kreatif (pameran, pelatihan, akses penjualan, pengembangan, ruang kreatif)	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	Kuesioner pengusaha
7.3	Peranan masyarakat / perusahaan bisnis (dukungan perusahaan untuk mensponsori kegiatan budaya, jumlah bantuan Volunteering kegiatan budaya)	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	Kuesioner pengusaha
7.4	Adanya regulasi yang mendorong sektor budaya	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha
7.5	Adanya organisasi ekonomi kreatif untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif Sosial capital (Number of cultural nongovernmental organizations= SCCN, SIPA, DILO),	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FGD FEDEP (membutuhkan pengetahuan tokoh yang memahami keberadaan organisasi tsb)
7.6	program TV/Radio terkait dengan budaya dan jumlah kegiatan pendidikan training in arts and culture	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FGD FEDEP (membutuhkan pengetahuan tokoh yang memahami keberadaan program tsb)

III.4. Model Ekonomi Cerdas (smart economy)

Berikut ini beberapa indikator yang disepakati untuk digunakan menilai smart economy:

Tabel III.4. Data faktor –faktor Pendorong Ekonomi Cerdas

8	Dimensi lima = Smart economy		
8.1	Innovative spirit		
8.1.1	Jumlah lembaga riset yang menunjang peningkatan ekonomi dan teknologi (ICT, jurusan elektor, informatika/ komputer dan mesin)	Perguruan tinggi di solo + technopark	Data Bappeda mengirim surat resmi ke UNS, UMS, UNIBA dan Univ Sahid
8.1.2	Jumlah Perusahaan lokal/ nasional yang bergerak di bidang High tect dan ICT produk	Nasional = Seperti telkom, Lokal=	Data Bappeda
8.1.3	Dorongan pemerintah untuk peningkatan kegiatan inovasi di daerah (lomba krenova)	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik (terorganisasi) dan berkelanjutan	FGD FEDEP & Pengumpulan data
8.1.3	Manfaat perusahaan / sentra dari pengembangan riset atau inovatif produk/ teknologi baik dari pemerintah maupun dari Perguruan tinggi (lembaga riset) atau Perusahaan besar swasta,	0 = Belum pernah 1 = pernah tetapi tidak efektif 2 = pernah dan efektif	Survei ke pengusaha
8.2	Entrepreneurship		
8.2.1	Fasilitasi Pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha baru (Kemampuan Teknik dan entrepreneurship)	0= tidak 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	Sama dengan PEL kriteria 1.10 Melalui FGD FEDEP
8.2.21	Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru	0= tidak ada 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	Sama dengan PEL kriteria 1.11 Melalui kuesioner pengusaha
8.3	Productivity		
8.3.1	PDRB / Kapita (perbandingan dg kota lain)	Teori berapa nilai tambah yang dihasilkan per individu suatu daerah (teknologi dan pemilihan sektor yang tepat dapat meningkatkan produktivitas nilai tambah yang dihasilkan	Data yang ada
8.3.2	Laju PDRB/Kapita		
8.4	Learning economic dan digital economic		
8.4.1	Adanya dorongan dari pemerintah atau pemkot untuk menggunakan aplikasi marketplace untuk menjual	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali	Survei ke pengusaha

	barang atau jasa. Dorongan ini disertai dengan pelatihan dan kemudahan mencari partner marketplace.	2 = dilaksanakan secara sistemik (terorganisasi) dan berkelanjutan	
8.4.2	Adanya dukungan berupa pameran untuk memasarkan produk / jasa ke pasar yang lebih luas (pameran nasional atau internasional)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Survei ke pengusaha
8.4.3	Penggunaan layanan E-Government (layanan investasi online, Layanan Administrasi Kependudukan online)	0 = Belum pernah 1 = pernah tetapi tidak efektif 2 = pernah dan efektif	Survei ke pengusaha
8.4.4	Kebijakan / program pemda untuk menghubungkan IKM/UKM dengan startup lokal atau generasi milenial yang memiliki jasa menjual produk IKM//UKM melalui e-marketing	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik (terorganisasi) dan berkelanjutan	FGD dengan FEDEP

Catatan=

Hingga laporan akhir ini dibuat, data kerkait Jumlah lembaga riset yang menunjang peningkatan ekonomi dan teknologi dan Jumlah Perusahaan lokal/nasional yang ada di Surakarta dan bergerak di bidang High tect dan ICT produk belum diperoleh maka dalam pengolahan data tidak dimasukan ke dalam model penilaian.

BAB IV

PENGUMPULAN DATA PEL

Pengisian kuesioner PEL Bappenas selanjutnya dibagi menjadi tiga kelompok: pengumpulan data objektif, pengumpulan data melalui FGD dan Pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar ke para Pengusaha IKM dan pengurus sentra di Kota Surakarta.

IV.1. PENGUMPULAN DATA OBJEKTIF PEL

Pada bagian ini, pengumpulan data objektif ini telah dilakukan oleh tim Bappeda Kota Surakarta. Pengumpulan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing item pertanyaan yang bersumber dari sebagian kuesioner PEL Bappenas. Berikut ini hasil pengisian indikator PEL yang didasarkan data objektif dari Bappeda Kota Surakarta.

Tabel 4.1 Penilaian Indikator PEL yang didasarkan Data Objektif

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Target responden dan jawaban
1	Dimensi pertama= pelaku Usaha		
1.1	Peraturan (Perda/Perkada/SK Ka. SKPD) tentang kemudahan investasi dalam bentuk (item); a. Insentif fiskal b. Penyederhanaan perijinan c. Penyediaan lokasi/lahan d. Ketenagakerjaan	0 = 0 - 1 item peraturan 1 = 2 - 3 item peraturan 2 = ≥ 4 item peraturan	Data Bappeda 2 = ≥ 4 item peraturan
	Peraturan terkait kemudahan investasi antara lain : 1. Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 ttg Penanaman Modal 2. Pemerintah Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah 3.1 Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha "Pedaringan" Kota Surakarta 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata 7. Perda Kota Surakarta No 9 tahun 2014 tentang Jasa Pemandokan 8. Perda Kota_Surakarta No 5 tahun 2014 pemberdayaan UMKM		

	<p>9. Kota_Surakarta_1_2014 tentang izin gangguan (perizinan pendirian usaha)</p> <p>10. Kemendagri membatalkan 3.143 Perda, dua diantaranya dari Pemkot Surakarta yaitu =</p> <p>10.1 Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/ Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016.</p> <p>10.2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5306 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi</p>		
1.4	Keamanan (penjarahan, konflik sosial, premanisme dan buruh mogok)	0 = Tidak ada (1 = ada intesitas 2x/thn) 2 = ada intensitas > 2x/th	Data /TIM bappeda (1 = ada intesitas 2x/thn)
	Fakta= Pengunjuk rasa di DPRD Surakarta sempat aksi lempar-lempar (Senin, 30 September 2019) Pengunjuk rasa di DPRD Surakarta sempat aksi lempar-lempar		
1.9	Upaya Pemda untuk peningkatan teknologi, manajemen, dan kelembagaan usaha lokal (aspek izin usaha, badan hukum, organisasi usaha)	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda (1 = ada)
	<p>1. Adanya Perda Kota Surakarta No 5 tahun 2014 pemberdayaan UMKM dan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) berdiri wal 2015 ini. PLUT yang dibangun di kawasan Solo Techno Park (STP) itu memberikan tujuh layanan bagi Koperasi dan UMKM. Tujuh layanan = konsultasi bisnis, pendampingan, pemberian fasilitas akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, networking, dan layanan pustaka entrepreneur.</p> <p>2. Techno-park memberikan =</p> <p>2.1 Pelayanan seperti pelatihan, magang dan memberikan informasi bagi entrepreneur baru,</p> <p>2.2 inkubator bisnis baru</p> <p>2.3 Pengembangan teknologi (teknologi tepat guna)</p> <p>3. AK-Tekstil Solo (Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta memberikan pelatihan dan pendidikan, magang bagi pekerja / penduduk kota Surakarta</p>		

1.12	Insentif pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya perijinan.	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda (1 = ada)
	<p>1. Peraturan daerah kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penanaman modal Pasal 19 berbunyi=</p> <p>1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Penanam Modal berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan atau retribusi daerah.</p> <p>2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada Penanam Modal berupa:</p> <p>a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. Penyediaan lahan atau lokasi;</p> <p>d. Pemberian bantuan teknis;</p> <p>e. Percepatan pemberian perizinan.</p> <p>2. Kemudahan perizinan melalui online http://perijinanonline.surakarta.go.id/index.php?mod=izin.daftar&sub=izinDetail&act=view&typ=html&izin=wAw%3D</p>		
4	Dimensi Keempat = PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		
4.1	Sistem industri yang berkelanjutan (adanya keterkaitan pengadaan bahan baku, produksi, dan pengolahan)	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda (1 = ada)
	Telah dibangun beberapa pengolahan limbah industri tekstil dan limbah industri tahu/tempe. Untuk pengadaan bahan baku masih perlu ditindaklanjuti hubungan kerjasama antar industri di Kota Surakarta dan kabupaten lainnya		
4.2	Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri	0 = tidak ada 1 = ada	Data /TIM bappeda (1 = tidak ada)
	Jebres = industri tekstil pasar kliwon, batik semar dan batik pasar kliwon		
4.3	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Business plan	0 = < 25 % 1 = 25 – 50 % 2 = > 50 %	Data bappeda (0 = < 25 %)
	Umumnya Perusahaan kecil (IKM dan UKM) tidak memiliki rencana bisnis termasuk beberapa klaster belum memiliki rencana bisnis yang baik kecuali sentra Sentra Kauman dan Sentra Batik Laweyan		
4.4	Jumlah perusahaan yang melakukan Inovasi pengembangan produk dan pasar	0 = < 25 % 1 = 25 – 50 % 2 = > 50 %	Data Bappeda (1 = 25 – 50 %)
	<p>Hasil kajian sentra=</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri batik Laweyan dan Kauman pada umumnya melakukan secara periodik melakukan pengembangan desain dan beberapa inovasi teknologi - Industri sangkar burung banyak yang melakukan pengembangan produk (menerima order) baru tetapi teknologi yang digunakan tidak berkembang 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Industri letter, box iklan, plang nama juga terus melakukan inovasi produk sesuai selera pasar dan sebagian melakukan mengadopsi teknologi digital printing / laser cutting - Industri tahu, tempe dan abon , rambak masih kurang melakukan desain kemasan dan inovasi produk. Teknologi yang digunakan sebagian sudah menggunakan mekanisasi (ketel uap, kemasan tempe otomatis, steam daging) <p>Industri yang belum banyak melakukan perbaikan inovasi produk, inovasi teknologi proses produksi dan inovasi pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - industri kain perca dan kerajinan yang lain desain produk masih monoton - Industri shuttle cock teknologi yang digunakan tidak berkembang dan belum mampu memenuhi standar PBSI - Industri mebel kayu masih belum mampu mengembangkan desain produk, teknologi produksi (oven) dan pemasaran 		
6	Dimensi enam = PROSES MANAJEMEN		
6.1	Analisis dan pemetaan potensi ekonomi	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappeda (1 = dilakukan sebagian)
	<p>Pemkot telah melakukan beberapa kajian klaster industri (sentra batik, makanan, permata, blangkon, sangkar burung) Pemkot juga telah melakukan kajian ekonomi kreatif</p>		
6.2	Penilaian terhadap daya saing wilayah	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappeda (2 = dilakukan menyeluruh)
	<p>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek) memberikan penilaian Anugerah Iptek dan Inovasi 2019 kategori Budhipura dan Budhipraja,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 8 kandidat Anugerah Iptek Kategori Budhipura, yakni Provinsi Bali, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. 2. Kandidat Anugerah Iptek Kategori Budhipraja Pemerintah Kabupaten berjumlah 7 yakni Kabupaten Badung, Bogor, Konawe Selatan, Kulon Progo, Luwu Utara, Toli Toli, dan Wonogiri. 3. Kandidat Anugerah Iptek Kategori Budhipraja Pemerintah Kota adalah Kota Bukit Tinggi, Cimahi, Salatiga, Surakarta, Pontianak, Tarakan, dan Tegal. <p>Daftar penerima Anugerah Iptek dan Inovasi 2019:</p> <p>Budhipura: Peringkat I : Sulawesi Selatan Peringkat II : Jawa Barat Peringkat III : Jawa Tengah</p> <p>Budhiparaja Kota Peringkat I : Cimahi Peringkat II : Tegal Peringkat III : Tarakan Peringkat IV: Surakarta</p> <p>Budhipraja Kabupaten: Peringkat I : Luwu Utara Peringkat II : Wonogiri</p>		

	Peringkat III : Kulonprogo		
	Read more at https://ristekdikti.go.id/kabar/malam-apresiasi-hakteknas-24-menristekdikti-beri-penghargaan-bagi-aktor-ipitek-dan-inovasi-tahun-2019/#qcg58QoMb7WsRSBG.99		
6.3	Pemetaan kondisi politis lokal	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappeda 2 = menyeluruh
	Kajian keamanan dan ketertiban Rakormuspida (bagian pemerintah)		
6.4	Identifikasi stakeholder PEL	0 = tidak dilakukan 1 = dilakukan sebagian 2 = dilakukan menyeluruh	Data /TIM bappeda (2 = menyeluruh)
	Stakeholder PEL sudah sebagian dilibatkan dalam kepengurusan FEDEP kota Surakarta yaitu anggota FEDEP		
6.5	Penggunaan hasil diagnosis sebagai dasar perencanaan PEL	0 = < 25% 1 = 25-75% 2 = >75%	Data /TIM bappeda (1 = 25-75%)
	Setiap tahun mulai tahun 2015 Bappeda telah melakukan kajian PEL untuk mendapatkan analisis kondisi ekonomi kota Surakarta.		
6.6	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan PEL	0 = <25% terlibat 1 = 25%-50% terlibat 2 = >50% terlibat aktif	Data /TIM bappeda (2 = >50% terlibat aktif)
	Setiap kajian perencanaan ekonomi kota Surakarta seperti kajian sentra permata Jayengan, sentra blangkon, dan sentra industri mebel, kajian sentra batik, kajian sentra makanan dan kajian sentra sangkar burung selalu melibatkan semua stakeholder yang terlibat antara lain pengurus sentra, akademisi, OPD terkait dan FEDEP sebagai representatif dari wakil asosiasi bisnis yang ada di Surakarta.		
6.8	Keterlibatan Stakholder dalam proses penyusunan indikator evaluasi	0 = <25% terlibat 1 = 25%-50% terlibat 2 = >50% terlibat aktif	Data /TIM bappeda (2 = >50% terlibat)
	Laporan FEDEP dan rekomendasi fedep		
6.9	Keterlibatan stakeholder dalam proses monitoring dan evaluasi	0 = <25% terlibat 1 = 25%-50% terlibat 2 = >50% terlibat aktif	Data /TIM bappeda 2
6.12	Penggunaan hasil evaluasi dalam perbaikan perencanaan.	0 = <25% 1 = 25%-75% 2 = >75%	Data /TIM bappeda

IV.2. PENGUMPULAN DATA OBJEKTIF RESPONDEN PELAKU PEL (PENGUSAHA DAN PENGURUS SENTRA IKM)

Selama bulan Oktober telah menyebar sebanyak 35 kuesioner ke sejumlah pengusaha (industri kecil, dan menengah). Para pengusaha yang dilibatkan terdiri atas beberapa

jenis usaha seperti= pengusaha atau pemilik industri tekstil (batik), baju fashion, furniture, stamp batik, industri makanan (abon, roti, renginang), minuman, sangkar burung, blangkon, kerajinan sepatu, permata, percetakan, dan mainan anak-anak. Dari sejumlah tiga puluh lima kuesioner yang disebar, Tim Bappeda berhasil mengumpulkan data sebanyak 23 pengusaha yang memiliki wawasan luas dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan ekonomi Lokal. Berikut ini adalah hasil jawaban kuesioner dari seluruh responden. Hasil responden merupakan nilai modus jawaban yang mempertimbangkan sebaran jawaban responden. (metode ini telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bapenas Pusat). Berikut ini hasil jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini=

Tabel 4.2 Penilaian Indikator PEL yang didasarkan Data Kuesioner hasil 23 responden

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
1	Dimensi pertama= pelaku Usaha				
1.1	Informasi prospek bisnis (buku/booklet/leaflet peluang investasi, official web site)	0 = tidak tersedia 1 = tersedia tetapi kurang informatif/lengkap/tidak mutakhir 2 = tersedia dan informatif, lengkap dan mutakhir	2	0	1
1.2	Kampanye peluang usaha melalui ; 1. Media massa (media cetak, elektronik, web site) 2. Kegiatan interaktif (temu usaha/pameran /seminar potensi daerah).	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	2
1.3	Pusat pelayanan investasi dengan Jasa layanan konsultasi investasi (Plut, IKM center, BPS= potensi pasar, penduduk berpendapatan menengah atas)	0 = tidak tersedia 1 = tersedia namun layanan tidak memadai 2 = tersedia dan layanan memadai	2	0	0 (konformasi =1*)
1.4	Upaya Fasilitasi permodalan bagi dunia usaha oleh Pemda (Data BI memberikan permodalan terbesar = data bank Solo)	0 = tidak ada 1 = Ada	1	0	1
1.5	Promosi produk UKM untuk memperluas pasar oleh pemda	0 = tidak ada 1 = Ada	1	0	1

1.6	Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru	0= tidak ada 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	2	0	1
1.7	Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru	0 = Lebih dari 12 hari 1 = 10 – 12 hari (standard SPM) 2 = Kurang dari 10 hari	2	0	1
2	Dimensi Kedua= Faktor Lokasi				
2.1	Aksesibilitas dari dan ke lokasi Pabrik/Toko ibu / bapak beraktivitas	0 = buruk 1 = sedang 2 = mantap	2	0	2
2.2	Sarana transportasi (angkot / bus trans solo)	0 = tidak tersedia 1 = tersedia namun tidak memadai 2 = tersedia dengan kualitas baik	2	0	2
2.3	Ketersediaan air bersih	0 = tidak tersedia 1 = tersedia kualitas rendah 2 = tersedia kualitas baik	2	0	2
	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
2	Dimensi Kedua= Faktor Lokasi				
2.4	Tenaga kerja terampil	0 = tidak tersedia 1 = tersedia terbatas 2 = tersedia mencukupi	2	0	2
2.5	Etos kerja SDM	0= SDM lokal tidak terbiasa berusaha/ bekerja pada kegiatan komoditi yang diunggulkan 1=SDM sudah terbiasa berusaha/ bekerja pada kegiatan komoditi yang diunggulkan	1	0	1
3	Dimensi Ketiga = KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN				
3.1	Adakah program / Kebijakan pemberdayaan UKM (a.l; kemitraan dan subkontrak)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
3.2	Adakah program / Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
3.3	Adakah program / Kebijakan informasi bursa tenaga kerja	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif	2	0	1

		2 = ada dan efektif			
3.4	Adakah program / Kebijakan Pengembangan keahlian (peningkatan keterampilan)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
3.5	Adakah program / Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan dunia usaha (memanfaatkan dana CSR)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif (laporan tidak berjalan baik, kendala = masyarakat tahu hanya bantuan barang, kurang pendampingan) Akan membangun system informasi antara IKM dan perusahaan besar)	2	0	1
	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
4	Dimensi empat = TATA PEMERINTAHAN				
4.1	Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan (a.l.: penerapan amdal)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif (penyelesaian antar daerah, data LH)	2	0	1
4.2	Kemitraan / koordinasi antar OPD di bidang infrastruktur (a.l.: BOT)	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal (dana terbatas, pilot project, konsolidasi dan komitmen pendanaan dari pusat dan provinsi)	2	0	1
4.3	Kemitraan / koordinasi antar OPD di bidang promosi dan perdagangan	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	2	0	1
4.4	Kemitraan / koordinasi antar OPD di bidang pembiayaan usaha (a.l.: penjaminan, penyaluran kredit, PKBL)	0 = tidak ada 1 = ada dan terbatas 2 = ada dan optimal	2	0	1
	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
4	Dimensi empat = TATA PEMERINTAHAN				
4.5	Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur efektif berdampak pada pelayanan (a.l.: remunerasi, jenjang karir)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	2 (ada dan efektif)

4.6	Prosedur pelayanan administrasi publik: 1. sederhana 2. jelas 3. cepat 4. terjangkau	0 = 0 – 1 aspek 1 = 2 – 3 aspek 2 = 4 aspek	2	0	2
4.7	Status Asosiasi industri/ komoditi/ Forum Bisnis yang anda (pengusaha) terlibat	0 = tidak ada 1 = mati suri 2 = Ada dan aktif (komunikasi dgn pelaku usaha dan pemda)	2	0	1
4.8	Peran Asosiasi industri/ komoditi/ Forum bisnis terhadap perbaikan kebijakan pemerintah di bidang PEL	0 = tidak efektif karena bersifat politis 1 = tidak efektif karena kendala internal 2 = efektif	2	0	1
4.9	Manfaat asosiasi/organisasi bagi anggotanya (paguyuban)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi rendah 2 = ada dan optima	2	0	2
5	Dimensi lima = Ekonomi Kreatif				
5.1	Dukungan pemerintah dalam “pendanaan” untuk kegiatan budaya (ada kalender event budaya, masing2 kelurahan 54 kelurahan)	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	2
5.2	Dukungan pemerintah dalam “Non-finansial” (seperti potongan pajak) untuk kegiatan budaya (pengurangan tax) spt= Solo grate sales, perizinan	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	2
5.3	Dukungan pemerintah terhadap perusahaan ekonomi kreatif (pameran, pelatihan, akses penjualan, pengembangan, ruang kreatif),	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	2
5.4	Adanya regulasi yang mendorong sektor budaya ()	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
5.5	Bagaimana peranan masyarakat / perusahaan bisnis (dukungan perusahaan untuk menspori kegiatan budaya, jumlah bantuan Volunteering yang	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik (terorganisasi) dan berkelanjutan	2	0	1

	menangani kegiatan budaya) → kadin, (data sponsorship = seperti Bank Jateng)				
6	Dimensi lima = Smart economy				
6.1	Adanya dorongan dari pemerintah atau pemkot untuk menggunakan aplikasi marketplace untuk menjual barang atau jasa. Dorongan ini disertai dengan pelatihan dan kemudahan mencari partner marketplace.	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik (terorganisasi) dan berkelanjutan (ada karena belum mulai , belum efektif karena masih terbatas yang bisa menggunakan)	2	0	1
6.2	Adanya dukungan berupa pameran untuk memasarkan produk / jasa ke pasar yang lebih luas (pameran nasional atau internasional)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	2
6.3	Penggunaan layanan E-Government (layanan investasi online, Layanan Administrasi Kependudukan online)	0 = Belum pernah 1 = pernah tetapi tidak efektif 2 = pernah dan efektif	2	0	1
6.4	Manfaat perusahaan / sentra dari pengembangan riset atau inovatif produk/ teknologi baik dari pemerintah maupun dari Perguruan tinggi (lembaga riset) atau Perusahaan besar swasta,	0 = Belum pernah 1 = pernah tetapi tidak efektif 2 = pernah dan efektif	2	0	1

Sumber= data survei 35 responden (pelaku usaha)

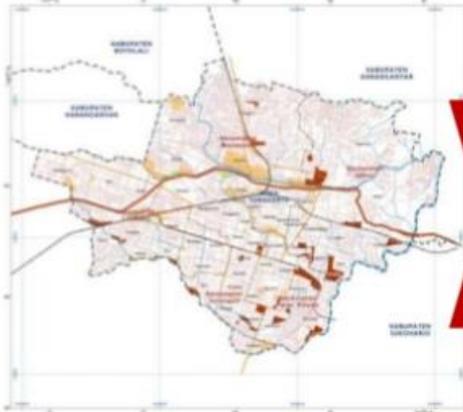
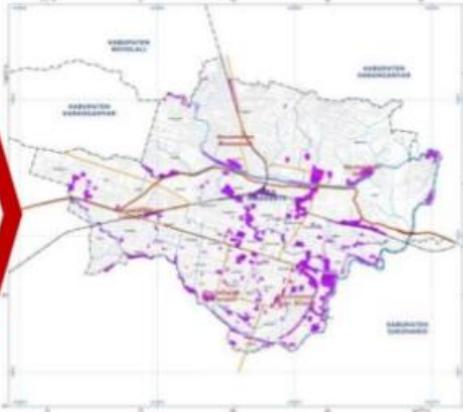
IV.3. PENGUMPULAN DATA FGD PEMANGKU KEPENTINGAN PEL (FEDEP DAN OPD)

Pengumpulan data yang ketiga adalah data indikator PEL yang diambil dari hasil diskusi anggota FEDEP dan pemangku kepentingan masalah PEL khususnya OPD yang terkait dengan PEL. OPD ini diwakili oleh beberapa dinas terkait dengan pembangunan ekonomi seperti Dinakerperin, Disdag, Diskopumkm, Dispar, DPUPR, DPMPTSP dan Bappeda. **Tabel berikut ini hasil FDG dengan stakeholder PEL**

Tabel IV.3 Indikator PEL hasil FGD stakeholder PEL

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Target responden
1	Dimensi pertama= pelaku Usaha		
1.3	Kepastian berusaha dan hukum (a.l. ijin lokasi usaha, tata ruang, arbitrase, persaingan usaha, peradilan niaga)	0 = tidak ada (sering terjadi perubahan kebijakan, lemahnya penegakan hukum) 1 = ada (tidak terjadi perubahan kebijakan, ada penegakan hukum)	FDG FEDEP 1 = ada
	<p>Kemendagri membatalkan 3.143 Perda, dua diantaranya dari Pemkot Surakarta yaitu =</p> <p>1.1 Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/ Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016.</p> <p>1.2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5306 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi</p> <p>(terjadi perubahan kebijakan untuk perizinan) tetapi dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan investasi</p>		
1.10	Fasilitasi Pelatihan kewirausahaan bagi pengusaha baru (Kemampuan Teknik dan entrepreneurship)	0= tidak 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	FDG FEDEP 2 = ada dan memadai
	<p>1. Adanya Perda Kota_Surakarta No 5 tahun 2014 pemberdayaan UMKM dan PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) berdiri wal 2015 ini. PLUT yang dibangun di kawasan Solo Techno Park (STP) itu memberikan tujuh layanan bagi Koperasi dan UMKM. Tujuh layanan = konsultasi bisnis, pendampingan, pemberian fasilitas akses pembiayaan, pemasaran dan promosi, pelatihan bisnis, networking, dan layanan pustaka entrepreneur.</p> <p>2. Techno-park memberikan =</p> <p>2.1Pelayanan seperti pelatihan, magang dan memberikan informasi bagi entrepreneur.baru,</p> <p>2.2inkubator bisnis baru</p> <p>2.3 Pengembangan teknologi (teknologi tepat guna)</p> <p>3. AK-Tekstil Solo (Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta memberikan pelatihan dan pendidikan, magang bagi pekerja / penduduk kota Surakarta</p> <p>Seringkali pihak pengelola kesulitan mencari calon-calon / trainer karena kurangnya informasi / minat penduduk kota Surakarta untuk mengikuti pelatihan / inkubator bisnis</p>		
2	Dimensi Kedua= Faktor Lokasi		
2.2	Akses ke pelabuhan laut	0 = sulit 1 = mudah	FDG FEDEP 1
	Saat ini ada jalan tol dari Surakarta ke pelabuhan laut Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Perak Surabaya		

2.3	Akses ke pelabuhan udara	0 = sulit 1 = mudah	FDG FEDEP 1
	Saat ini ada jalan tol langsung yang dapat menuju Bandara Adi Sumarmo dan Bandara Juanda		
2.5	Infrastruktur komunikasi	0 = tidak tersedia 1 = tersedia kualitas rendah 2 = tersedia kualitas baik	FDG FEDEP 2
	Semua Jaringan telekomunikasi		
2.6	Infrastruktur energi	0 = tidak tersedia 1 = tersedia kualitas rendah 2 = tersedia kualitas baik	FDG FEDEP 1
	Masih sering terjadi pemadaman bergilir dari PLN sehingga mengganggu operasional usaha bisnis		
2.9	Jumlah Lembaga keuangan lokal (Bank Umum, BPR, LKM, KSP/ USP)	0 = lebih rendah dari rata-rata daerah sekitar 1 = sama dengan rata2 daerah sekitar 2 = lebih tinggi dari rata-rata daerah sekitar	FDG FEDEP 2 = lebih tinggi dari rata-rata
	Kota Surakarta sebagai kota yang melayani perbankan di Jawa Tengah bagian Selatan, seperti Klaten, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Karanganyar. Jumlah bank lebih tinggi dari daerah sekitarnya		
2.10	Peluang kerjasama dalam industri sejenis (sentra) maupun industri hulu-hilir	0 = tidak ada 1 = kecil 2 = besar	FDG FEDEP 1= kecil
	<p>Pemerintah kota Surakarta telah menetapkan SK pembinaan sentra industri sebanyak 16 sentra. Langkah berikutnya pemkot telah mendorong berdirinya lembaga paguyuban untuk mengelola aktivitas kegiatan sosial dan pembinaan lingkungan sentra dan mendorong berdirinya koperasi di masing-masing sentra untuk menangani kegiatan bisnis para anggota sentra.</p> <p>Sedangkan hubungan industri kecil (sentra) dengan Industri besar dan hulu-hilir belum berjalan dengan baik.</p>		
2.11	Lembaga penelitian	0 = tidak berperan 1= berperan namun terbatas 2 = berperan optimal	FDG FEDEP 1 = berperan terbatas
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Techno-park memberikan = <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pelayanan seperti pelatihan, magang dan memberikan informasi bagi entrepreneur baru, 1.2 inkubator bisnis baru 1.3 Pengembangan teknologi (teknologi tepat guna) 2. AK-Tekstil Solo (Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta memberikan pelatihan dan pendidikan, magang bagi pekerja / penduduk kota Surakarta 3. LPPM perguruan tinggi seperti LPPM UNS, LPPM UMS, UNISBA, universitas ISI (Pariwisata dan hotel) banyak melakukan riset dasar dan 		

	<p>riset terapan yang dapat diarahkan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di industri, perdagangan dan usaha di</p> <p>Tetapi selama ini masih dirasakan kurang oleh IKM terbukti dalam survei klaster industri yang</p>		
2.12	Kualitas permukiman	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP 1= sedang
<p>Pemkot Surakarta terus menerus membenahi kualitas permukiman penduduk kumuh Selasa, 14 Agustus 2018 (sumber= http://kotaku.pu.go.id/view/7192/kawasan-kumuh-semanggi-dalam-sebuah-rencana-penataan)</p> <p>Permasalahan penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta, Jawa Tengah, masih berhadapan dengan banyaknya perumahan dan permukiman kumuh. Merujuk identifikasi pada 2016, masih ada 359,55 hektare wilayah kumuh di Surakarta, yang tersebar di lima kecamatan di 51 kelurahan--SK Wali Kota Surakarta Nomor: 413.21/38.3/1/2016. Dari deretan angka tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Kawasan Semanggi sebagai lokasi prioritas penataan secara bertahap.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014: Luas Kawasan Kumuh adalah 467.62 Ha</p> </div> <div style="font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">}</div> <div style="text-align: center;">  <p>Hasil Verifikasi: Luas Kawasan Kumuh adalah 359.53 Ha</p> </div> </div> <p>Tahap pertama penataan Kawasan Semanggi dilaksanakan di RW 23 melalui proyek pemugaran dan peremajaan. Dan untuk peremajaan kawasan, sebagian warga masyarakat harus dipindah untuk kemudian dimukimkan kembali. Lantaran itulah disusun <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> (LARAP) untuk penataan kawasan yang manusiawi, berbudaya, dan berkeadilan. Dokumen LARAP inilah yang menjadi pedoman untuk pengadaan tanah dan permukiman kembali di Kawasan Semanggi.</p>			



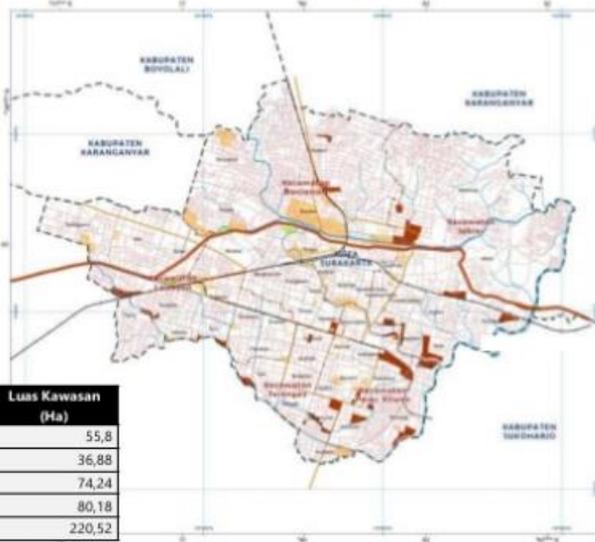
PROFIL KAWASAN KUMUH

Clip slide

SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014

Berdasarkan SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta, luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta adalah **467.62 Ha**, terdiri atas **51 kawasan**.

Klasifikasi Kumuh
 Ringan
 Sedang
 Berat



No	KECAMATAN	Luas Kawasan (Ha)
I	KECAMATAN LAWHEYAN	55,8
II	KECAMATAN SERENGAN	36,88
III	KECAMATAN PASAR KLWON	74,24
IV	KECAMATAN JEBRES	80,18
V	KECAMATAN BANJARSARI	220,52

Atas dasar itulah Pemkot Surakarta bersama Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) **menyusun rencana aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surakarta**. Penanganan kumuh ini melibatkan berbagai instansi Pemkot Surakarta yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, yang terangkum atas: Penataan permukiman ilegal di atas lahan sempadan Sungai Bengawan Solo, Penataan permukiman di atas lahan Hak Pakai 16 (milik pemda), Pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir di permukiman kumuh, dan Peningkatan kualitas infrastruktur yang tersebar di permukiman kumuh Kawasan Semangg

Sumber= <https://www.slideshare.net/bogesi/paparan-perda-penanganan-permukiman-kumuh-kota-surakarta>

2.13	Kualitas lingkungan	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP 1= sedang
------	---------------------	----------------------------------	------------------------

Hasil kajian =
 Ringkasan Eksekutif
 INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAERAH (IKPLHD)
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2018
 Hasil pemantauan kualitas 6 air sungai di Kota Surakarta menunjukkan :
 1) Sungai JENES (Tercemar)
 2) Sungai PREMULUNG (Tercemar)
 3) Sungai BROJO (Tercemar)
 4) Sungai PEPE HILIR (Tercemar)
 5) Sungai ANYAR (Masuk Kelas III dan IV)
 6) Sungai GAJAH PUTIH (Masuk Kelas III dan IV)

Pencemaran Udara= Berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kota Surakarta secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2016 – 2017 yaitu dari 39,33 menjadi 43,49, meskipun statusnya masih sama, yaitu waspada. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan upaya lingkungan sehingga tingkat pencemaran menurun.

	<p>Berdasarkan data time series timbunan sampah dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami penurunan dari 109.282,71 Ton/Tahun menjadi 106.278,86 Ton/Tahun atau sebesar 2,83%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan sampah yang dijalankan kota Surakarta yaitu melalui program Bank sampah dan 3R.</p> <p>Terdapat 20 titik lokasi rawan kemacetan di Kota Surakarta. Titik rawan kemacetan di Kota Solo tersebut adalah: Solo Square Mall di Jalan Slamet Riyadi; Faroka di Jalan Slamet Riyadi; Solo Grand Mall di Jalan Slamet Riyadi; Bundaran Manahan di Kota Barat; Pasar Nongko; Gillingan di Nusukan; Simpang Baron di Jalan Radjiman; Solo Paragon di Jalan Yosodipuro; Simpang Joglo; Pasar Legi; Perempatan Ngemplak; Warung Pelem dan Pasar Gede; kawasan perbelanjaan di Coyudan; Simpang Samratulangi, Simpang Tirtonadi; Simpang Manahan, Simpang Dawung, Simpang RS. Dr. Oen Kandang sapi, perempatan Gading, dan Perempatan pasar Kliwon. Sumber= BUKU I - DLH Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta www.surakarta.go.id › web › utility › download</p>		
2.14	Kualitas dari fasilitas pendidikan	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP 1= baik
	<p>Pemerintah Kota Surakarta menerapkan peraturan mengenai zonasi untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun Ajaran 2018/2019 guna mendekatkan sekolah kepada masyarakat.</p> <p>penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai hal yang baik karena memaksa pemerintah daerah (Pemda) untuk meratakan mutu pendidikan.</p> <p>masih ada banyak kekurangan dalam penerapan sistem zonasi pada sisi positif selain pemerataan mutu pendidikan, pelaksanaan sistem zonasi juga bisa menekan angka “jual-beli bangku” sekolah favorit, karena siswa diterima berdasarkan jarak terdekat dari sekolah. Tetapi ada sisi negatif = “Meski masih ada penyelewengan seperti membuat KK (Kartu Keluarga) palsu”</p> 		

2.15	Kualitas pelayanan kesehatan	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP 2= baik
------	------------------------------	----------------------------------	----------------------

Laporan SPM kesehatan Jateng 2017

JENIS PELAYANAN

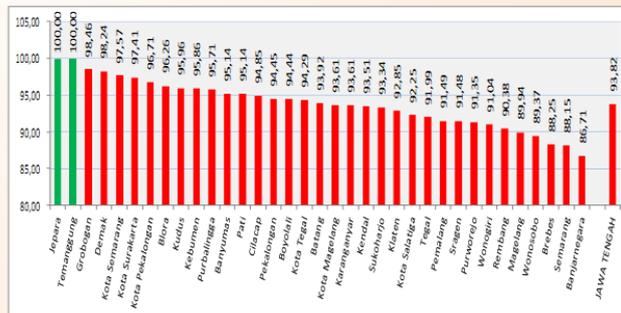
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR SPM BID. KES. KAB/KOTA (1)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator SPM yang mencapai target	Prosentase (%)
1	Kab. Temanggung	8	66,67
2	Kota. Surakarta	7	58,33
3	Kab. Demak	6	50,00
4	Kota Pekalongan	6	50,00
5	Kab. Karanganyar	5	41,67
6	Kab. Jepara	5	41,67
7	Kota Magelang	5	41,67
8	Kab. Purbalingga	4	33,33
9	Kab. Sukoharjo	4	33,33
10	Kab. Kendal	4	33,33
11	Kota Salatiga	4	33,33
12	Kab. Banjarnegara	3	25,00

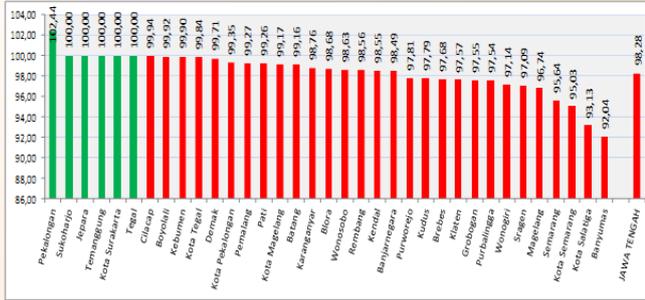
PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

Provinsi = 93,82%
Target = 100%



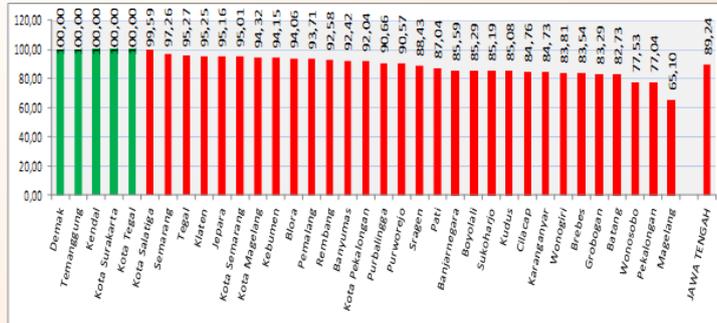
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

Provinsi = 98,28%
Target = 100%



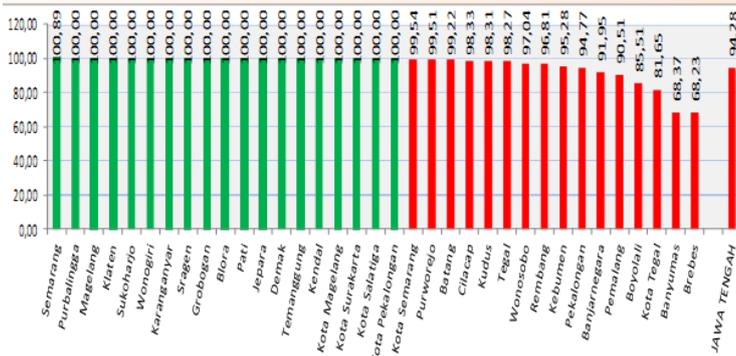
PELAYANAN KESEHATAN BALITA

Provinsi = 89,24%
Target = 100%



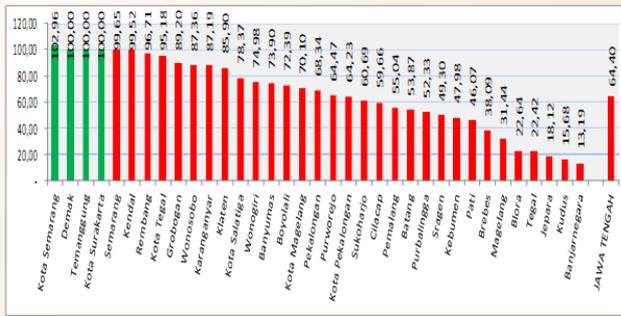
PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR

Provinsi = 94,28%
Target = 100%



PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT

Provinsi = 64,40%
Target = 100%



2.16	Facilities umum dan fasilitas sosial	0= buruk 1= sedang 2= baik	FDG FEDEP 2 =baik
------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------

3 Dimensi Ketiga = KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN

3.1	Adakah program/ Kebijakan peningkatan investasi	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 2= ada dan efektif
-----	---	--	---------------------------------

Nomor 24 Tahun 2006, pelayanan PTSP - OSS (One Stop Service).

- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang didasari oleh Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
- Pemkot Surakarta menggabungkan KPPT dengan Kantor Penanaman Modal (KPM) menjadi BPMPT yang didasari oleh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sistem pelayanannya masih berbentuk pelayanan satu atap
- Tanggal 2 Januari 2017 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Surakarta berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani total 54 jenis perizinan.

Kebijakan peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan untuk meningkatkan Investasi. Berdasarkan BKPM Investment Award 2018, dimana Surakarta peringkat kedua setelah Kota Semarang diperingkat tiga.

Sumber= <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/103466/mutu-pelayanan-perizinan-gairahkan-investasi> (Fri, 13 Jul 2018)

3.2	Adakah program / Kebijakan promosi daerah	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1 = ada tetapi tidak efektif
-----	---	--	---

Dinas pariwisata =

- kegiatan promosi tahun 2018, pemasaran pariwisata ke Lombok dan Banjarmasin, mengadakan konsep table top dengan tema Solo Night. Pada acara ini para pelaku travel agent yang ada di masing-masing daerah diundang. diajak untuk

	<p>berdiskusi sembari menikmati suasana Solo melalui tema yang dibawa. "Kemudian di situ ada 'bussines meeting' yang membicarakan potensi wisata serta tarif, sumber https://solo.tribunnews.com/2018/03/13/pemkot-solo-gencar-lakukan-promosi-wisata-daerah.</p> <p>2. Ketua DPRD Surakarta Teguh Prakosa menyatakan jumlah anggaran yang disediakan APBD Kota Surakarta berkisar seratusan juta atau lebih. Anggaran ini tidak seimbang dengan penerimaan APBD lebih besar Setahi PAD berkisar Rp 9-11 miliar, melalui banyak kegiatan MICE seperti rapat rapat di hotel-hotel. Sementara itu stakeholder pariwisata mendesak untuk Adapun membuat program promosi untuk mengemas potensi wisata dan promosinya lebih ciamik lagi sehingga bisa mendatangkan jumlah wisata domestik dan internasional lebih banyak. (sumber=https://suaramerdekasolo.com/2019/07/28/anggaran-promosi-wisata-kota-surakarta-mendesak-ditambah/ 29 Juli 2019)</p> <p>3. Okupansi Hotel Stagnan, Solo Batik Carnival Butuh Lebih Banyak Promosi Kota Solo akan menyelenggarakan event tahunan Solo Batik Carnival (SBC) 2018, pada tanggal 11-15 Juli 2018 . Tahun ini, pergelaran yang telah memasuki usia kesebelas ini mengambil tema Ika Paramartha, dan secara teknis mengangkat tema batik Nusantara. Hal itu berbeda dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang hanya mengangkat batik Jawa. Namun perhelatan SBC tahun ini kurang terasa gaungnya. Hal ini disampaikan oleh General Manager The Alana Hotel and Convention Center yang juga menjabat sebagai Humas dan Promosi Perhimpunan Hotel Indonesia (PHRI) Surakarta Sisto A. Sreshtho. Menurutnya, pengunjung yang khusus datang untuk menyaksikan kurang dari lima persen. Hotel cenderung penuh karena ada kegiatan dari pemerintahan. (MICE) Sumber=https://properti.kompas.com/read/2018/07/10/162547221/okupansi-hotel-stagnan-solo-batik-carnival-butuh-lebih-banyak-promosi?page=all</p> <p>Dinas Perdagangan=</p> <p>4. Minggu (3/2/2019) tepatnya di Plaza Sriwedari, Dinas Perdagangan resmi membuka Semarak Promosi Solo Great Sale Pasar Tradisional, yang diikuti sebanyak 44 pasar di Kota Surakarta Semarak Promosi Solo Great Sale Pasar Tradisional. Dengan adanya Solo Grate Sale ini diharapkan Kota Solo menjadi ramah investasi, mampu menjadi sarana percepatan usaha di solo (sumber = http://surakarta.go.id/?p=12550)</p>		
3.3	Adakah kebijakan persaingan usaha (contoh tentang pembatasan lokasi pasar modern/ supermarket/ hypermarket)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 2= ada dan efektif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional 2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7 Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan Koperasi pada posisi yang sama-sama menguntungkan 		

- c. Jarak Pusat perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling dekat 500 (lima ratus) meter.
- d. Jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbeda dengan jenis barang dagangan Pasar Tradisional.

3. Perlindungan oleh Pemkot=

(Toko modern Solo, Pemkot segera mengkaji ulang keberadaan minimarket pada 2016.) <https://www.solopos.com/toko-modern-solo-pemkot-akan-kaji-ulang-kebutuhan-minimarket-659998>

Solopos.com, SOLO--Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan mengkaji ulang tingkat kebutuhan keberadaan minimarket di Kota Bengawan pada 2016 mendatang. Kajian ini sebagai dasar dalam pendirian minimarket ke depan.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMP) Solo Toto Amanto menyebutkan sedikitnya ada 19 permohonan izin pendirian minimarket baru yang masuk di BPMP. Mereka tersebar di lima kecamatan di Solo.

Namun pengajuan tersebut ditolak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Mei 2014 yang mengatur tentang moratorium pendirian minimarket. Dasar kebijakan **Wali Kota memorandum pendirian minimarket baru** adalah kajian tim teknis yang melibatkan akademisi tentang kebutuhan minimarket.

"Hasil kajian itu menyebutkan bahwa Solo sudah overload minimarket," katanya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2015).

Toto mengatakan kajian teknis tersebut hingga kini masih menjadi dasar BPMP menunda permohonan izin pendirian minimarket baru. Pemkot menurutnya perlu melakukan kajian ulang mengenai keberadaan minimarket di Kota Bengawan. Kajian ini nantinya yang akan menentukan perlu tidaknya penambahan minimarket. Sesuai rencana, kajian akademis dilakukan awal tahun depan.

"Kajian akan dilakukan Bagian Perekonomian dengan melibatkan tim akademisi," katanya.

Menurut Toto, hasil kajian itu nanti akan menjadi dasar Pemkot dalam melangkah menetapkan keberadaan minimarket. BPMP akan memproses izin sesuai dengan kebijakan Wali Kota. Namun pendirian minimarket tetap mengacu peraturan daerah (Perda) No 5/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, di antaranya minimarket wajib berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional. Selain itu, perizinan pembangunan minimarket baru wajib dilengkapi izin usaha toko modern (IUTM) dan memenuhi persyaratan merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar, serta bermitra dengan pedagang kecil.

"Kami tetap akan mengarahkan pendirian minimarket di Solo utara. Kebijakan ini sejalan dengan rencana pengembangan kawasan Solo Utara," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasamuan Pedagang Pasar Tradisional Surakarta (Papatsuta), Wiharto menilai selama ini Pemkot tidak tegas terkait pendirian minimarket di Kota Bengawan. Contoh kasus, Wiharto mengatakan banyaknya minimarket yang mengabaikan proses perizinan, dengan membangun lebih dulu dan mengurus perizinan belakangan.

Wiharto menilai selain tidak tegas, Pemkot juga memberi kelonggaran dalam pengurusan izin minimarket buka 24 jam

	Izin Toko Modern di Solo Ditunda Sampai Moratorium Dicabut (Rabu, 30 Januari 2019 (https://solo.tribunnews.com/2019/01/30/izin-toko-modern-di-solo-ditunda-sampai-moratorium-dicabut))		
3.5	Adakah program / Kebijakan peningkatan peran Perusahaan Daerah	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1 = ada tetap terbatas
	<p>Empat BUMD yang dikelola Pemkot, yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo PD BPR Bank Solo menyumbang PAD tahun 2017 senilai Rp995,3 juta atau naik sekitar Rp75 juta dari tahun lalu yakni senilai Rp920,3 juta. (https://www.solopos.com/sumbangan-pad-dari-bumd-sektor-perbankan-kota-solo-melesat-874474, tahun 2017) Taman Satwa Taru Jurug (TSSJ), Taman Jurug Raup Laba Bersih Rp 1,48 Miliar Selama 2018 Kamis 28 Feb 2019 (https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pnmuq7459/taman-jurug-raup-laba-bersih-rp-148-miliar-selama-2018) Pusat Pergudangan Kota (PPK) Pedaringan, PD PPK Pedaringan Solo terhadap PAD Kota Solo justru menurun pada 2017. Kontribusi PD PPK Pedaringan PAD Kota Solo pada 2017 senilai Rp415,26 juta atau turun sekitar Rp226,6 juta dibandingkan tahun lalu yakni Rp641,89 juta. (https://www.solopos.com/sumbangan-pad-dari-bumd-sektor-perbankan-kota-solo-melesat-874474) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta) <p>Pemkot Solo juga masih punya andil kepesertaan terhadap BUMD milik Provinsi Jateng, yakni Bank Jateng dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon</p>		
3.10	Adakah program / Kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1= ada belum efektif
	<p>Program / kebijakan yang dijalankan= melalui dari data (E-SIK) lalu membuat program partisipatif untuk mengentaskan kemiskinan=</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemkot telah membangun Sistem informasi Data tunggal tersebut dibangun melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) dan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) guna mempercepat program penanggulangan kemiskinan daerah. TPKK akan melakukan pendataan, memvalidasi warga miskin di tiap kelurahan. TPKK ini juga berkoordinasi dibawah Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Jawa Tengah. Terdapat lima Kelurahan yang ditetapkan sebagai proyek awal TPKK yakni Kadipiro, Mojosongo, Tipes, Pajang dan Semanggi TPKK akan melakukan Kunjungan ke rumah penduduk miskin. Sesudah mereka mendapat kepastian bahwa keluarga yang bersangkutan benar-benar miskin, data itu ditempel di kantor kelurahan untuk kemudian diuji publik. Masyarakat berhak menyampaikan masukan atau mengusulkan data baru. Pemkot berharap data ini bisa klir tahun ini, agar bisa berjuang ke pemerintah pusat untuk membenarkan data sehingga penerima intervensi bantuan sosial pusat dan daerah bisa tepat sasaran. 		

Kota	Jumlah penduduk miskin				Proporsi penduduk miskin			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Semarang	84.680	83.600	80.900	73.650	4,98	4,83	4,60	4,12
Surakarta	55.920	55.900	54.900	46.990	10,92	10,87	10,64	9,07
Magelang	11.000	10.600	10.600	9.590	9,11	8,75	8,73	7,87
Salatiga	10.790	9.700	9.600	9.240	5,87	5,20	5,08	4,82
Pekalongan	23.620	23.700	22.500	20.520	7,97	7,92	7,45	6,74
Tegal	20.940	20.300	20.100	19.440	8,51	8,21	8,10	7,81

3.11	Adakah program / Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ industri	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 2= ada dan efektif
	<p>Solo tidak punya kawasan industri, tetapi ada sentra. Pemkot telah menetapkan 16 sentra industri dan telah menyusun rencana mengembangkan sentra industri. Dari 16 sentra ini ada yang telah maju dalam pengelolaan organisasi sentra seperti Sentra Kauman, dimana ada pemisahan yang jelas antara paguyuban batik Kauman yang menangani masalah sosial dan lingkungan, dan koperasi yang melayani penjualan anggota melalui Show-ber. Sentra Laweyan yang memiliki rencana (bisnis plan) yang sangat baik dimana telah memasukkan unsur Agama, budaya, sejarah, bangunan kuno, proses mem-bantik dan pendidikan membatik sebagai bagian aset yang ditawarkan, disamping produk batik, ke turis/ pengunjung ke sentra batik Laweyan. Jadi kedua kampung batik tersebut telah bertransformasi dari kampung industri menjadi sentra /kampung wisata.</p> <p>Sementara sentra lain seperti kain perca, makanan, permata, sangkar burung dan blangkon sudah mulai dibina dan ditata (lingkungan).</p>		
3.12	Adakah program / Kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan (agropolitan) dan perkotaan (Central Business District)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1 =ada tetapi tidak efektif
	<p>Pemkot Surakarta sedang merevisi Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (Perda Nomer 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011 -2031). Salah satu revisi yang diusung adalah = Kota Solo akan mengubah tata ruangnya dan melakukan penyesuaian agar pengembangan potensi wilayahnya sinergis dengan kehadiran sarana infrastruktur Tol Trans Jawa yang diprediksi bakal menjadi andalan untuk peningkatan perekonomian daerah. Kawasan Solo Utara akan dikembangkan menjadi kawasan bisnis (Central Business District).</p> <p>Wilayah Solo Utara yang akan ditata adalah kawasan Joglo, Gilingan dan Komplang yang akan dikembangkan sebagai Central Business District (CBD) Solo Barat Laut dan Mojosongo untuk Solo wilayah Solo Timur Laut. Pengembangan CBD, tentu memerlukan dukungan pusat-pusat pelayanan kota seperti pembuatan jalan konektor, jaringan air bersih, sanitasi, sekolah dan rumah sakit.</p> <p>Disamping itu dorongan Surakarta sebagai kota pariwisata karena adanya lembaga baru yang disiapkan untuk mengembangkan pariwisata di kawasan Joglosemar, yakni Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur yang mendapat amanat dari pemerintah untuk mengembangkan destinasi pariwisata di tiga kawasan Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), yakni Jogja untuk pengembangan destinasi di Jogja dan Borobudur, Solo</p>		

	<p>untuk pengembangan destinasi di Solo dan Sangiran, serta Semarang untuk destinasi di Semarang dan Karimunjawa. https://joss.co.id/2018/05/solo-utara-diubah-jadi-kawasan-bisnis-karena-dekat-tol/</p>		
3.13	Adakah program / Kebijakan pengembangan komunitas seperti: perbaikan lingkungan, perbaikan kampung	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 2= ada dan efektif
	<p>Penataan Kawasan Semanggi Jadi Percontohan Nasional http://surakarta.go.id/?p=9534 (25 Maret 2018) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku bertanggungjawab menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.</p> <p>Untuk Kota Solo program Kotaku telah berjalan sejak tahun 2016 dengan dasar SK Wali Kota mengenai penanganan kawasan kumuh yang ditetapkan 1 Juni 2016 dan termuat dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Pemkot Surakarta. Saat ini luas wilayah Kota Solo mencapai 4.601 ha dan pada tahun 2016 ada sekitar 9% masuk kedalam kategori kawasan kumuh. Kawasan ini terbagi di 28 kelurahan dari 51 kelurahan yang ada di Kota Solo. Hasilnya sudah mulai terasa pada tahun 2017 ini, di Kota Solo terjadi penurunan kawasan kumuh hingga 46,07 ha. Koordinator Kotaku, Cornelius Tri Cahyo, Jumat (23/03) mengatakan untuk tahun 2018 target pengurangan kawasan kumuh di Kota Solo mencapai 120 ha. Dia juga menambahkan dalam menjalankan program ini, Kotaku tidak sendiri namun juga melibatkan pendanaan dari APBN dan juga CSR serta yang paling besar adalah peran dari Pemkot sendiri.</p> <p>Pada tahun 2018 pemerintah pusat melalui Pemerintah Kota Surakarta bersama Kotaku memfokuskan penataan kawasan kumuh menasar daerah Semanggi. Kawasan ini diprioritaskan mengingat luas wilayah kumuhnya paling besar dari beberapa titik yang ada serta ada yang berdiri diatas lahan negara dengan total 214 rumah di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo. Secara teknis penataan kawasan Semanggi dibagi menjadi dua yakni Semanggi utara dan selatan, untuk stage pertama dilakukan di kawasan Semanggi utara tepatnya di RW 23.</p> <p>Ada dua metode yang akan dilakukan dalam menata wilayah kumuh yakni dengan penataan kumuh secara lingkungan dan penataan kumuh secara kawasan. Semanggi dilirik pemerintah sebagai proyek percontohan nasional penataan kawasan kumuh yang berdasarkan konsep Land Consolidation. Berbeda dengan konsep relokasi dan pemugaran, konsep Land Consolidation tidak hanya memperbaiki bentuk fisik bangunan namun juga melakukan peremajaan wilayah.</p>		
3.14	Adakah program /Kebijakan kerjasama antar daerah/ pemda	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 2 = ada dan efektif
	<p>http://kerjasamasolo.surakarta.go.id/kerjasama-pemerintah-kota-surakarta-dengan-pemerintah-daerah-lainnya-tahun-2016/</p> <p>1. Badan Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Pembentukan Forum Litbang dan IPTEK, Forum Pariwisata, Seni dan Budaya; Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah; Kerjasama Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan</p>		

	<p>UMKM, Kerjasama Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan, Kerjasama bidang Ketahanan Pangan</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT. Mahalona Satuan Pemukiman 1(satu) SKPC Koromlonai Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2015</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Lantang Tallang Desa Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Pengiriman transmigran sebanyak 5 KK/27 jiwa</p> <p>4. Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan • Roadshow promosi wisata • Pengiriman duta wisata • Tukar menukar info wisata / event budaya • Tukar menukar duta seni budaya • Pertukaran misi kebudayaan kesenian • Pertukaran info event seni budaya • Temu bisnis dan investor • Gathering investor</p>		
3.15	Adakah program /Kebijakan tata ruang PEL	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1 = ada tetapi tidak efektif
	<p>Pemkot Surakarta sedang merevisi Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (Perda Nomer 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011 -2031). Salah satu revisi yang diusung adalah = Kota Solo akan mengubah tata ruangnya dan melakukan penyesuaian agar pengembangan potensi wilayahnya sinergis dengan kehadiran sarana infrastruktur Tol Trans Jawa yang diprediksi bakal menjadi andalan untuk peningkatan perekonomian daerah. Kawasan Solo Utara akan dikembangkan menjadi kawasan bisnis (Central Business District).</p> <p>Wilayah Solo Utara yang akan ditata adalah kawasan Joglo, Gilingan dan Komplang yang akan dikembangkan sebagai Central Business District (CBD) Solo Barat Laut dan Mojosongo untuk Solo wilayah Solo Timur Laut. Pengembangan CBD, tentu memerlukan dukungan pusat-pusat pelayanan kota seperti pembuatan jalan konektor, jaringan air bersih, sanitasi, sekolah dan rumah sakit.</p> <p>Disamping itu dorongan Surakarta sebagai kota pariwisata karena adanya lembaga baru yang disiapkan untuk mengembangkan pariwisata di kawasan Joglosemar, yakni Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur yang mendapat amanat dari pemerintah untuk mengembangkan destinasi pariwisata di tiga kawasan Jawa Bagian Tengah (Jabagteng), yakni Jogja</p>		
3.16	Adakah program /Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar sentra usaha	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1 = ada tetapi tidak efektif
	<p>Hubungan yang terjadi antar pengusaha batik di Surakarta dengan pengusaha batik di Sragen dan Klaten, pada umumnya adalah hubungan bisnis antar perusahaan. Hal ini dikarenakan Kota Surakarta memiliki keterbatasan sumber daya tetapi memiliki pasar penjualan (batik) yang cukup luas. Sementara itu hubungan bisnis antar sentra usaha belum banyak dikembangkan kecuali hubungan yang bersifat pertukaran informasi sudah dijalin terutama dipelopori Sentra Batik Laweyan dan Sentra Batik Kauman.</p>		

4	Dimensi Keempat = PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN																																																																																																																																									
4.5	Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal	0 = tidak ada 1 = ada	FDG FEDEP 1= ada																																																																																																																																							
	<p>Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Surakarta dapat diukur dari nilai IPM yang semakin naik dan GINI Rasio semakin rendah</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th rowspan="2">IPM</th> <th>AHH</th> <th>EYS</th> <th>MYS</th> <th>Pengeluaran</th> </tr> <tr> <th>Angka Harapan Hidup (tahun)</th> <th>Harapan Lama Sekolah (tahun)</th> <th>Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)</th> <th>Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu/orang/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2010</td><td>77,45</td><td>76,85</td><td>13,17</td><td>9,99</td><td>12.123,32</td></tr> <tr><td>2011</td><td>78,00</td><td>76,89</td><td>13,34</td><td>10,05</td><td>12.464,26</td></tr> <tr><td>2012</td><td>78,44</td><td>76,93</td><td>13,50</td><td>10,11</td><td>12.680,17</td></tr> <tr><td>2013</td><td>78,89</td><td>76,97</td><td>13,64</td><td>10,25</td><td>12.819,73</td></tr> <tr><td>2014</td><td>79,34</td><td>76,99</td><td>13,92</td><td>10,33</td><td>12.907,29</td></tr> <tr><td>2015</td><td>80,14</td><td>77,00</td><td>14,14</td><td>10,36</td><td>13.604,40</td></tr> <tr><td>2016</td><td>80,76</td><td>77,03</td><td>14,50</td><td>10,37</td><td>13.900,00</td></tr> <tr><td>2017</td><td>80,85</td><td>77,06</td><td>14,51</td><td>10,38</td><td>13.986,00</td></tr> <tr><td>2018</td><td>81,46</td><td>77,11</td><td>14,52</td><td>10,53</td><td>14.528,00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kota</th> <th colspan="4">Jumlah penduduk miskin</th> <th colspan="4">Proporsi penduduk miskin</th> </tr> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Semarang</td><td>84.680</td><td>83.600</td><td>80.900</td><td>73.650</td><td>4,98</td><td>4,83</td><td>4,60</td><td>4,12</td></tr> <tr><td>Surakarta</td><td>55.920</td><td>55.900</td><td>54.900</td><td>46.990</td><td>10,92</td><td>10,87</td><td>10,64</td><td>9,07</td></tr> <tr><td>Magelang</td><td>11.000</td><td>10.600</td><td>10.600</td><td>9.590</td><td>9,11</td><td>8,75</td><td>8,73</td><td>7,87</td></tr> <tr><td>Salatiga</td><td>10.790</td><td>9.700</td><td>9.600</td><td>9.240</td><td>5,87</td><td>5,20</td><td>5,08</td><td>4,82</td></tr> <tr><td>Pekalongan</td><td>23.620</td><td>23.700</td><td>22.500</td><td>20.520</td><td>7,97</td><td>7,92</td><td>7,45</td><td>6,74</td></tr> <tr><td>Tegal</td><td>20.940</td><td>20.300</td><td>20.100</td><td>19.440</td><td>8,51</td><td>8,21</td><td>8,10</td><td>7,81</td></tr> </tbody> </table>			Tahun	IPM	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu/orang/tahun)	2010	77,45	76,85	13,17	9,99	12.123,32	2011	78,00	76,89	13,34	10,05	12.464,26	2012	78,44	76,93	13,50	10,11	12.680,17	2013	78,89	76,97	13,64	10,25	12.819,73	2014	79,34	76,99	13,92	10,33	12.907,29	2015	80,14	77,00	14,14	10,36	13.604,40	2016	80,76	77,03	14,50	10,37	13.900,00	2017	80,85	77,06	14,51	10,38	13.986,00	2018	81,46	77,11	14,52	10,53	14.528,00	Kota	Jumlah penduduk miskin				Proporsi penduduk miskin				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Semarang	84.680	83.600	80.900	73.650	4,98	4,83	4,60	4,12	Surakarta	55.920	55.900	54.900	46.990	10,92	10,87	10,64	9,07	Magelang	11.000	10.600	10.600	9.590	9,11	8,75	8,73	7,87	Salatiga	10.790	9.700	9.600	9.240	5,87	5,20	5,08	4,82	Pekalongan	23.620	23.700	22.500	20.520	7,97	7,92	7,45	6,74	Tegal	20.940	20.300	20.100	19.440	8,51	8,21	8,10	7,81
Tahun	IPM	AHH	EYS			MYS	Pengeluaran																																																																																																																																			
		Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu/orang/tahun)																																																																																																																																					
2010	77,45	76,85	13,17	9,99	12.123,32																																																																																																																																					
2011	78,00	76,89	13,34	10,05	12.464,26																																																																																																																																					
2012	78,44	76,93	13,50	10,11	12.680,17																																																																																																																																					
2013	78,89	76,97	13,64	10,25	12.819,73																																																																																																																																					
2014	79,34	76,99	13,92	10,33	12.907,29																																																																																																																																					
2015	80,14	77,00	14,14	10,36	13.604,40																																																																																																																																					
2016	80,76	77,03	14,50	10,37	13.900,00																																																																																																																																					
2017	80,85	77,06	14,51	10,38	13.986,00																																																																																																																																					
2018	81,46	77,11	14,52	10,53	14.528,00																																																																																																																																					
Kota	Jumlah penduduk miskin				Proporsi penduduk miskin																																																																																																																																					
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018																																																																																																																																		
Semarang	84.680	83.600	80.900	73.650	4,98	4,83	4,60	4,12																																																																																																																																		
Surakarta	55.920	55.900	54.900	46.990	10,92	10,87	10,64	9,07																																																																																																																																		
Magelang	11.000	10.600	10.600	9.590	9,11	8,75	8,73	7,87																																																																																																																																		
Salatiga	10.790	9.700	9.600	9.240	5,87	5,20	5,08	4,82																																																																																																																																		
Pekalongan	23.620	23.700	22.500	20.520	7,97	7,92	7,45	6,74																																																																																																																																		
Tegal	20.940	20.300	20.100	19.440	8,51	8,21	8,10	7,81																																																																																																																																		
4.6	PEL mempertimbangkan Keberadaan adat dan kelembagaan lokal	0 = tidak dipertimbangkan 1 = dipertimbangkan	FDG FEDEP 1 = dipertimbangkan																																																																																																																																							
	<p>Dalam penyusunan laporan kinerja PEL, Bappeda selalu bersama FEDEP untuk menyusun rencana perbaikan. Dimana FEDEP terdiri dari perwakilan beberapa organisasi lokal seperti sentra industri, KADIN(Kamar Dagang dan Industri), asosiasi industri tekstil, PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia); ASITA (Asosiation of Indonesian Tours and Travelling Agency), Sedangkan adat lokal adalah nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat. Di dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal mempertimbangkan adat lokal seperti ketika pengembangan sentra Blangkon, sentra permata, sentra batik (Laweyan dan Kauman)</p>																																																																																																																																									
4.7	Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan (a.l.: penerapan amdal)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	Kuesioner pengusaha 1 = ada tetapi tidak efektif																																																																																																																																							
	<p>Dari hasil laporan akhir tahun 2018 disebutkan masalah utama lingkungan di Surakarta adalah=</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tata Guna Lahan 2) Pencemaran Air dan Udara 3) Sampah 4) Kemacetan Lalu lintas 5) Banjir Genangan 																																																																																																																																									

1. Tata guna lahan

Pemerintah Kota Surakarta berupaya dalam penanggulangan isu alih fungsi lahan yaitu dengan Penyusunan dokumen rencana tata ruang, kebijakan bangunan vertikal dalam dokumen rencana tata ruang, peningkatan pengawasan dilakukan terhadap perijinan penggunaan lahan yang sudah dikeluarkan, mengembalikan fungsi lahan dan melakukan penataan agar sesuai dengan peruntukan seperti : penataan pemukiman bantaran sungai dan ruang milik jalan; penataan jalur pedestrian; penataan taman kota; penataan pasar tradisional; penghijauan dan pembangunan RT



Keterangan : A. Taman Balekambang
B. Taman Sekartaji
C. Taman Tirtonadi
D. City Walk Jl. Slamet Riyadi
E. Jalur Hijau Jl Jenderal Soediman
F. Hutan Kota Monumen Banjarsari

2. Pencemaran Air dan Udara

Dalam upaya penanggulangan pencemaran air, Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan berbagai kegiatan :

1) Pelayanan pengelolaan pengolahan limbah domestik rumah tangga melalui sistem onsite-sanitary/ sanitasi di tempat (IPAL Komunal); offsite-sanitary / sanitasi sistem penyaluran limbah rumah tangga menggunakan sistem perpipaan menuju ke tempat pembuangan Air Limbah Akhir (IPAL); Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

2) Melakukan Pemantauan kualitas Air sungai dengan sampling dan analisis di beberapa titik hulu dan hilir sungai yang masuk program Prokasih (Program Kali Bersih); 3) Upaya pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan mewajibkan seluruh usaha industri melaporkan kualitas air limbah dan limbah domestik dalam Laporan UKL-UPL, Sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang – Undang Lingkungan Hidup.



4.8	Program Pengelolaan dan pendaur ulangan limbah (a.l.: produk organik	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1 = ada tetapi tidak efektif
-----	--	--	---

Prioritas ke 3. Sampah
Tindakan yang dilakukan melalui kebijakan program dan kegiatan Pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Surakarta diantaranya adalah : Sosialisasi persampahan oleh DLH; Penyediaan sarana dan prasarana persampahan; Pelaksanaan 3R sampah melalui Bank sampah; grebeg sampah, sekolah adiwiyata, Program Zero TPS/



Pengurangan TPS menjadi RTH atau taman; Pelayanan UPT Persampahan berbasis komunal; Pembenahan dan pengembangan TPA Putri Cempo untuk mendukung pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)



Berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Agustus 2017 No. 660.1/2812 tentang hasil **Penilaian Adipura** Periode 2016-2017 Kota Surakarta mendapat Nilai adipura: 73,33 nilai fisik : 73,06 nilai non fisik (sistem manajemen) : 78,46 nilai rata-rata TPA : 72, 01. Kota Surakarta mendapat penghargaan adipura kategori kota besar tahun 2017



4.9	Kebijakan konservasi sumber daya alam dalam PEL	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP 1 = ada tetapi tidak efektif
<p>Terdapat sembilan sungai di Kota Surakarta antara lain, Bengawan Solo, Kali Anyar, Pepe Hilir, Pelem Wuluh, Kali Gajah Putih, Kali Wingko, Pepe Hulu, dan Kali Jenes. Aliran air sungai yang melalui Kota Surakarta pada akhirnya bermuara di Sungai yang terbesar yaitu Sungai Bengawan Solo. Sementara itu sungai Bengawan Solo ini menjadi tanggung jawab Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bengawan Solo gabungan kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Prov.</p> <p>Program pemkot=</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penataan pemukiman bantaran sungai Pemkot Surakarta bersama Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menyusun rencana aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surakarta. Penanganan kumuh ini melibatkan berbagai instansi Pemkot Surakarta yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, yang terangkum atas: Penataan permukiman ilegal di atas lahan sempadan Sungai Bengawan Solo, Penataan permukiman di atas lahan Hak Pakai 16 (milik pemda), Pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir di permukiman kumuh, dan Peningkatan kualitas infrastruktur yang tersebar di permukiman kumuh Kawasan Semanggi. <div data-bbox="587 981 1091 1352" data-label="Image"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemantauan air sungai= Hasil pemantauan kualitas 6 air sungai di Kota Surakarta menunjukkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Sungai JENES (Tercemar) 2) Sungai PREMULUNG (Tercemar) 3) Sungai BROJO (Tercemar) 4) Sungai PEPE HILIR (Tercemar) 5) Sungai ANYAR (Masuk Kelas III dan IV) 6) Sungai GAJAH PUTIH (Masuk Kelas III dan IV) 3) Upaya pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan mewajibkan seluruh usaha industri melaporkan kualitas air limbah dan limbah domestik dalam Laporan UKL-UPL, Sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang – Undang Lingkungan Hidup 			

5	Dimensi Lima = TATA PEMERINTAHAN		
5.5	Restrukturisasi organisasi pemerintah	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	FDG FEDEP
6.7	Kesesuaian implementasi dengan perencanaan	0 = <25% sejalan 1 = 25%-75% sejalan 2 =>75% sejalan	FDG FEDEP
6.10	Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri (self evaluation)	0 = Tidak pernah dilakukan 1 = dilakukan	FDG FEDEP
6.11	Frekuensi dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan	0 = Tidak pernah dilakukan 1 = dilakukan	FDG FEDEP

Sumber= hasil FGD stakeholder

IV.4. BIDANG EKONOMI KREATIF

Data Ekonomi kreatif yang bisa dikumpulkan berdasarkan hasil kajian BAPPPEDA terhadap ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan tahun 2018. Berdasarkan laporan Kajian budaya ekonomi kreatif tahun 2018 di Lima kecamatan Kota Surakarta jumlah pelaku ekonomi kreatif (seniman, pekerja di bidang seni) dapat dicatat sebagai berikut:

Tabel IV.4. Pelaku dan Perusahaan yang bererak di Ekonomi Kreatif

No	Nama Kelompok Masyarakat	Jumlah personil (orang)	Keterangan
1	Panitia Budaya Kampung / event kelurahan	1020	Pokdarwis per Kelurahan 10 orang dan tim 10 orang, LPMK
2	Pelaku kesenian (Sanggar seni/kriya)	1744	seniman
3	Bergada budaya dari OPD/instansi	80	PDAM, Disparta, Satpol PP, Disdag, DLH (masing-masing satu pleton/16)
4	Wayang Orang Sriwedari	74	Seniman
5	SMK N 8 Kota Surakarta	20	Pengajar
6	ISI (Institut Seni Indonesia)	35	Pengajar
7	ASGA (Akademi Seni Mangkunegaran)	15	Pengajar
8	Kethoprak Balekambang	25	Seniman
9	Kethoprak Seniman Muda	30	Seniman
10	Sanggar Wayang Gogon	10	Seniman
11	Sanggar Guyub Ruku	25	Seniman

Sumber= Kajian budaya ekonomi kreatif tahun 2018

Berdasarkan data Surakarta dalam angka tahun dari tahun 2017 s/d 2019, jumlah Perusahaan, serapan tenaga kerja dan investasi perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi kreatif sebagai berikut:

Tabel IV.5. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Investasi Tahun 2016-2018

	2016	2017	2018
Jumlah perusahaan (unit)	497	164	164
Jumlah tenaga kerja (orang)	497	990	497
Investasi (Rp. Juta)	0	5.987,48	0

Keterangan= sumber Surakarta dalam angka tahun 2017, 2018 dan 2019

Tabel IV.6. Jumlah pelaku perusahaan berdasarkan subsektor ekonomi kreatif

No	Subsektor ekonomi kreatif	Jumlah usaha /perusahaan
1	Arsitektur	31
2	Desain interior	13
3	Desain komunikasi visual	12
4	Desain produk	67
5	Film, animasi, video	14
6	fotografi	162
7	Kriya (tekstil)	3.334
8	Kuliner	22.060
9	Musik	112
10	Fashion	7.534
11	Aplikasi dan game developer	71
12	Penerbitan	890
13	Periklanan	53
14	TV dan radio	20
15	Seni pertunjukan	76
16	Seni rupa	250
	total	34.699

Sumber data dari laporan ekonomi kreatif tahun 2016 (bekraf)

Tabel IV.7. Jumlah Sanggar di Kota Surakarta

Keterangan	Banjarsari	Jebres	Laweyan	PasarKliwon	Serengan
Sanggar kerawitan	9	10	9	8	4
Sanggar Hadrah	10	10	13	10	7
Sanggar Santiswara dan laras madya	4	3	2	2	2
Sanggar keroncong	17	21	9	13	3
Sanggar campursari	2	2	0	0	0
Sanggar Tari	13	8	9	8	0
Sanggar Pedalangan	1	4	3	0	1
Sanggar wayang Orang	3	0	1	1	1
Sanggar ketroprak	2	0	0	0	0
Sanggar reog	3	5	3	4	0

Sumber = laporan kajian pelestarian budaya tak benda Kota Surakarta 2017

Tabel IV.8. Museum di Kota Surakarta

No	Nama Museum	Alamat	Keterangan
1	Museum Radya Pustaka		pada awalnya adalah tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Tetapi saat ini terdapat berbagai macam benda sejarah dan benda budaya
2	Museum Batik Danar Hadi	Jl Slamet Riyadi, No. 261. Sriwedari, Laweyan, Surakarta,5714	museum yang menyajikan keragaman kriya batik (Batik Kraton, Batik Belanda, Batik Hokokai, Batik Sudagaran, Batik Indonesia, hingga Batik Cina) serta perkembangan batik yang menjadi identitas kebanggaan bangsa Indonesi
3	Museum Keris Nusantara	Jalan Bhayangkara No. 2, Sriwedari, Solo	menyimpan ratusan koleksi senjata tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan mayoritas koleksinya berasal dari tanah Jawa, maka dinamakan Museum Keris karena senjata khas tanah Jawa adalah keris
4	Museum Keraton Kasunanan Hadiningra	Baluwarti, Pasar Kliwon, Surakarta City, Central Java 57144	Keraton Kasunanan Hadiningra Solo saat ini juga sebagai Museum. Di sisi kita bisa melihat berbagai macam koleksi benda-benda keraton, serta benda-benda yang mengandung unsur budaya Jawa
5	Lokananta	Jl. A. Yani No.379 A, Kerten, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57143	perusahaan rekaman pertama yang ada di Indonesia yang saat ini masih aktif tempat rekaman dan sekaligus sebagai museum, dengan koleksi beraneka rupa alat-alat rekaman lama, serta berbagai kaset piringan hitam dari para musisi kawakan Indonesia seperti Waljinah ataupun Manthos
6	Museum Seni Rupa Dullah	Jl. Dr. Sutomo, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta	Dipajang berbagai karya Seni Rupa

Sumber= Kajian budaya ekonomi kreatif tahun 2018

BAB V

ANALISIS KINERJA EKONOMI KOTA SURAKARTA

Beberapa isu utama yang akan dibahas pada laporan kinerja PEL Kota Surakarta tahun 2019 ini adalah

1. Isu pertumbuhan ekonomi dan investasi
2. Isu kemiskinan dan pengangguran
3. Isu ekonomi kreatif dan pariwisata
4. Isu sektor unggulan
5. Analisis PEL dari Hasil Kuesioner Stakeholder

V.1. ISU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI

Esensi dari pembangunan ekonomi suatu wilayah (daerah) ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalamnya. Beberapa peneliti mendefinisikan Pembangunan Ekonomi sebagai suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pemerintah daerah disamping memfokuskan pada pencapaian jangka panjang (peningkatan pendapatan penduduk) juga dituntut dengan efisiensi tata kelola pemerintahan dan menyediakan sarana prasarana (infrastruktur) yang memadai agar organisasi (perusahaan) ekonomi dapat terus tumbuh dan memiliki daya saing.

Pembangunan suatu daerah harus selalu dipantau dan dilakukan perbaikan sistem ekonomi di dalamnya. Untuk maksud tersebut, maka Pemda membutuhkan indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi di daerahnya. Manfaat utama adanya indikator ekonomi adalah dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah sejenis dan mengetahui pola (program) pembangunan suatu daerah apakah dikatakan berhasil untuk mengatasi suatu masalah. Pemda dapat mencontoh program daerah lain yang telah terbukti meningkatkan indikator ekonomi lebih baik.

Terdapat berbagai metode yang sering digunakan untuk melihat kemajuan atau kinerja ekonomi suatu daerah / Kota, metode yang paling umum digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi (laju Pertumbuhan PDRB). Analisis indikator laju pertumbuhan ekonomi ini, masih belum cukup untuk menggambarkan kemajuan suatu daerah, harus juga ditambahkan dengan indikator lain seperti indikator pertumbuhan output per pekerja atau pertumbuhan output per kapita (Todaro, Smith, 2006), rasio PAD dengan PDRB dan tingkat pemerataan pendapatan penduduk (tingkat kemiskinan).

Indikator laju pertumbuhan PDRB digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Indikator kedua adalah Pertumbuhan output produksi per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan PDRB per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.

V.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi atau PDRB digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih real terkait pengaruh wilayah terhadap ekonomi suatu daerah, maka laju pertumbuhan dapat dibandingkan dengan daerah sejenis (dalam hal ini kota) untuk dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi. Berikut ini data BPS Prov Jateng yang menunjukkan nilai output (PDRB) dan indikator pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB).

Tabel V.1. Perbandingan PDRB Beberapa Kota di Jateng
(Atas Dasar Harga pada Harga Konstan)

Kota	2015	2016	2017	2018
Semarang	109.110.689,61	115.542.560,57	123.107.015,15	131.137.259,65
Surakarta	28.453.493,87	29.975.873,01	31.685.480,46	33.506.170,40
Magelang	5.247.341,27	5.521.525,54	5.820.532,00	6.145.869,75
Salatiga	7.759.181,62	8.168.241,90	8.629.396,45	9.104.841,00
Pekalongan	6.043.095,73	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58
Tegal	8.953.879,56	9.445.030,96	10.006.893,00	10.599.407,23

Sumber= PDRB Jateng 2014-2018 (BPS, 2019)

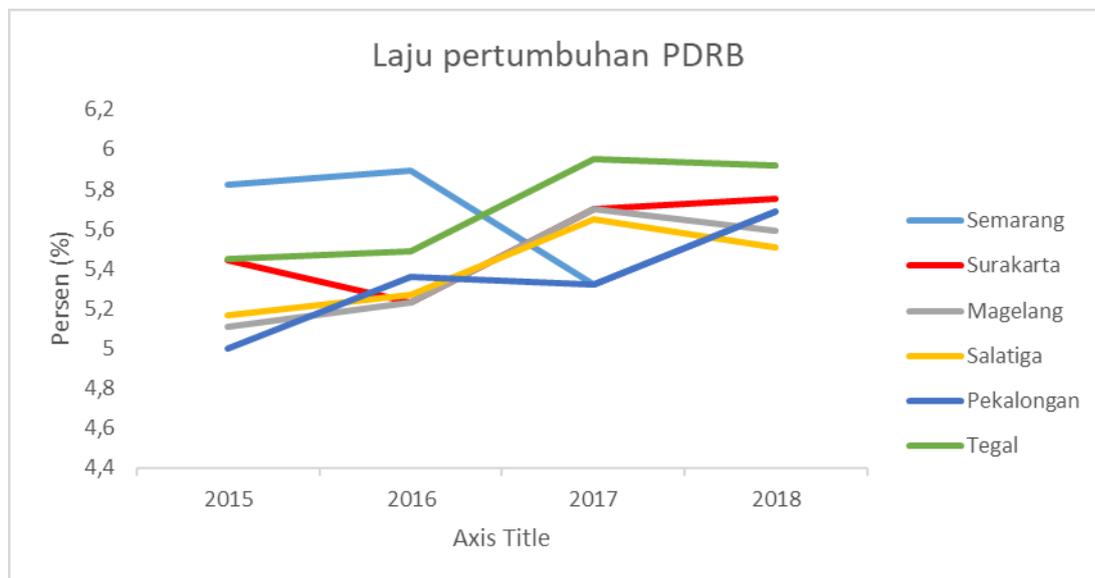
Total nilai PDRB belum menunjukan kinerja yang ekonomi sesungguhnya, karena nilai ini hanya menunjukkan besarnya kapasitas output ekonomi atau kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan nilai tambah output ekonomi. Ketika membandingkan PDRB suatu daerah dengan daerah yang lain tidak bisa membandingkan langsung nilai output atau PDRB yang diperoleh. Diperlukan instrumen atau indikator lain yaitu laju pertumbuhan ekonomi (PDRB), dimana laju pertumbuhan ini menunjukkan kecepatan peningkatan kapasitas masing-masing daerah atau kota.

Tabel V.2. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut kota

No	Kota	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Semarang	5,82	5,89	5,32	5,69	5,68
2	Surakarta	5,44	5,23	5,70	5,75	5,53
3	Magelang	5,11	5,23	5,70	5,59	5,41
4	Salatiga	5,17	5,27	5,65	5,51	5,40
5	Pekalongan	5	5,36	5,32	5,69	5,34
6	Tegal	5,45	5,49	5,95	5,92	5,70

Sumber= PDRB Jateng 2014-2018 (BPS, 2019)

Dari perbandingan nilai laju pertumbuhan PDRB dari 6 kota di Jawa Tengah, terlihat bahwa pertumbuhan kapasitas produksi di Kota Tegal adalah yang tertinggi dengan rata-rata 5,7% artinya terjadi peningkatan investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi terjadi di Kota Tegal. Selanjutnya adalah Kota Semarang dengan rata-rata pertumbuhan 5,68% dan Kota Surakarta mengalami rata-rata pertumbuhan 5,53%.



Gambar V.1. Perbandingan laju pertumbuhan PDRB beberapa kota di Prov Jateng

(Sumber= Data Diolah dari PDRB Jateng 2014-2018 (BPS, 2019))

V.1.2 Laju Pertumbuhan Output (PDRB) per kapita

Indikator ekonomi berikutnya yang penting untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi per kapita. Laju pertumbuhan ekonomi harus dilihat sebagai kenaikan output per kapita. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, pertumbuhan output atau hasil produksi karena peningkatan kapasitas produksi harus dihubungkan dengan perubahan jumlah penduduk. Berikut ini data PDRB/penduduk atau Output/kapita beberapa kota di Prov Jawa Tengah.

Tabel V.3. PDRB/penduduk atau Output/kapita (juta/orang)

Kota	2015	2016	2017	2018
Semarang	64,14	66,82	70,04	73,42
Surakarta	55,55	58,30	61,39	64,70
Magelang	43,44	45,59	47,92	50,43
Salatiga	42,21	43,82	45,68	47,53
Pekalongan	20,39	21,28	22,22	23,28
Tegal	36,38	38,21	40,34	42,57

Sumber= Jateng dalam Angka (BPS, 2019)

Dari tabel ini terlihat bahwa penduduk di kota Semarang memiliki tingkat pendapatan yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Pada tahun 2018 nilai output / penduduk Semarang sebesar 73,42 juta/ tahun setiap orang, sedangkan nomer kedua adalah penduduk kota Surakarta sebesar 64,7 juta/ tahun per orang. Nilai indikator ini bisa bias sebagian besar penduduk yang bekerja di Semarang dan Surakarta memiliki tempat tinggal di luar kota. Dengan kata lain sebagian besar di kedua penduduk adalah penduduk daerah lain tetapi bekerja dan menghasilkan nilai tambah di kota Semarang atau Kota Surakarta.

Untuk melihat perubahan tingkat kesejahteraan data Output/kapita dapat diubah menjadi laju perubahan Output per kapita. Data laju tersebut sebagai berikut:

Tabel V.4. Laju pertumbuhan Output (PDRB) per kapita

Kota	2016	2017	2018	Rata-rata
Semarang	4,18	4,81	4,83	4,61
Surakarta	4,95	5,31	5,38	5,21
Magelang	4,95	5,10	5,24	5,10
Salatiga	3,80	4,24	4,05	4,03
Pekalongan	4,37	4,40	4,79	4,52
Tegal	5,02	5,57	5,53	5,38

Sumber= Data diolah dari PDRB dan Jateng dalam Angka (BPS, 2019)

Seperti yang telah dijelaskan diawal, laju pertumbuhan PDRB per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi. Maka dari dua tabel di atas terlihat bahwa meskipun rata-rata pendapatan perkapita penduduk Semarang lebih tinggi, tetapi jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi perkapita setiap tahun Kota Surakarta dan Tegal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota Semarang. Ini artinya peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Tegal jauh lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah dan kota Surakarta berada nomer dua setelah Tegal.

V.1.3. Analisis investasi

Seperti dijelaskan pada model pembangunan ekonomi, indikator investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah seperti kota

Surakarta. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, kinerja investasi kota Surakarta diperkirakan mengalami pertumbuhan karena ditopang beberapa proyek pemerintah seperti selesainya pembangunan Tol Trans Jawa, pengembangan Stasiun Bandara Adi Soemarmo, Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo, KRL Solo-Yogyakarta dan pembangunan berbagai infrastruktur jalan dan taman di Kota Surakarta. Data ini diperkuat dengan peningkatan nilai PDRB Jasa Konstruksi berkontribusi dari Rp. 8,27 trilyun tahun 2017 menjadi Rp. 8,69 trilyun pada tahun 2018 atau naik 5,07% pada PDRB harga konstan tahun 2010. Kenaikan nilai tambah ini sejalan dengan kenaikan penambahan barang modal bruto yang mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Berikut ini tabel pertumbuhan modal tetap bruto yang diduga lebih banyak ditopang oleh maraknya pembangunan infrastruktur

Tabel V.5 Pembentukan modal tetap bruto

Tahun	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) harga berlaku (Rp. Milyar)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) harga Tetap (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)
2013	19.304,89	16.433,29	5,01
2014	21.657,23	17.391,05	5,83
2015	23.395,14	18.293,62	5,19
2016	25.547,16	19.387,62	5,98
2017	27.316,20	20.671,44	6,62
2018	31.167,73	22.507,26	8,88

Sumber= PDRB Kota Surakarta 2014-2018

Kenaikan investasi konstruksi ini tidak diimbangi oleh kenaikan belanja modal (pembelian mesin / peralatan produksi) dan konsumsi bahan baku industri. Hal ini dapat dilihat dari menurun karena nilai investasi dalam bentuk inventori dari tahun 2013 terus mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 terjadi kenaikan investasi mesin/peralatan karena adanya kenaikan nilai inventori (bahan baku dan bahan setengah jadi). Pada laporan PDRB menurut pengeluaran, investasi dicatat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dimana aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventory. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak dan barang modal lainnya

Tabel V.6. Perubahan inventory (persediaan bahan baku untuk produksi/dijual)

Tahun	Pembentukan inventori berlaku (Rp. Milyar)	Pembentukan inventori tetap (Rp. Milyar)	Pertumbuhan (%)
2013	1.225,05	661,22	-40,33
2014	815,58	575,59	-12,95
2015	221,41	107,47	-81,33
2016	87,85	118,90	10,64
2017	142,55	120,66	1,48
2018	313,37	122,20	1,28

Sumber= Data Diolah dari PDRB Kota Surakarta 2014-2018

Data lain juga menunjukkan terjadi penurunan peranan usaha (industri) kecil, menengah dan besar pada ekonomi Kota Surakarta

Tabel V.7. Nilai Investasi usaha kecil, menengah dan besar Kota Surakarta

Jenis Usaha	2016	2017	Pertumbuhan
Usaha mikro	13.045.071.557	5.097.750.004	-61
Usaha kecil	132.813.567.011	68.689.860.728	-48
Usaha menengah	291.806.605.494	161.687.939.158	-45
Usaha besar	4.785.443.330.431	2.474.834.580.898	-48
total	5.223.108.574.493	2.710.310.130.788	-48

Sumber = Data diolah dari Surakarta dalam Angka

Dari data investasi, Kota Surakarta mengalami penurunan signifikan (minus 48%). Sementara itu nilai kontribusi jasa konstruksi yang mencerminkan pembangunan fisik bangunan setiap tahun meningkat. Kondisi ini diduga karena pembangunan fisik masih didominasi pada pembangunan yang dikelola oleh anggaran dari negara, sementara kondisi ekonomi mengalami perlambatan permintaan akan barang dan jasa di kota Surakarta, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor-sektor yang banyak menyerap investasi seperti industri kecil, menengah dan industri besar. Penurunan pembelian mesin dan peralatan lebih dikarenakan permintaan akan produk yang ditawarkan menurun atau yang perlu dikhawatirkan adalah penurunan investasi ini menjadi tanda awal penurunan kemampuan daya saing (kemampuan bersaing produk dan jasa yang dihasilkan berbagai usaha di Surakarta) dibandingkan dengan produk dan jasa dari daerah lain atau negara lain.

Dari hasil FGD dengan stakeholder FEDEP, diperoleh beberapa usulan untuk peningkatan nilai investasi UKM dan IKM di Kota Surakarta, yaitu dengan pengoptimalan peranan sentra sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif dengan luas 5000 m² yang berada di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon. Karena pada awalnya tujuan pengembangan sentra ini adalah menjadi salah satu pusat pengembangan industri kreatif. Tahun 2019 ini sentra semanggi telah memproduksi (kain batik cap) dan menjadi pusat pembelajaran bagi pengunjung yang

datang ke sentra. Sarana produksi di sentra tersebut cukup memadai untuk produksi (saat ini masih diutamakan batik cap, pewarnaan dan pengemasan. Hasil produksi (kain batik) selanjutnya dikirim ke tukang jahit (konveksi) untuk dijadikan aneka produk pakaian jadi anak-anak, remaja, orang tua dan ibu / wanita karier. Produk kain batik ini selanjutnya dititipkan di beberapa showber seperti di Kauman dan beberapa toko batik di Laweyan



Gambar V.2. Kegiatan produksi di sentra industri kreatif (batik) Semanggi

Berikut ini hasil kuesioner Indikator PEL terkait dengan investasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.8 Hasil kuesioner Indikator PEL terkait dengan investasi

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
1	Dimensi pertama= pelaku Usaha				
1.1	Informasi prospek bisnis (buku/booklet/leaflet peluang investasi, official web site)	0 = tidak tersedia 1 = tersedia tetapi kurang informatif/lengkap/tidak mutakhir 2 = tersedia dan informatif, lengkap dan mutakhir	2	0	1
1.2	Kampanye peluang usaha melalui ; 1. Media massa (media cetak, elektronik, web site) 2. Kegiatan interaktif (temu usaha/pameran /seminar potensi daerah).	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	2

Tabel V.8 Hasil kuesioner Indikator PEL terkait dengan investasi (lanjutan)

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
1.3	Pusat pelayanan investasi dengan Jasa layanan konsultasi investasi	0 = tidak tersedia 1 = tersedia namun layanan tidak memadai 2 = tersedia dan layanan memadai	2	0	0
1.6	Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru	0= tidak ada 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	2	0	1
1.7	Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru	0 = Lebih dari 12 hari 1 = 10 – 12 hari (standard SPM) 2 = Kurang dari 10 hari	2	0	1
2	Dimensi Kedua= Faktor Lokasi				
2.1	Aksesibilitas dari dan ke lokasi Pabrik/Toko ibu / bapak beraktivitas	0 = buruk 1 = sedang 2 = mantap	2	0	2
2.2	Sarana transportasi (angkot / bus trans solo)	0 = tidak tersedia 1 = tersedia namun tidak memadai 2 = tersedia dengan kualitas baik	2	0	2
2.3	Ketersediaan air bersih	0 = tidak tersedia 1 = tersedia kualitas rendah 2 = tersedia kualitas baik	2	0	2
2	Dimensi Kedua= Faktor Lokasi				
2.4	Tenaga kerja terampil	0 = tidak tersedia 1 = tersedia terbatas 2 = tersedia mencukupi	2	0	2
2.5	Etos kerja SDM	0= SDM lokal tidak terbiasa berusaha/ bekerja pada kegiatan komoditi yang diunggulkan 1=SDM sudah terbiasa berusaha/ bekerja pada kegiatan komoditi yang diunggulkan	1	0	1

Sumber= hasil kuesioner stakeholder PEL

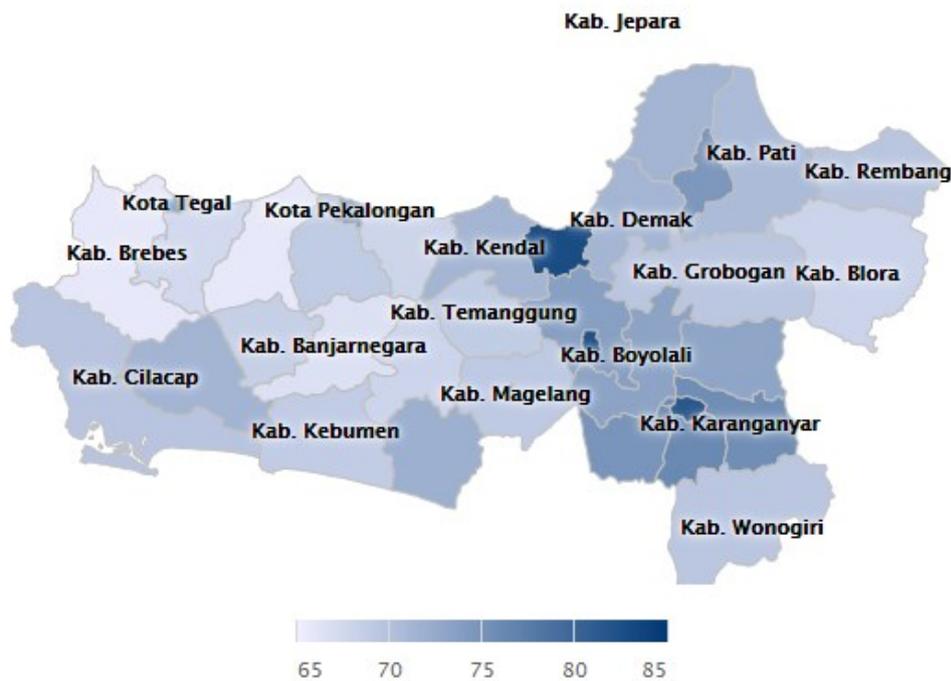
V.2. ISU KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Dua isu sentral masalah pembangunan yang masih menghantui penduduk Kota Surakarta adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara teori kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan. Sementara itu kemiskinan sendiri akan memberikan dampak pada terhadap akses terhadap pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia.

Pemerintah dalam menghitung daya beli penduduk, menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari modul Susenas, dihitung dari level provinsi

hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Berikut ini

Dari peta IPM Prov. Jawa Tengah tahun 2018, ada tiga kota yang memiliki nilai IPM yang tinggi (di atas 80) yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Salatiga. Peta ini dapat dilihat sebagai berikut=



Gambar V.3. Peta Tingkat IPM berbagai daerah dan kota di Jawa Tengah

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Ada pembaruan metode perhitungan IPM dengan berbagai pertimbangan. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Seperti Angka Melek Huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Berikutnya, indikator PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan lain adalah penggunaan rumus rata-rata aritmatik

dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Tabel V.9. Indeks IPM Kota Surakarta

Tahun	IPM	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran
		Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita (Rp. Ribu/orang/tahun)
2010	77,45	76,85	13,17	9,99	12.123,32
2011	78,00	76,89	13,34	10,05	12.464,26
2012	78,44	76,93	13,50	10,11	12.680,17
2013	78,89	76,97	13,64	10,25	12.819,73
2014	79,34	76,99	13,92	10,33	12.907,29
2015	80,14	77,00	14,14	10,36	13.604,40
2016	80,76	77,03	14,50	10,37	13.900,00
2017	80,85	77,06	14,51	10,38	13.986,00
2018	81,46	77,11	14,52	10,53	14.528,00

Sebenarnya nilai IPM ini cukup baik untuk menunjukkan perkembangan pembangunan manusia di suatu daerah, tetapi karena ini adalah data makro (dimana orang kaya dapat menutupi pendapatan penduduk miskin) maka erlu dilengkapi dengan data yang lebih akurat terkait dengan tingkat kemiskinan kota, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel V.10. Jumlah penduduk miskin dan proporsi penduduk miskin terhadap total penduduk suatu daerah.

Kota	Jumlah penduduk miskin				Proporsi penduduk miskin			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Semarang	84.680	83.600	80.900	73.650	4,98	4,83	4,60	4,12
Surakarta	55.920	55.900	54.900	46.990	10,92	10,87	10,64	9,08
Magelang	11.000	10.600	10.600	9.590	9,11	8,75	8,73	7,87
Salatiga	10.790	9.700	9.600	9.240	5,87	5,20	5,08	4,82
Pekalongan	23.620	23.700	22.500	20.520	7,97	7,92	7,45	6,74
Tegal	20.940	20.300	20.100	19.440	8,51	8,21	8,10	7,81

Sumber= Jawa Tengah Dalam Angka

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin kota Surakarta nomor dua setelah Kota Semarang, tetapi jika dibandingkan dengan total penduduk yang ada di kota tersebut, proporsi penduduk miskin terbanyak ada pada kota Surakarta dibandingkan dengan kota-kota lain di Prov Jateng. Bahkan jika dibandingkan proporsi penduduk miskin Kota Surakarta dibandingkan dengan kota Semarang, maka proporsi penduduk miskin di Surakarta hampir dua kali lipat dari pada di Semarang. Ini menandakan bahwa program perbaikan ekonomi penduduk miskin harus menjadi hal yang serius untuk diperbaiki. Jebakan ketidakmampuan penduduk miskin untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan sebagai akar segala ketakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia dan isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam *Millenium Development Goals atau MDGs* (UNDP, 2003).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Artinya penduduk miskin tidak memiliki kemampuan untuk membayar untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar terkait pangan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan pada umumnya disebabkan karena rendahnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Jadi akar masalah utama adalah :

1. Kualitas sumberdaya manusia (tingkat pendidikan) yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.
2. Rendahnya akses dalam mendapatkan modal kerja (IKM)
3. Derasnya penduduk urban (luar kota Surakarta) dalam kehidupan ekonomi kota yang mampu menyaingi (menyingkirkan) tenaga kerja asli penduduk kota. Sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi jasa dan industri yang tinggi tidak mampu menyerap tenaga kerja penduduk miskin perkotaan tetapi malah mengundang penduduk urban dari daerah lain.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah coba dilakukan oleh Pemkot Surakarta. melalui dari data (E-SIK) lalu membuat program partisipatif untuk mengentaskan kemiskinan=

1. Pemkot telah membangun Sistem informasi Data tunggal tersebut dibangun melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) dan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK) guna mempercepat program penanggulangan kemiskinan daerah. TPKK akan melakukan pendataan, mem-validasi warga miskin di tiap kelurahan. TPKK ini juga berkoordinasi di bawah Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Jawa Tengah. Terdapat lima Kelurahan yang ditetapkan sebagai proyek awal TPKK yakni Kadipiro, Mojosongo, Tipes, Pajang dan Semanggi
2. TPKK akan melakukan Kunjungan ke rumah penduduk miskin. Sesudah mereka mendapat kepastian bahwa keluarga yang bersangkutan benar-benar miskin, data itu ditempel di kantor kelurahan untuk kemudian diuji publik. Masyarakat berhak menyampaikan masukan atau mengusulkan data baru. Pemkot berharap data ini bisa *clear* tahun ini, agar bisa berjuang ke pemerintah pusat untuk membenarkan data sehingga penerima intervensi bantuan sosial pusat dan daerah bisa tepat sasaran.

Selain mengembangkan sistem E-SIK, Pemkot juga menjalankan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta merujuk pada Perpres No. 15 Tahun 2010, memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan).
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disalurkan melalui BPJS kesehatan. Dari kajian Nurul Widiastuti (2018) menggunakan metode yuridis empiris (wawancara) atas pengguna JKN di Kota Surakarta tahun 2018, menunjukkan bahwa implementasi Program JKN pada BPJS Kesehatan terhadap masyarakat pengguna, telah diupayakan dengan maksimal oleh Pihak Pemerintah dengan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, namun butuh proses dan waktu untuk mewujudkan keseluruhan masyarakat terjamin dalam Program BPJS Kesehatan. Program ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan dan sangat baik, yaitu mencapai 96,60% keanggotaannya. Kendala yang menghambat pelaksanaan Program JKN antara lain masyarakat tidak datang saat adanya sosialisasi, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sudah meninggal, tapi tidak ada laporan kematian sehingga data tidak *update*, peserta JKN terutama peserta PBI merasa dikesampingkan dalam mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan dan terbatas sumber daya manusia pada BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Surakarta untuk pertama kalinya membagikan kartu Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), Jumat (16/11/2018). Kartu BPMKS nantinya digunakan untuk mencairkan dana bantuan dengan cara digunakan belanja kebutuhan pendidikan di toko mitra. Penyerahan secara simbolis diberikan ke 1.500 pelajar segala jenjang dari 11 sekolah di Solo pada tahun 2018. Target BPMKS akan diberikan ke 9.894 siswa SD, 5.935 siswa SMP, dan 4.469 siswa SMA/SMK serta PLB. "Kartu ini baru bisa digunakan pada 21 November 2018 sampai batas waktu 10 Desember 2018 di 15 toko mitra. Toko mitra yang menjual kebutuhan pendidikan tersebut tersebar di 5 kecamatan di Solo.

<https://solo.tribunnews.com/2018/11/16/pertama-kali-pemkot-solo-bagikan-bantuan-pendidikan-untuk-siswa-secara-non-tunai.>)

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Surakarta terus berupaya mewujudkan Kota Cerdas Pangan melalui pengolahan pangan mandiri meski lahan yang dimiliki terbatas. Kegiatan-kegiatan budidaya atau pengolahan pangan secara mandiri tersebut diperkuat sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan pemberdayaan

Kelompok Wanita Tani (KWT). Saat ini sudah terbentuk sekitar 26 KWT, seperti Komunitas Tani Mulyo Solo di Nusukan Banjarsari, dan KWT Srikandi Kampung Kerten. KWT ini akan terus berupaya memproduksi serta mengolah pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan seadanya untuk ditanami sayuran, buah, dan rempah-rempah, juga dengan membuat kolam untuk budidaya ikan atau ternak ayam. Program KRPL tahun 2018 didukung oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN untuk pengadaan kebun benih di 5 titik di Kota Surakarta, dimana masing-masing titik menghabiskan dana APBN sebesar Rp 50 juta.

Untuk UMKM, Pemkot Surakarta telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema subsidi bunga 7 persen melalui 41 penyalur dan 11 perusahaan penjamin. Selanjutnya, pembiayaan ultra mikro dengan maksimal Rp 10 juta per nasabah dengan bunga 2-4 persen dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terakhir, melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan meningkatkan layanan dan pendampingan usaha masyarakat. Intervensi yang dilakukan pemerintah, yang diharapkan dapat mendukung pengurangan angka kemiskinan kota.

Selain pembinaan kelompok tani wanita dan pemberian kredit bagi UMKM, Pemkot Surakarta juga melakukan penataan pemukiman kumuh. Pemkot Surakarta bersama Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menyusun rencana aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Surakarta. Penanganan kumuh ini melibatkan berbagai instansi Pemkot Surakarta yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, yang terangkum atas: Penataan permukiman ilegal di atas lahan sempadan Sungai Bengawan Solo, Penataan permukiman di atas lahan Hak Pakai 16 (milik pemda), Pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir di permukiman kumuh, dan Peningkatan kualitas infrastruktur yang tersebar di permukiman kumuh Kawasan Semanggi.



Gambar V.4. Rencana penataan pemukiman kumuh di RW 33 Semanggi

Kota Surakarta telah memiliki dua pusat pelatihan tenaga kerja yang profesional yaitu AK Tekstil Surakarta dan *Solo Techno-Park*. Namun sayang kedua pusat pelatihan tenaga

profesional ini belum banyak dimanfaatkan oleh penduduk miskin penduduk Kota Surakarta dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan dari FDG beberapa OPD yang terkait, banyak penduduk miskin Kota Surakarta tidak memiliki minat yang besar untuk mengikuti berbagai program pelatihan di kedua pusat pelatihan dengan alasan:

- Ketidadaan biaya transportasi dari rumah ke tempat magang
- Meskipun setelah lulus akan disalurkan ke tempat kerja, tetapi banyak anak penduduk miskin yang kurang berminat untuk bekerja di pabrik (tekstil).

Tabel V.11 Analisis Hasil Kuesioner terhadap Isu kemiskinan dan tenaga kerja Kota

	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
1.4	Upaya Fasilitasi permodalan bagi dunia usaha oleh Pemda	0 = tidak ada 1 = Ada	1	0	0
1.5	Promosi produk UKM untuk memperluas pasar oleh pemda	0 = tidak ada 1 = Ada	1	0	1
1.6	Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru	0= tidak ada 1= ada namun terbatas 2= ada dan memadai	2	0	1
1.7	Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru	0 = Lebih dari 12 hari 1 = 10 – 12 hari (standard SPM) 2 = Kurang dari 10 hari	2	0	1
3.1	Adakah program / Kebijakan pemberdayaan UKM (a.l; kemitraan dan subkontrak)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
3.2	Adakah program / Kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
3.3	Adakah program / Kebijakan informasi bursa tenaga kerja	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
3.4	Adakah program / Kebijakan Pengembangan keahlian (peningkatan keterampilan)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
	Indikator penilaian PEL	Skala pengukuran	Baik	Buruk	Nilai
3.5	Adakah program / Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan dunia usaha (memanfaatkan dana CSR)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1

Sumber= Hasil survei PEL 2019

V.3. ISU EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA

Kota Surakarta memiliki delapan destinasi objek wisata yang menjadi unggulan, yaitu Museum Keris, Museum Radya Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, Pertunjukan Wayang Orang, Pura Mangkunegaran, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, TSTJ, dan Taman Balekambang. Secara keseluruhan realisasi jumlah wisatawan tahun lalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Surakarta mencatat jumlah wisatawan di tahun 2016 mencapai 4.395.550 wisatawan. Angka ini juga kembali meningkat jika dibandingkan dengan realisasi jumlah wisatawan di tahun 2015 yang mencapai 4.142.785 wisatawan. Pada 2016

ada 4.395.550 pengunjung yang terbagi 33.682 pengunjung mancanegara dan 4.361.868 pengunjung domestik. Sedangkan di 2017, terdapat 4.503.245 pengunjung yang terbagi 34.423 pengunjung mancanegara dan 4.468.822 pengunjung domestik.

Tabel V.12 Jumlah Kunjungan wisata asing dan domestik di Kota Surakarta

Tahun	Jumlah wisawatandi Kota Surakarta		
	Asing	Domestik	Total
2011	49.791	2.489.497	2.539.288
2012	38.261	3.030.840	3.069.101
2013	36.777	3.338.203	3.374.980
2014	44.936	4.187.207	4.232.143
2015	36.546	4.106.239	4.142.785
2016	33.682	4.361.868	4.395.550
2017	34.423	4.468.822	4.503.245
2018 *)	22.512	3.406.507	3.429.019

*) Data Dinas Pariwisata hingga Oktober 2018 (target kunjungan wisata 38.000 wisman)

Meskipun jumlah total kunjungan wisata terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi yang cukup memprihatinkan adalah jumlah kunjungan wisata manca negara yang terus mengalami penurunan kunjungan wisata ke kota Surakarta. Jika dilihat dari jumlah objek yang dikunjungi pada tabel 5.13 berikut ini:

Tabel V.13 Kunjungan wisata asing ke objek wisata di Surakarta

No	Objek wisata utama	Wisata Manca negara (asing)		
		2016	2017	2018
1	Kraton Kasunanan	522	-	310
2	Kraton Mangkunegaran	11.398	8.629	7.691
3	Musium Radya Pustaka	727	600	478
4	Taman Balekambang	1.544	739	399
5	WO Sriwedari	163	-	-
6	THR Sriwedari	48	26	-
7	Musium Batik Danarhadi	1.899	2.132	2.954
8	Taman Satwataru	-	-	-
9	Musium Keris	-	53	279

Jumlah kunjungan turis nusantara justru setiap tahun mengalami kenaikan. Objek favorit yang menjadi tujuan wisata nusantara adalah objek wisata Balekambang dan taman Satwataru. Berikut ini jumlah kunjungan wisata nusantara di beberapa objek wisata di Kota Surakarta.

Tabel V.14 Kunjungan wisata Nusantara ke objek wisata di Surakarta

No	Objek wisata utama	Wisata Nusantara		
		2016	2017	2018
1	Kraton kasunanan	79.741	-	2.710
2	Kraton Mangkunegaran	12.036	23.454	26.559
3	Musium Radya Pustaka	19.400	19.234	17.850
4	Taman Balekambang	2.173.767	2.364.617	2.601.257
5	WO Sriwedari	32.085	40.814	38.114
6	THR Sriwedari	279.976	188.428	-
7	Musium Batik Danarhadi	12.597	12.419	11.324
8	Taman Satwataru	332.503	403.239	534.692
9	Musium Keris	-	5.213	8.274

Kenaikan kunjungan wisata nusantara ke sejumlah objek wisata lokal seperti Taman Balekambang, Taman Satwataru dan Keraton Mangkunegara tidak terlepas dari adanya akses jalan Tol Trans Jawa yang telah terhubung sejak tahun 2018. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Bidang Humas dan Promosi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sistho A Sreshtho, menyatakan dampak positif jalan tol bagi bisnis perhotelan di Surakarta dan sekitarnya sangat positif karena dapat menarik tamu-tamu berkunjung ke Kota Surakarta dan tingkat okupansi atau tingkat keterisian kamar di hotel Surakarta pada empat bulan awal 2019 merangkak naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu (TribunSolo.com, Rabu, 15/5/2019). Nilai okupansi awal empat bulan awal 2019, hotel di Surakarta berkisar pada angka 59 %. Dan data ini menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu (2018) yakni sebesar 54 %. Sementara itu Jalan tol Trans Jawa juga membuka peluang mendorong pertumbuhan wisata baru. Khususnya yang berkonsep *one day tour* atau tur satu hari. Bahkan, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (ASITA) menyatakan, paket wisata satu hari ini banyak dipesan oleh wisatawan baik lokal maupun asing. Dengan adanya tol, wisatawan dapat lebih mudah mengakses objek wisata yang ada di Soloraya. Beberapa wisatawan menginginkan perjalanan wisata hingga ke Klaten (objek Umbul Ponggok), Solo (kuliner, batik dan wisata belanja oleh-oleh) dan Karanganyar (*De Tjolomadoe*, candi dan wisata alam). Tol memberikan alternatif berlibur bagi wisatawan, terutama dari arah Jawa Timur (Surabaya) dan sebagian Jawa Tengah Utara (Semarang). Karena itu perlu dipikirkan untuk menyiapkan beberapa rute wisata yang menarik untuk turis lokal agar dapat menangkap peluang wisata dan menaikkan tingkat okupasi hotel di Surakarta.

Kenaikan kunjungan wisata lokal ini harus dianalisis lebih jauh menggunakan model standar pelayanan Kepariwisatan yaitu A4 : Amenity (fasilitas utama); Accessibility (Transportasi,); Attraction (daya tarik destinasi wisata) dan Ancillary (Kelembagaan dan Sumber Daya/ manusia yang mengelola). Khusus wisata di Kota Surakarta sudah dicanangkan adalah

pengembangan wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif, dimana kedua aktivitas ini akan ditunjang oleh perangkat lunak (smart economy) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan sektor wisatanya. Dengan Kerangka model A4 berbasis budaya dan ekonomi kreatif yang didukung oleh smart economy maka berikut ini beberapa usulan yang diperoleh dari FGD dengan beberapa stakeholder terkait.

1. *Attraction* (daya tarik destinasi wisata)

Kota Surakarta memiliki beberapa objek wisata budaya/sejarah seperti Kraton Kasunanan, Keraton Mangkunegara, Museum Radya pustaka, Museum batik Danarhadi dan Museum Keris. Kota Surakarta juga memiliki objek wisata belanja dan buatan seperti pasar Klewer, Pasar Benteng, Pasar Gede, Taman Balekambang, dan Taman Satwataru. Objek wisata berbasis makanan seperti Timlo Sastro, Soto Gading Solo, Tengkleng Klewer Bu Edi, Sate Buntel Bu Bejo dan Mbok Galak, Selat Solo Mbak Lies, Tahu Kupat Solihin, Serabi Notosuman, Es Dawet Telasih Bu Dermi di Pasar Gede dan Nasi Liwet Wongso Lemu, banyak menjadi sasaran wisata kuliner wisatawan yang datang ke Surakarta.

Objek wisata berbasis ekonomi kreatif berbasis IKM yang banyak dikunjungi diantaranya Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Sentra permata Jayenagan, Sentar Blangkon dan Pusat sentra IKM Semanggi. Event budaya berbasis ekonomi kreatif seperti Grebeg Sudiro, Solo Great Sale, Kirab dan Opera Kolosal Adegung Kutha Sala, Solo Batik Carnival, Kirab Malem 1 Sura, Solo Internasional Performing Arts (SIPA), Semarak Singo Barong dan Solo Batik Fashion juga bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Dari hasil wawancara dengan responden, terdapat beberapa keluhan terkait dengan objek wisata berbasis budaya seperti keraton, museum batik dan keris yang jam buka sangat terbatas (Sore dan malam hari sudah tutup). Begitu juga pasar Klewer dan beberapa toko batik di sentra batik sudah tutup di sore hari. Sementara turis asing dan lokal tidak memiliki banyak pilihan untuk menikmati hiburan di Kota Solo di Sore hari menjelang petang / malam seperti jalan Malioboro di Jogja, jalan Kuta di Bali atau Jalan Braga di Bandung yang ketika sore hingga malam hari semakin banyak toko yang tetap buka untuk menawarkan aneka souvenir, makanan/ minuman dan tempat nongkrong yang cukup menyenangkan.



Gambar V.5. Jalan Kuta Bali dan Jalan Braga Bandung di sore hari

2. *Amenity* (fasilitas utama);

Aspek fasilitas utama dan pendukung kegiatan pariwisata di Kota Surakarta agar wisatawan dapat betah tinggal lebih lama pada objek destinasi wisata. Fasilitas utama yang perlu disediakan lebih banyak di Kota Surakarta antara lain: konektivitas Wi-Fi gratis, fasilitas keselamatan, toilet dan air yang bersih, lingkungan hijau yang sejuk dan lahan parkir yang luas di sekitar kawasan / objek wisata. Beberapa kelurahan seperti Laweyan telah menginisiasi pembangunan toilet wisata menggunakan anggaran kelurahan setempat senilai Rp 178 juta dan diresmikan Rabu, 2 Oktober 2019 bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Lokasi toilet cukup strategis bertempat di Jembatan Wulung Kecamatan Laweyan dekat dengan pusat jajanan dan kuliner Laweyan dan Kampung batik Laweyan.



Gambar V.6. Fasilitas toilet wisata di Kampung Batik Laweyan

(sumber= <https://surakarta.go.id/?p=14552>)

Tetapi menurut Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan, tidak cukup hanya toilet wisata, Kampung Batik Laweyan membutuhkan lokasi parkir representatif, mengingat selama ini bus parkir di bahu jalan kawasan setempat. Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan aktivitas wisatawan yang hilir mudik.

Dari FGD dengan beberapa *stakeholder*, sejak THR Sriwedari tutup tahun 2018, Kota Surakarta belum memiliki lagi taman budaya untuk menyajikan berbagai atraksi seni. Kota hanya memiliki GWO sebagai tempat teman budaya seni tari wayang orang sebagai tempat seni pertunjukan beberapa atraksi / event budaya yang terjadwal dengan rapi. Karena itu perlu dipikirkan tempat alternatif (taman budaya Kota Surakarta) untuk menampilkan pentas seni lainnya seperti drama, musik, tari-tarian, fashion-show, pameran lukisan maupun seni kontemporer lainnya. Tujuan dari didirikannya taman budaya ini adalah untuk meningkatkan kegiatan event –event seni dan budaya yang dapat mendorong peningkatan wisata kota Surakarta.

3. *Accessibility* (Transportasi,)

Dengan di bukanya akses TOL trans Jawa, maka akan membuka potensi wisata di sejumlah daerah yang ada sekitar pintu tol. Untuk menghubungkan pintu tol dengan tempat destinasi wisata maka perlu dipikirkan untuk menggali beberapa rute jalur alternatif wisata dengan tema-tema yang menarik. Jalur ini harus dipastikan dapat di lewati kendaraan pribadi atau angkutan umum seperti bis Damri Batik. Usulan dari FGD FEDEP adalah dengan mengaktifkan kembali bis tingkat Werkudara dan membuat beberapa paket rute wisata dengan bis tingkat. Selama ini rute yang ada belum banyak pilihan, misalnya perempatan Manahan, pertigaan Kerten, Sriwedari - Gladag - Balai Kota – Pasar Gede – Bank Indonesia. Bis akan berhenti ketika di depan Bank Indonesia, untuk memberi kesempatan penumpang foto-foto. Selanjutnya bus melanjutkan perjalanan ke perempatan Panggung-Tugu Cembengan-Taman Satwataru Jurug.

4. *Ancillary* (Kelembagaan dan Sumber Daya)

Aspek kelembagaan terkait dengan atribut sumberdaya manusia, sistem, dan kelembagaan seperti Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia – PHRI dan Paguyuban kampung IKM seperti Batik Laweyan, Batik Kauman, Blangkon Serengan dan Permata Jayengan. Untuk lebih mengembangkan dampak objek-objek wisata dan memanfaatkan dampak positif dari dibukanya jalan tol maka harus bersinergi dengan banyak pihak antara Asosiasi (ASITA, PHRI, paguyuban IKM, dinas/OPD terkait) untuk mengembangkan opsi-opsi destinasi wisata (termasuk rute kunjungan wisata) yang dapat dikunjungi wisatawan dalam sehari atau dua hari (Sabtu Minggu).

Berikut ini hasil sebaran kuesioner terhadap stakeholder pengusaha UMKM/ IKM di Surakarta terhadap pendapat terkait ekonom kreatif dan *smart economy* :

Tabel V.15 Hasil kuesioner pelaku UMKM dan IKM terhadap PEL dimensi ekonomi kreatif

5	Dimensi lima = Ekonomi Kreatif		Baik	Buruk	Nilai
5.1	Dukungan pemerintah dalam “pendanaan” untuk kegiatan budaya dan ekonomi kreatif (pengurangan tax pada event great sales)	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	1
5.2	Dukungan pemerintah dalam “Non-finansial” (seperti penyediaan ruang kreatif) Seperti; - Inkubator bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan - Studio, media promosi, - Gedung pertunjukan, museum, galeri cagar budaya - Pusat informasi usaha kreatif -	0 = tdk ada 1 = ada tetapi terbatas 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	1
5.3	Dukungan pemerintah terhadap perusahaan ekonomi kreatif (pameran, pelatihan, akses penjualan, pengembangan UKM kreatif)	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan	2	0	1
5.4	Adanya regulasi yang mendorong sektor budaya	0 = tidak ada 1= ada tetapi tidak efektif 2= ada dan efektif	2	0	1
5	Dimensi lima = Ekonomi Kreatif		Baik	Buruk	Nilai
5.5	Bagaimana peranan masyarakat / perusahaan bisnis (dukungan perusahaan untuk mensponsori kegiatan budaya, jumlah bantuan Volunteering yang menangani kegiatan budaya)	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik (terorganisasi) dan berkelanjutan	2	0	1
6	Dimensi enam = <i>Smart economy</i>				
6.1	Adanya dorongan dari pemerintah atau pemkot untuk menggunakan aplikasi marketplace untuk menjual barang atau jasa. Dorongan ini disertai dengan pelatihan dan kemudahan mencari partner marketplace.	0 = tdk ada 1 = dilaksanakan sekali sekali 2 = dilaksanakan secara sistemik (terorganisasi) dan berkelanjutan	2	0	1
6.2	Adanya dukungan publikasi dengan memanfaatkan media masa dan ruang kreasi untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan turis asing.	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak efektif 2 = ada dan efektif	2	0	1
6.3	Penggunaan layanan E-Government (layanan investasi online, Layanan Administrasi Kependudukan online)	0 = Belum pernah 1 = pernah tetapi tetapi tidak efektif 2 = pernah dan efektif	2	0	1
6.4	Manfaat perusahaan / sentra dari pengembangan riset atau inovatif produk/ teknologi baik dari pemerintah maupun dari Perguruan tinggi (lembaga riset) atau Perusahaan besar swasta,	0 = Belum pernah 1 = pernah tetapi tidak efektif 2 = pernah dan efektif	2	0	1

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada beberapa elemen yang masih kecil tetapi oleh *Stakeholder* diharapkan dapat memiliki efek yang besar adalah dukungan pemerintah secara Non-finansial, seperti penyediaan ruang kreatif, Inkubator bisnis, pusat inovasi, pusat pelatihan, Studio musik/TV, media promosi, Gedung pertunjukan, museum, galeri cagar budaya dan Pusat informasi usaha kreatif. Menurut responden, peranan pemerintah ada tetapi masih terbatas. Meskipun Kota Surakarta telah menyediakan dan memiliki ruang kreatif seperti *Solo technopark*, AKA Tekstil, GWO Sriwedari tetapi semua ini menurut responden belum memadai dan perlu direvitalisasi fungsi dan peranan sebagai ruang ekonomi kreatif yang lebih mampu mendorong berbagai kegiatan ekonomi kreatif.

Sementara itu ruang kreatif yang dikelola oleh masyarakat seperti kampung / sentra industri kreatif seperti Kampung batik Kauman, Kampung batik Laweyan, Kampung blangkon Srengan dan Kampung batu permata Jayengan masih perlu bantuan pemerintah untuk merevitalisasi peranan sebagai wadah penumbuhkembangan kreativitas industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasiskan pada budaya, sejarah dan ketrampilan manusia.

Dukungan publikasi dengan memanfaatkan media masa dan ruang kreasi untuk meningkatkan apresiasi dan pengakuan masyarakat Indonesia dan turis asing tampaknya belum optimal. Menurut responden, selama ini peranan pemerintah dan masyarakat terhadap apresiasi dan pengakuan produk karya seni yang dihasilkan masih belum memadai karena belum memanfaatkan media masa tradisional (TV, radio) maupun media masa kekinian (sosial media). Beberapa ruang kreatif yang dimiliki kota Surakarta belum banyak berperan untuk mensosialisasikan produk kreatif yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja kreatif. Dari hasil diskusi FGD, ada permintaan dari peserta terkait perlunya publikasi dengan format yang lebih baik dan jadwal yang rutin untuk mendatangkan pelaku ekonomi, mengajak pemirsa TV dan radio mempublikasikan karya-karya dan mensosialisasikan kegiatan aktivitas ekonomi kreatif. Jika diperlukan adanya pendanaan khusus untuk mengangkat acara ini ke level Regional dan Nasional.

V.4. ISU SEKTOR EKONOMI UNGGULAN

Strategi pengembangan sektor unggulan (*leading sector*) merupakan strategi pembangunan ekonomi lokal yang banyak diterapkan di berbagai daerah. Sektor unggulan yang akan dikembangkan biasanya memiliki keunggulan daya saing dibandingkan sektor ekonomi sejenis dari daerah sekitarnya. Sektor unggulan yang dikembangkan dihadapkan dapat

mendorong prose pertumbuhan ekonomi lokal dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

Beberapa metode coba untuk menghitung potensi masing-masing sektor ekonomi, Tetapi dalam kajian ini semua metode yang digunakan bersifat pengolahan data objektif. Metode ini antara lain

1. Analisis LQ (*Location Quotient*)

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui proporsi peranan sektor terhadap total ekonomi di suatu daerah dibandingkan kontribusi (proporsi setor sejenis) di level Propinsi).

$$LQ = \frac{\left(\frac{\text{sektor}_i\text{Surakarta}}{\text{Total_Sektor_Surakarta}}\right)}{\left(\frac{\text{sektor}_i\text{jateng}}{\text{Total_Sektor_jateg}}\right)}$$

Berikut ini hasil perhitungan analisis LQ :

Tabel V.16 Nilai LQ sektor ekonomi Kota Surakarta

No	Keterangan	LQ tahun 2016	LQ tahun 2017	LQ tahun 2018	LQ rata-rata
1	Pertanian	0,03202	0,03256	0,03285	0,03248
2	Pertambangan dan penggalian	0,00078	0,00073	0,00070	0,00074
3	Industri pengolahan	0,22481	0,22387	0,22251	0,22373
4	Pengadaan listrik dan gas	2,11156	2,08303	2,06702	2,08720
5	Pengadaan air dan pengolahan sampah	2,43305	2,41669	2,40115	2,41696
6	Jasa Konstruksi	2,57415	2,51607	2,48200	2,52408
7	Jasa Perdagangan dan reparasi	1,63312	1,62165	1,60347	1,61941
8	Transportasi dan gudang	0,86723	0,85845	0,84015	0,85527
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	1,63592	1,59785	1,53220	1,58866
10	Jasa penyedia informasi dan komunikasi	3,13117	3,04406	3,02394	3,06639
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,26004	1,24431	1,23983	1,24806
12	Real estate	2,37883	2,33997	2,26327	2,32735
13	Jasa perusahaan	2,10109	2,01049	1,99443	2,03534
14	Administrasi pemerintahan	2,07226	2,03616	2,00022	2,03621
15	Jasa pendidikan	1,14269	1,11728	1,09250	1,11749
16	Jasa kesehatan	1,24990	1,23018	1,22488	1,23498
17	Jasa lainnya	0,60553	0,60074	0,58554	0,59727

Sumber= Data diolah dari PDRB Kota Surakarta

Dari tabel V.16 di atas terlihat bahwa sektor jasa penyedia informasi dan komunikasi di Kota Surakarta mampu menjadi sektor basis dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi daerah di sekitar kota Surakarta. Nilai skor LQ jasa penyedia informasi dan komunikasi sangat tinggi yaitu rata-rata 3,06. Sementara sektor basis yang kedua adalah jasa Konstruksi juga mampu memberikan nilai rata-rata skor 2,52 dimana sektor ini menjadi basis pertumbuhan ekonomi kota dan sekitarnya.

2. Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi adalah indikator makro ekonomi yang menjelaskan tingkat pertumbuhan subsektor tersebut. Indikator ini diukur dari nilai PDRB atas harga konstan tahun 2010.

Tabel V.17 Nilai Laju Pertumbuhan sektor ekonomi Kota Surakarta

No	Keterangan	Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Pertanian	1,87	1,80	1,17	3,84	3,98	2,53
2	Pertambangan dan penggalian	- 2,30	- 2,62	- 0,44	- 0,39	- 1,58	- 1,47
3	Industri pengolahan	6,86	3,66	3,71	4,37	4,15	4,55
4	Pengadaan listrik dan gas	2,71	2,51	6,24	4,27	4,99	4,14
5	Pengadaan air dan pengolahan sampah	2,55	1,77	2,40	6,28	4,64	3,53
6	Jasa Konstruksi	1,97	5,36	6,43	5,19	5,07	4,80
7	Jasa Perdagangan dan reparasi	4,27	4,11	4,55	5,74	4,95	4,73
8	Transportasi dan gudang	8,38	8,38	5,31	5,70	5,69	6,69
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	6,95	6,18	5,09	4,44	4,16	5,36
10	Jasa penyedia informasi dan komunikasi	8,94	6,67	6,08	10,62	12,11	8,88
11	Jasa keuangan dan asuransi	4,08	6,41	8,34	4,33	3,63	5,36
12	Real estate	6,41	7,22	6,40	5,21	2,54	5,56
13	Jasa perusahaan	6,86	9,28	8,34	4,50	9,06	7,61
14	Administrasi pemerintahan	1,23	6,46	2,34	1,24	3,02	2,86
15	Jasa pendidikan	7,98	6,85	3,76	5,07	5,80	5,89
16	Jasa kesehatan	12,59	6,26	7,02	7,38	8,78	8,41
17	Jasa lainnya	4,25	3,09	4,52	8,61	7,12	5,52

Sumber= Data diolah dari PDRB Kota Surakarta

Dari tabel V.17 di atas terlihat bahwa sektor jasa penyedia informasi dan komunikasi di Kota Surakarta mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dengan pertumbuhan rata-rata lima tahun terakhir sebesar 8,88%. Sektor lain yang sangat cukup cepat pertumbuhan adalah Jasa Perusahaan yang mampu memberikan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,61 %. Dan sektor ketiga yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi tinggi adalah sektor Transportasi dan gudang dengan rata-rata pertumbuhan 6,69%.

3. Analisis Kontribusi sektor

Kontribusi atau peranan sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di Kota Surakarta. Struktur ini dinyatakan dalam prosentase atau proporsi peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah atau PDRB. Data kontribusi sektor ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.18 Nilai Kontribusi sektor ekonomi Kota Surakarta

No	Keterangan	Proporsi sektor terhadap Total PDRB (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1	Pertanian	0,47	0,46	0,44	0,43	0,42	0,44
2	Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri pengolahan	8,09	7,96	7,84	7,73	7,62	7,85
4	Pengadaan listrik dan gas	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
5	Pengadaan air dan pengolahan sampah	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
6	Jasa Konstruksi	25,99	25,97	26,25	26,11	25,94	26,06
7	Jasa Perdagangan dan reparasi	23,93	23,63	23,46	23,46	23,28	23,55
8	Transportasi dan gudang	2,79	2,87	2,87	2,87	2,87	2,85
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	5,11	5,14	5,13	5,07	4,99	5,09
10	Jasa penyedia informasi dan komunikasi	12,93	13,08	13,18	13,79	14,62	13,52
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,36	3,39	3,49	3,45	3,38	3,41
12	Real estate	4,32	4,39	4,44	4,41	4,28	4,37
13	Jasa perusahaan	0,70	0,73	0,75	0,74	0,76	0,74
14	Administrasi pemerintahan	5,65	5,71	5,55	5,31	5,17	5,48
15	Jasa pendidikan	4,24	4,30	4,24	4,21	4,21	4,24
16	Jasa kesehatan	1,00	1,00	1,02	1,04	1,07	1,02
17	Jasa lainnya	0,98	0,96	0,95	0,98	0,99	0,97

Sumber= Data diolah dari PDRB Kota Surakarta 2014-2018

Pada tabel di atas, dominasi Jasa Konstruksi dalam lima tahun paling tinggi yaitu rata-rata 26,06 %. Sementara itu peranan sektor perdagangan, jasa reparasi mesin dan peralatan menunjukkan dominasi memberikan nilai tambah terbesar kedua dengan rata-rata sebesar 23,55%. Sektor lain yang memberikan nilai tambah besar adalah sektor jasa penyedia informasi dan komunikasi yang memberikan kontribusi tahun 2018 sebesar 13,52%. Dominasi kedua sektor, sektor perdagangan dan reparasi dan sektor penyedia informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa Kota Surakarta adalah kota Bisnis atau pusat dari perdagangan, dan jasa reparasi bagi berbagai sektor ekonomi perdagangan hasil pertanian, peternakan dan produk industri dari daerah kabupaten lain di sekitar Surakarta. Sementara itu sektor lain yang terus mengalami penurunan peranan adalah sektor industri dari tahun 2014 sebesar 8,06% menjadi 7,86% pada tahun 2018.

4. Analisis Serapan Tenaga Kerja

Kontribusi lain yang tidak boleh diabaikan dalam pemilihan sektor unggulan adalah kemampuan menyerap tenaga kerja. Masing-masing sektor memiliki jumlah pelaku maupun teknologi yang digunakan dalam memproduksi nilai tambah. Jika jumlah pelaku usaha banyak maka penyerapan tenaga kerja juga diharapkan menjadi besar. Sebaliknya jika teknologi yang digunakan akan tidak terlalu modern maka penyerapan tenaga kerja menjadi semakin banyak.

Tabel V.19 Penyerapan Tenaga kerja sektor ekonomi Kota Surakarta

No	Sektor	2016*)	2017	2018	Rata-rata
1	Pertanian	1.840	1.341	1.998	1.726
2	Pertambangan	364	438	470	424
3	Industri	62.226	54.184	57.460	57.957
4	Listrik dan Gas	426	1.601	1.886	1.304
5	Konstruksi	13.658	6.913	9.424	9.998
6	Perdagangan	108.207	100.971	104.877	104.685
7	Angkutan	12.643	13.894	18.140	14.892
8	Keuangan	16.612	14.198	15.140	15.317
9	Jasa lainnya	55.223	65.854	50.070	57.049
	Total	271.199	259.394	259.465	

Sumber= Surakarta dalam Angka

Dari tabel V.19 terlihat bahwa jasa Perdagangan menjadi sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat dimaklumi karena kota Surakarta banyak terdapat UMKM dagang/ toko dan para penjual di pasar tradisional sangat banyak menyerap tenaga kerja.

5. Klasifikasi sektor Ekonomi Berdasarkan Dominasi Sektor dan Potensi pengembangan sektor

Tabel V.20 Tipologi sektor berdasarkan dominasi dan pertumbuhan

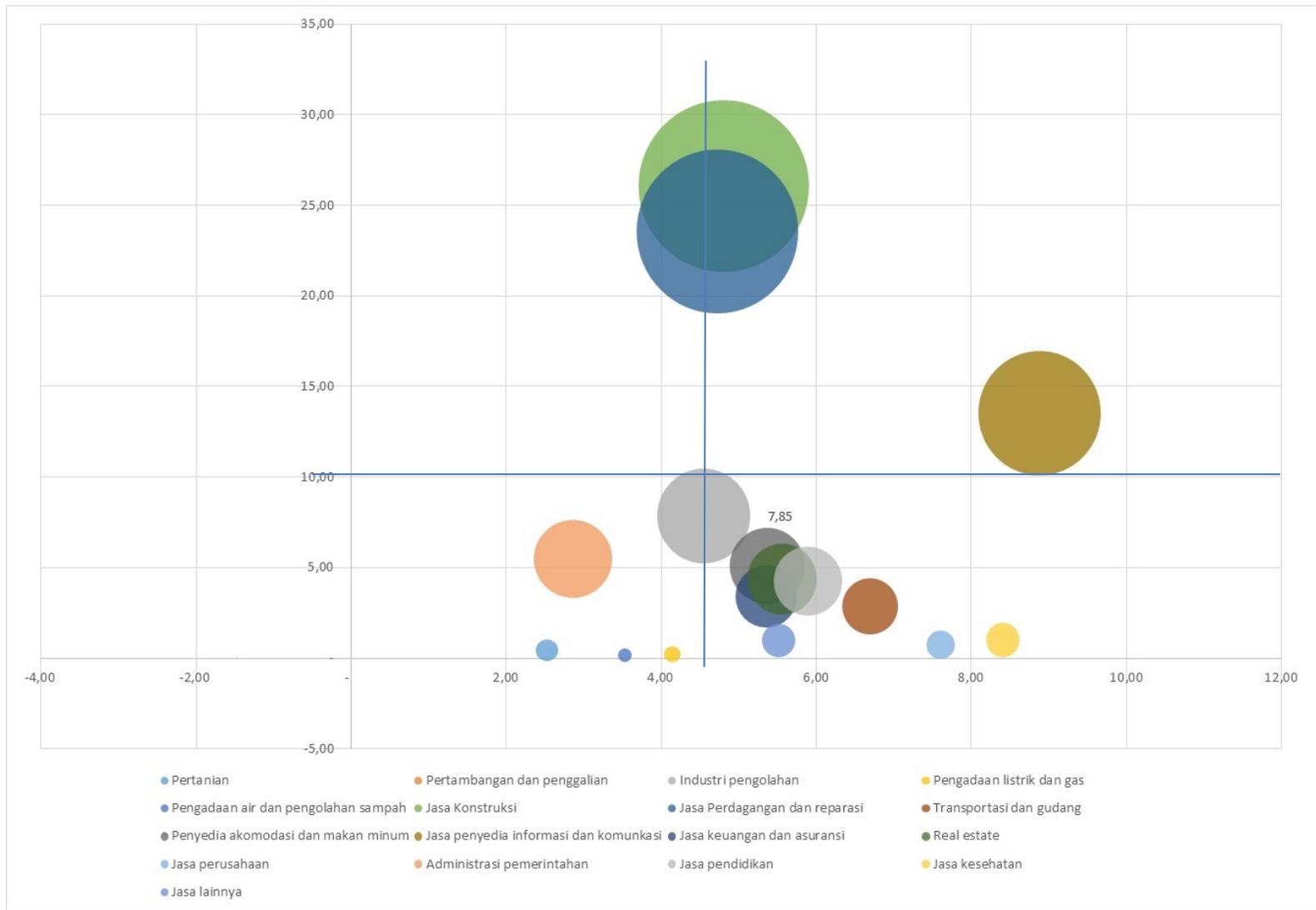
No	Keterangan	PDRB dan Tipologi		
		Proporsi	Pertumbuhan	Tipologi
1	Pertanian	0,44	2,53	IV
2	Pertambangan dan penggalian	0,00	-	IV
3	Industri pengolahan	7,85	4,55	IV
4	Pengadaan listrik dan gas	0,23	4,14	IV
5	Pengadaan air dan pengolahan sampah	0,17	3,53	IV
6	Jasa Konstruksi	26,06	4,80	III
7	Jasa Perdagangan dan reparasi	23,55	4,73	III
8	Transportasi dan gudang	2,85	6,69	II
9	Penyedia akomodasi dan makan minum	5,09	5,36	I
10	Jasa penyedia informasi dan komunikasi	13,52	8,88	I
11	Jasa keuangan dan asuransi	3,41	5,36	II
12	Real estate	4,37	5,56	II
13	Jasa perusahaan	0,74	7,61	II
14	Administrasi pemerintahan	5,48	2,86	IV
15	Jasa pendidikan	4,24	5,89	II
16	Jasa kesehatan	1,02	8,41	II
17	Jasa lainnya	0,97	5,52	II

Tipologi I = Sektor dengan PDRB tinggi dan laju pertumbuhan yang cepat

Tipologi II = sektor dengan PDRB yang rendah tetapi memiliki laju pertumbuhan cepat

Tipologi III = sektor dengan PDRB tinggi dan laju pertumbuhan lambat

Tipologi IV = sektor dengan PDRB rendah dan laju pertumbuhan lambat



Gambar V.7. Tipologi sektor berdasarkan dominasi dan pertumbuhan

V.5. ANALISIS PEL DARI HASIL KUESIONER *STAKEHOLDER*

Konsep pembangunan ekonomi lokal (PEL) adalah konsep pembangunan ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat tidak hanya dijadikan objek saja tetapi juga subjek dalam pembangunan ekonomi, sehingga dapat bersama-sama mengambil keputusan terhadap apa yang sebaiknya mereka lakukan terhadap permasalahan mereka dan lingkungan tempat usaha. Untuk membuat perencanaan pembangunan ekonomi lokal, diperlukan alat RALED (*Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development*). RALED suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis dan meningkatkan pengetahuan tentang kondisi ekonomi lokal sebagai dasar dalam membuat perencanaan dan aksi tindak terhadap perencanaan pelibatan masyarakat secara aktif. RALED menggunakan enam dimensi atau aspek dalam Hexagonal PEL untuk menganalisis faktor penggerak dan menentukan status ekonomi suatu daerah atau kota. Dimensi tersebut adalah (1) Dimensi Kelompok Sasaran, (2) Dimensi Faktor Lokasi, (3) Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan, (4) Dimensi Pembangunan Berkelanjutan, (5) Dimensi Tata Pemerintahan, dan (6) Dimensi Proses Manajemen.

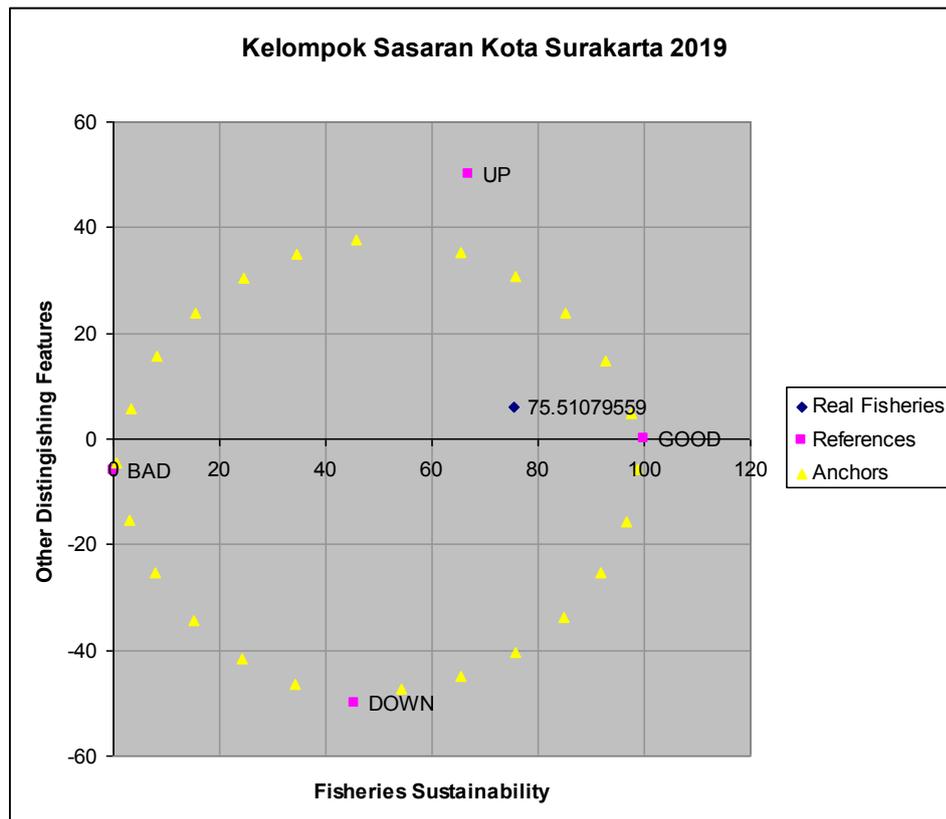
Pada tahun 2015 Pemkot Surakarta pernah melakukan kajian status dan faktor pengungkit PEL. Terdapat masukan untuk mengevaluasi dan menambahkan satu dimensi lagi untuk ekonomi kreatif dan smart economy. Karena itu pengukuran status PEL tahun 2019 menggunakan dimensi ekonom lokal menjadi tujuh dimensi, dimana dimensi terakhir adalah atas usulan dari *stakeholder*.

Kajian ini adalah bagian awal yang berisi review hasil pendapat *stakeholder* terhadap kondisi PEL Kota Surakarta dan hasil perhitungan RALED berupa status PEL dan faktor pengungkit dari ketujuh dimensi PEL. Selanjutnya hasil kajian berupa status dan faktor pengungkit PEL akan publikasikan ke *stakeholder*. Melalui kegiatan *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD), para *stakeholder* secara partisipatif akan menyepakati permasalahan dan usulan perbaikan berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Rekomendasi yang dihasilkan selanjutnya menjadi alternatif masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 2020-2025.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat status dan faktor pengungkit dari masing-masing dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Surakarta disajikan sebagai berikut :

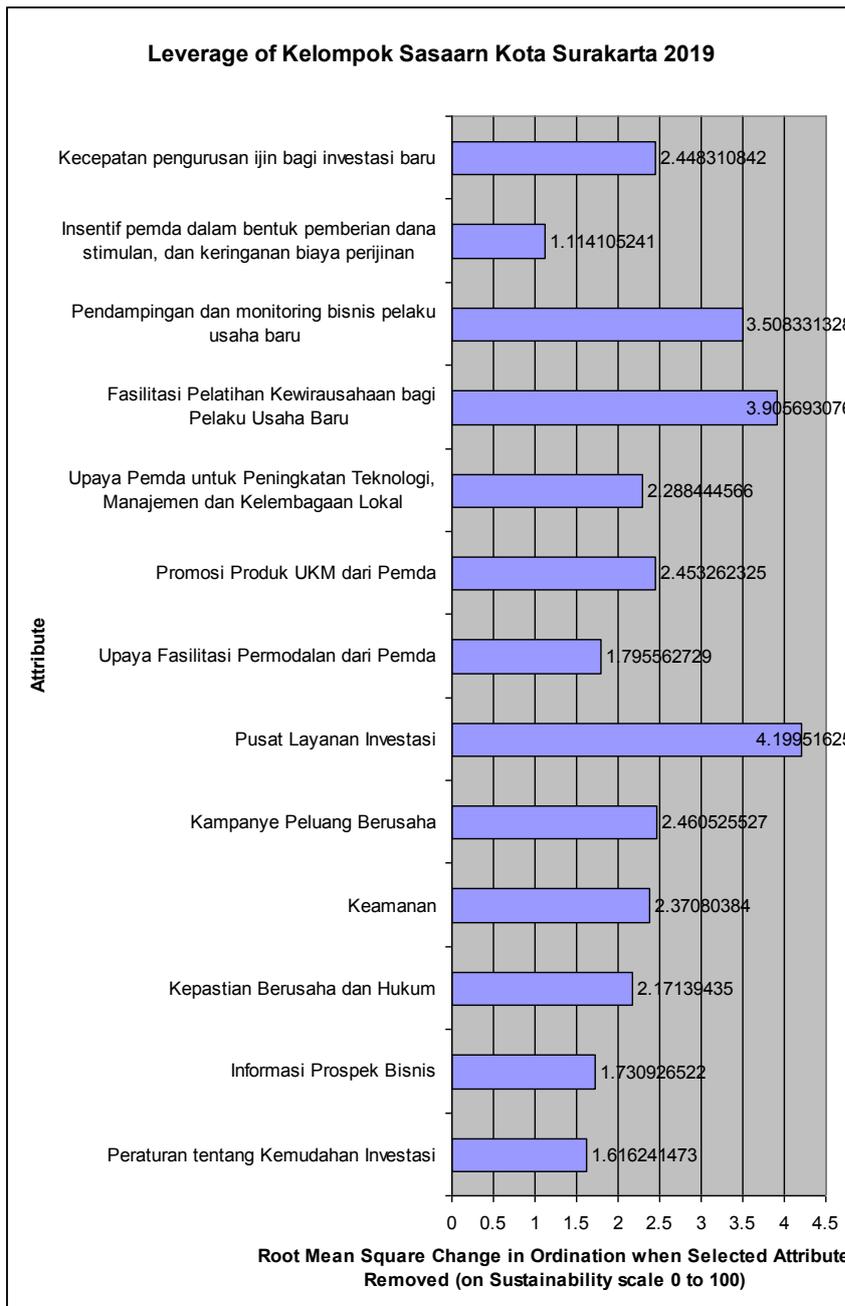
1. DIMENSI KELOMPOK SASARAN

Ditinjau dari dimensi kelompok sasaran, nilai indeks pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta menunjukkan nilai sebesar 75,51. Hasil ini jauh lebih baik dari pada hasil kajian tahun 2015 sebesar 72,59. Hal ini berarti bahwa dimensi kelompok sasaran dalam program PEL di Kota Surakarta berada dalam kondisi **Baik** (lebih dari 75) dan terjadi peningkatan status sebesar 2,92 point dari tahun 2015. Secara skematis grafis nilai kelompok sasaran dapat dilihat pada gambar berikut 5.8



Gambar V.8. Indeks Dimensi Kelompok Sasaran di Kota Surakarta

Faktor pengungkit (*Leverage Factor*) utama dari dimensi Kelompok Sasaran di Kota Surakarta menurut urutan prioritasnya adalah sebagai berikut : (1) Pusat Layanan Investasi (2) Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi usaha baru, (3) Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru, (4) Kampanye Peluang Berusaha dan (5) Promosi Produk UKM dari Pemda. Faktor Pengungkit ini selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menyusun rencana tindak PEL di Kota Surakarta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 5.9. berikut ini.



Gambar V.9. Faktor Pengungkit Dimensi PEL Kelompok Sasaran di Kota Surakarta

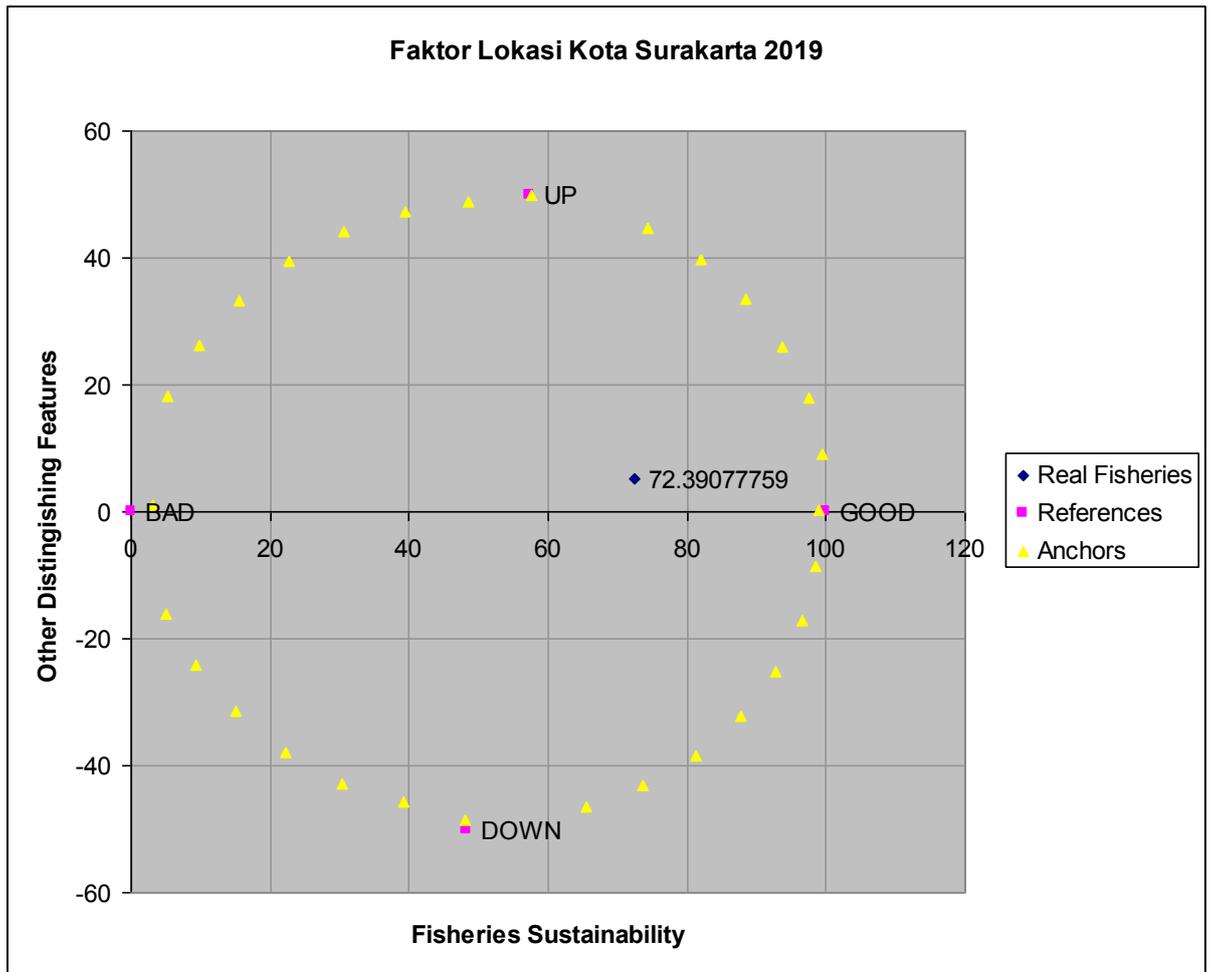
Dari gambar di atas juga dapat diketahui bahwa kondisi yang dirasa oleh *stakeholder* yang menjadi responden (khususnya para pengusaha) adalah sudah baik. Tetapi Pusat layanan investasi masih perlu terus diperbaiki karena berdasarkan hasil survei sebanyak 48,3 % menyatakan jasa layanan investasi telah memberikan jasa layanan konsultasi investasi, dan sebanyak 37,9% responden menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan layanan investasi yang disertai layanan konsultasi investasi meskipun layanan tersebut belum memadai (atau layanan konsultasi investasi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengusaha selaku pelaku ekonomi).

Masukan yang kedua adalah program Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan bagi usaha baru masih perlu ditingkatkan karena berdasarkan hasil survei menunjukkan 71 % menjawab fasilitasi kewirausahaan bagi usaha baru telah ada tetapi belum memadai. Dari wawancara dengan sejumlah responden, termasuk sejumlah OPD terkait, upaya pelatihan kewirausahaan baru ini menghadapi berbagai kendala. Kendala ini antara lain : banyak penduduk Kota Surakarta yang masih menganggur tetapi kurang tertarik untuk ikut pelatihan kewirausahaan dengan berbagai alasan. Kedepan perlu kerjasama dinas terkait dengan Ketua RW, Ketua Sentra Industri dan sekolah kejuruan termasuk sekolah Diploma dan perguruan tinggi untuk menjaring lebih banyak pemuda-pemudi yang memiliki kemauan kuat untuk berwirausaha. Selain itu materi kewirausahaan sebaiknya dikemas dengan lebih menarik dan sesuai dengan sasaran generasi milenial. Materi-materi baru seperti bagaimana merintis dan menjadi *dropshipper e-commerce* yang sukses, atau bagaimana mengelola industri kecil atau usaha kecil yang dinamis dengan pemasaran melalui *e-commerce*.

Masukan ketiga yang perlu diperbaiki adalah pendampingan dan monitoring bisnis bagi usaha baru. Dari survei ditemukan bahwa sebanyak 44,82% responden menyatakan pendampingan dan monitoring bisnis memang telah dilakukan, tetapi program yang ada belum memadai. Pengembangan wirausaha baru melalui pusat inkubator bisnis perlu ditingkatkan perannya dan perlu ada peningkatan kemampuan para pendamping (konsultan bisnis) yang telah ada dengan mendatangkan beberapa praktisi langsung dari pengusaha sukses di Solo Raya sebagai mentor utama bagi calon-calon pengusaha muda. Para konsultan yang ada tetap memberikan pendampingan dan monitoring kepada pengusaha muda, tetapi perlu ditambahkan dengan mentor utama dari para pengusaha sukses untuk memberikan masukan-masukan bisnis atau strategi bisnis yang lebih tepat.

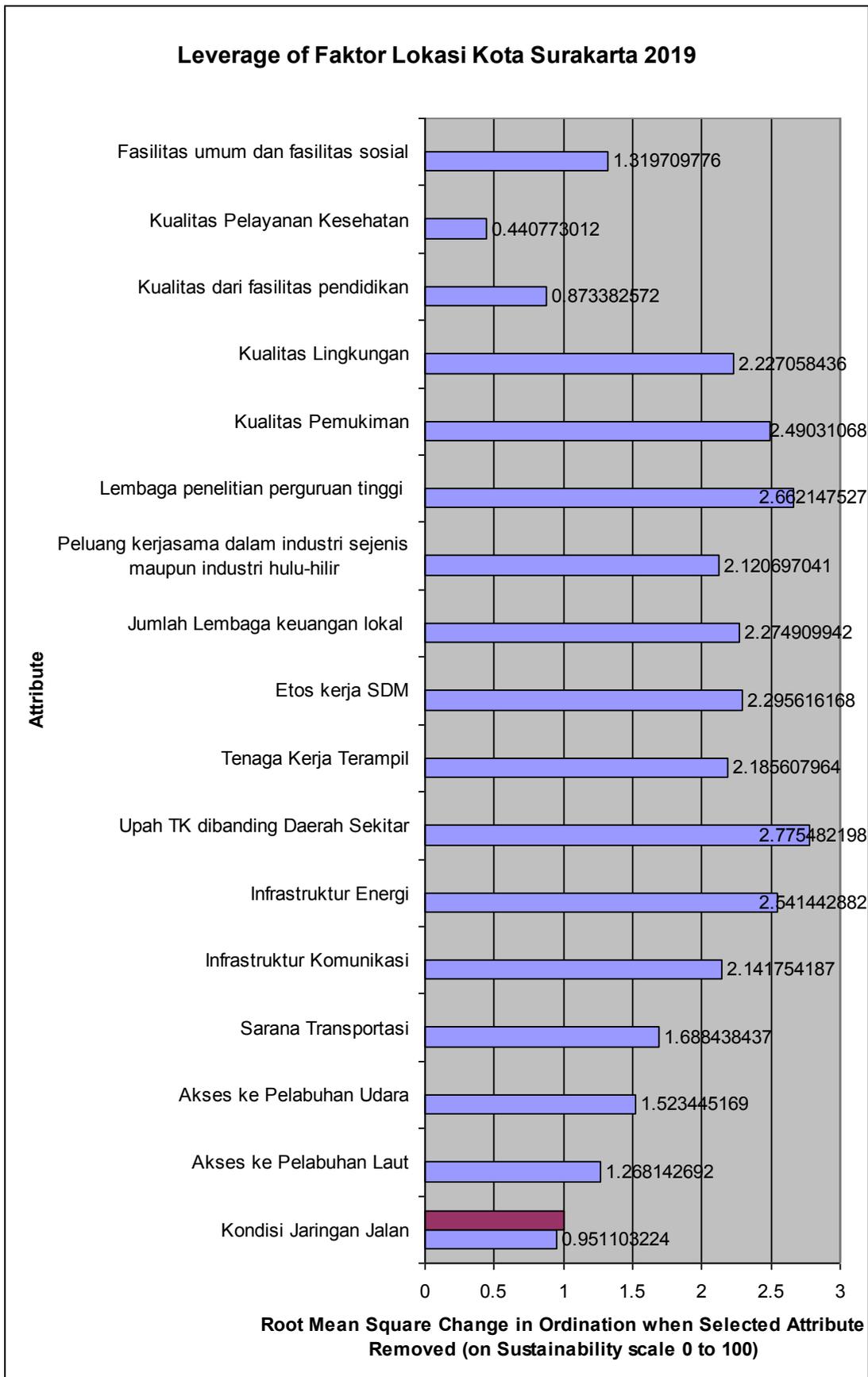
2. DIMENSI FAKTOR LOKASI

Hasil analisis RALED terhadap dimensi Faktor Lokasi di Kota Surakarta menunjukkan nilai sebesar **72,3**. Hal ini berarti dimensi Faktor Lokasi terjadi penurunan status sebesar 14,02 poin jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 86,32 poin. Penurunan ini disebabkan karena hasil survei kepuasan *stakeholder* terhadap faktor lokasi Kota Surakarta mengalami penurunan seperti upah tenaga kerja yang lebih mahal dari pada daerah sekitarnya (ada perbedaan yang makin mencolok, antara upah pekerja Kota Surakarta dari pada daerah lain). Faktor lain yang kurang menurut responden adalah rendahnya peranan lembaga penelitian untuk meningkatkan ekonomi lokal di Kota Surakarta (71, 4%). Secara umum nilai 72,3 point ini termasuk cukup **baik**. Secara skematis nilai indeks dimensi Faktor Lokasi diperlihatkan pada gambar V.10 dibawah ini :



Gambar V.10. Nilai Indeks Dimensi Faktor Lokasi di Kota Surakarta

Berbeda dari analisis PEL tahun 2015 yang lebih menekankan pada perbaikan tenaga kerja terampil, pada Faktor Pengungkit (*Leverage Factor*) utama dari dimensi Faktor Lokasi tahun 2019 diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut:(1) Upah Tenaga Kerja dibandingkan dengan daerah sekitar (2) Infrastruktur energi dan (3) Lembaga penelitian. Hasil analisis atribut pengungkit dimensi ini disajikan pada gambar V.11. sebagai berikut :



Gambar V.11. Faktor Pengungkit PEL dimensi Faktor Lokasi di Kota Surakarta tahun 2019

Terkait usulan perbaikan berdasarkan urutan faktor pengungkit, maka prioritas pertama adalah menyelesaikan masalah upah tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Jika kita lihat dari keputusan Gubernur Jateng no 560/68 tahun 2018 tentang upah minimum pada 35 kab/kota di Jateng tahun 2019, disebutkan bahwa UMR Kota Surakarta sebesar Rp. 1.802.700,- lebih tinggi dari Kab. Boyolali Rp. 1.790.000,-; Kab. Sukoharjo Rp. 1.783.500,-; kab Sragen Rp.1.673.500,-; Kab Klaten Rp. 1.795.061,- dan Kab Wonogiri Rp. 1.655.000,-.

Pemerintah daerah dalam hal ini Prov Jateng juga telah mempertimbangkan laju inflasi atau harga kebutuhan pokok dan kehidupan layak buruh dan keluarganya. Karena itu Pemprov setiap tahun melakukan evaluasi kenaikan UMR. Hal ini terlihat dari hasil pengumuman kenaikan UMR untuk tahun 2020 dimana Kota Surakarta naik sebesar 8,51% atau Rp. 1.956.200,-. Kab Boyolali naik juga naik 8,51% menjadi Rp. 1.942.500. Kab. Sukoharjo naik 8,66% menjadi Rp. 1.938.000.

Sumber : <https://jatengprov.go.id/publik/umk-35-kabupaten-kota-ditetapkan-semarang-tertinggi-banjarnegara-terendah/>

Mengingat beban biaya transportasi dan akomodasi (rumah) sebagai dua komponen biaya yang menjadi beban terbesar bagi buruh, maka FGD memberikan masukan kepada Pemkot untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap beberapa usulan antara lain:

- memberikan subsidi (potongan harga hingga 50%) bagi para pekerja (“pemilik kartu pekerja” kota Surakarta) untuk angkutan bis kota (Damri batik), mengingat ada pendapat yang menyatakan biaya transportasi menghabiskan sampai 10-15 persen dari pendapatan,
- pemberian subsidi untuk rumah susun atau rumah sewa beberapa aset pemkot yang dijadikan rumah tinggal,
- pembelian sembako murah melalui koperasi pekerja (anggota),
- Pemberian subsidi kesehatan mengingat iuran BPJS peserta mandiri untuk kelas tiga mengalami kenaikan 64,7% untuk tahun 2020 (kelas tiga dari Rp.25.500/bulan menjadi Rp.42.000/bulan), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Biaya Jaminan Kesehatan,
- Pemberian subsidi pendidikan kepada anak pekerja melalui pemberian “Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta / BPMKS” non tunai Siswa Winasis. Kartu itu hanya bisa digunakan berbelanja barang-barang keperluan sekolah di toko mitra yang sudah terdaftar, jadi tidak bisa membeli pulsa atau kebutuhan lain selain pendidikan.

Sementara itu, berdasarkan hasil FGD dengan beberapa pengusaha dan OPD yang terkait, disebutkan bahwa penduduk Kota Surakarta sebenarnya banyak yang belum mempunyai pekerjaan atau bekerja hanya paruh waktu. Di pihak lain beberapa perusahaan di Kota Surakarta yang membutuhkan tenaga kerja lebih memilih tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Surakarta dengan alasan upah lebih mudah dan etos kerja lebih tinggi.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. OPD terkait tenaga kerja harus lebih proaktif menjaring pemuda-pemuda di Kota Surakarta untuk disalurkan menjadi tenaga terampil yang profesional (memiliki jiwa disiplin, tangguh dan memiliki keterampilan cukup baik). Kenaikan nilai upah yang diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan sikap mental profesional maka pemilik usaha tentu akan lebih memilih tenaga kerja dari warga sekitarnya. Di sisi lain, jika pemuda yang ada tidak mau menjadi pekerja untuk orang lain, maka OPD dapat mendorong mereka menjadi pengusaha baru dengan memanfaatkan kota Surakarta sebagai pusat perdagangan dan pusat budaya Jawa Tengah bagian Selatan. Melalui penciptaan pemain *e-commerce* baru untuk membantu menjual berbagai produk IKM yang ada di Kota Surakarta maupun dari daerah sekitarnya.

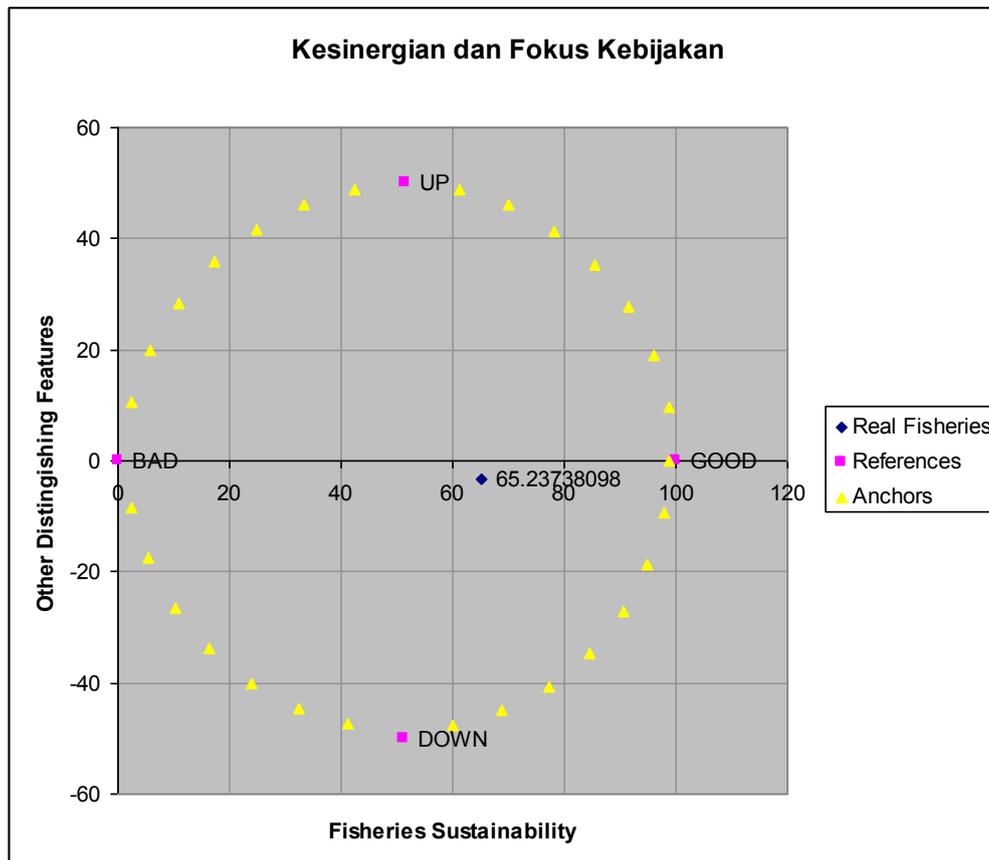
Faktor lain yang perlu diperbaiki adalah infrastruktur energi listrik yang sering mengalami gangguan operasi. Karena bersumber dari PLN (Pemerintah Pusat) maka pemerintah daerah perlu memikirkan, mendorong, mensosialisasikan dan memberi contoh penggunaan energi alternatif seperti energi matahari. Sosialisasi ini dapat dimulai dari tindakan nyata dari beberapa kantor Pemda untuk menggunakan sel surya untuk berbagai keperluan seperti lampu penerangan maupun operasional di kantor seperti mesin fotocopy dan AC.

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah kerjasama nyata (MOA) Pemda Kota Surakarta dengan beberapa lembaga penelitian yang ada di Kota Surakarta seperti LPPM UNS , UMS, ATMI dan beberapa Perguruan Tinggi lain untuk melaksanakan berbagai rencana penelitian dan implementasi hasil penelitian bersama bentuk yang lebih kongkret. Misalnya implementasi teknologi yang dapat menyelesaikan masalah energi bagi industri kecil, air bersih bagi penduduk dan pengaturan lalu lintas kota menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh lembaga penelitian yang ada.

Sedangkan ada satu faktor lain yang harus selalu diperhatikan adalah infrastruktur jalan, dimana batas standar memiliki skor 1 tetapi hasil perhitungan nilai PEL dengan skor 0,95 point. Nilai ini berarti masih perlu dilakukan perbaikan infrastruktur jalan meskipun tidak menjadi prioritas utama.

3. DIMENSI KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN

Jika hasil analisis RALED terhadap dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan pada tahun 2015 menunjukkan nilai sebesar **72,34** atau dalam kondisi agak **baik (nyaris buruk)**, maka hasil tahun 2019 menunjukkan penurunan kinerja dengan poin sebesar **65,23** atau turun sebesar 7,11 poin. Secara grafis nilai Kesinergian dan Fokus Kebijakan diperlihatkan pada gambar V.12.



Gambar V.12. Indeks Dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan diKota Surakarta

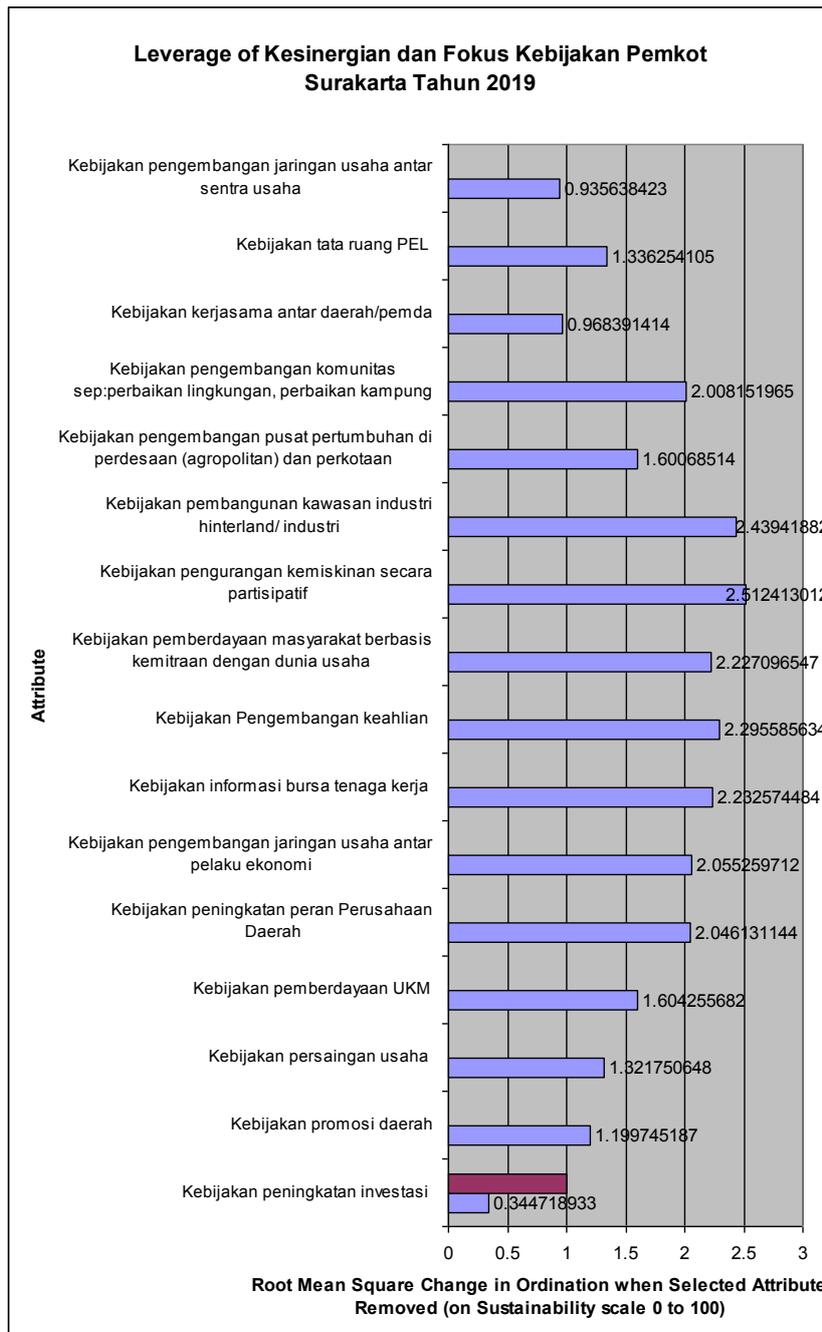
Penurunan ini lebih disebabkan karena sejumlah elemen PEL seperti kinerja faktor pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan dunia usaha (CSR) belum berjalan dengan baik di Kota Surakarta. Dari hasil kuesioner menyebutkan 48,2% responden pengusaha menyatakan belum ada program pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dunia usaha (CSR). Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya nilai kinerja dimensi ini adalah rendahnya nilai kebijakan pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi dan rendahnya implementasi kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan di daerah tertinggal.

Secara umum, kebijakan PEL yang dirasa oleh *stakeholder* yang sudah cukup baik dengan point 65,23. Software RALED yang digunakan untuk analisis laporan ini, menghasilkan beberapa faktor penguangkit untuk dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan. Faktor

pengungkit diurutkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut: (1) Kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif, (2) Kebijakan pembangunan kawasan industri (sentra industri), (3) pengembangan keahlian SDM (termasuk pengusaha) yang profesional, (4) kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan dunia usaha (CSR) dan (5) kebijakan informasi bursa tenaga kerja. Hasil analisis atribut pengungkit dimensi ini disajikan pada gambar 5.13 berikut ini.

Berdasarkan hasil FGD (tanggal 16 November 2019) tentang PEL yang dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan secara partisipatif, diperoleh beberapa catatan antara lain:

- Banyak penduduk miskin yang bekerja hanya paruh waktu dan bukan bekerja didasarkan atas kompetensi atau kemampuan orang tersebut sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.
- Pengurangan kemiskinan kota yang selama ini sudah dijalankan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Pihak Dinas terkait telah membantu berbagai fasilitas produksi (pemberian mesin jahit listrik untuk sentra kain perca di Tipes, pemberian peralatan mesin bor, kompresor untuk pengrajin di sentra sangkar burung di Mojosongo), memfasilitasi sertifikasi halal makanan untuk sentra makanan di Jagalan, juga mendorong pendirian beberapa koperasi simpan pinjam bagi anggota sentra industri.



Gambar V.13. Faktor Pengungkit dimensi Kesinergian dan Fokus Kebijakan di Kota Surakarta

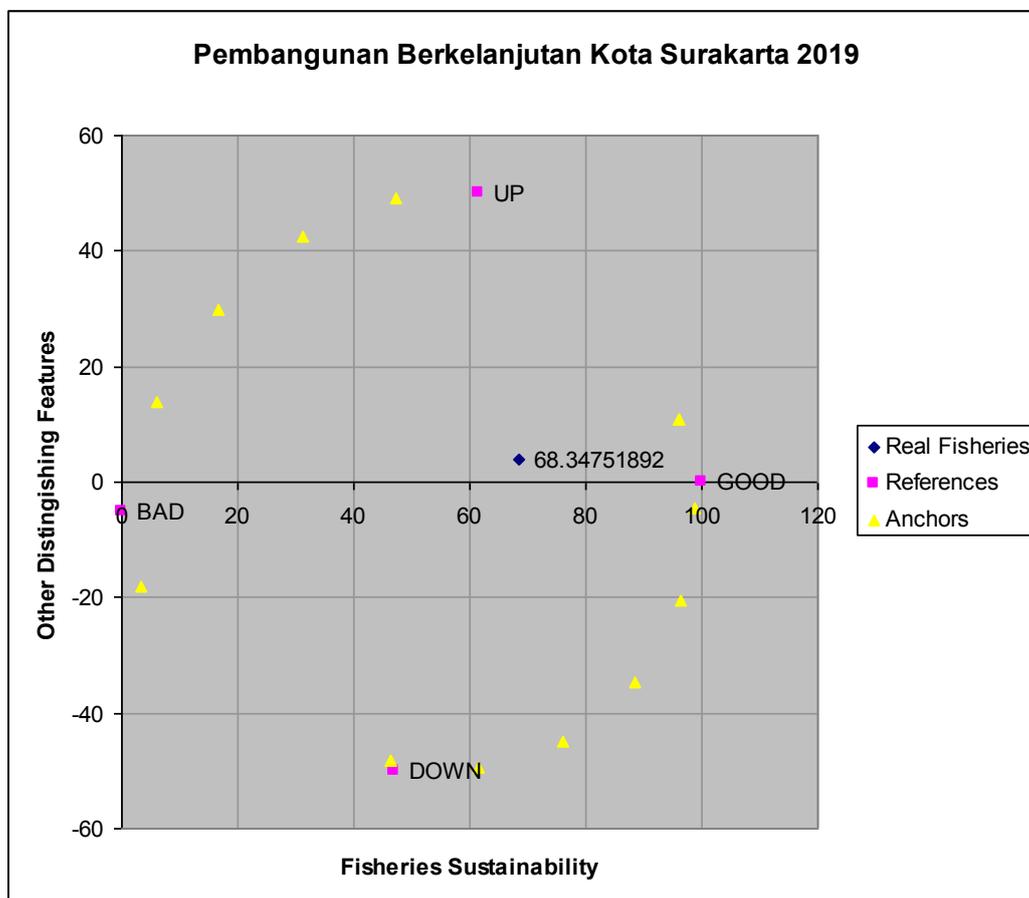
Hasil lain dari FGD tersebut yaitu :

- Pemberdayaan ekonomi untuk kawasan penduduk miskin diharapkan tidak saja berhenti di pemberian peralatan produksi dan fasilitasi standar mutu produk (sertifikat halal), tetapi juga ke depan melalui koperasi diharapkan juga didorong untuk menyelesaikan masalah pasokan bahan baku (seperti IKM kain perca yang kesulitan mendapatkan bahan baku potongan kain batik dapat dihubungkan dengan sentra industri batik Kauman dan Laweyan; sentra industri tahu juga kesulitan mendapatkan bahan baku kedelai dengan harga yang stabil).

- Beberapa sentra didorong untuk memiliki showroom bersama baik melalui UPT Sentra industri Semanggi maupun pendirian showroom bersama di daerah sekitar sentra berdiri. Showroom bersama ini harus dikelola oleh koperasi dan pengurus koperasi ke depan diambil dari orang-orang yang profesional di luar anggota sentra.

4. DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hasil analisis dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi lokal di Kota Surakarta tahun 2019 menunjukkan nilai **68,34** dan ini berarti terjadi perubahan kenaikan dari tahun 2015 sebesar **65,16**. Hal ini berarti bahwa dimensi Pembangunan Berkelanjutan di kota Surakarta berada dalam masih dalam kondisi **cukup baik**. Secara grafis nilai indeks dimensi Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat pada gambar V.14. berikut ini :

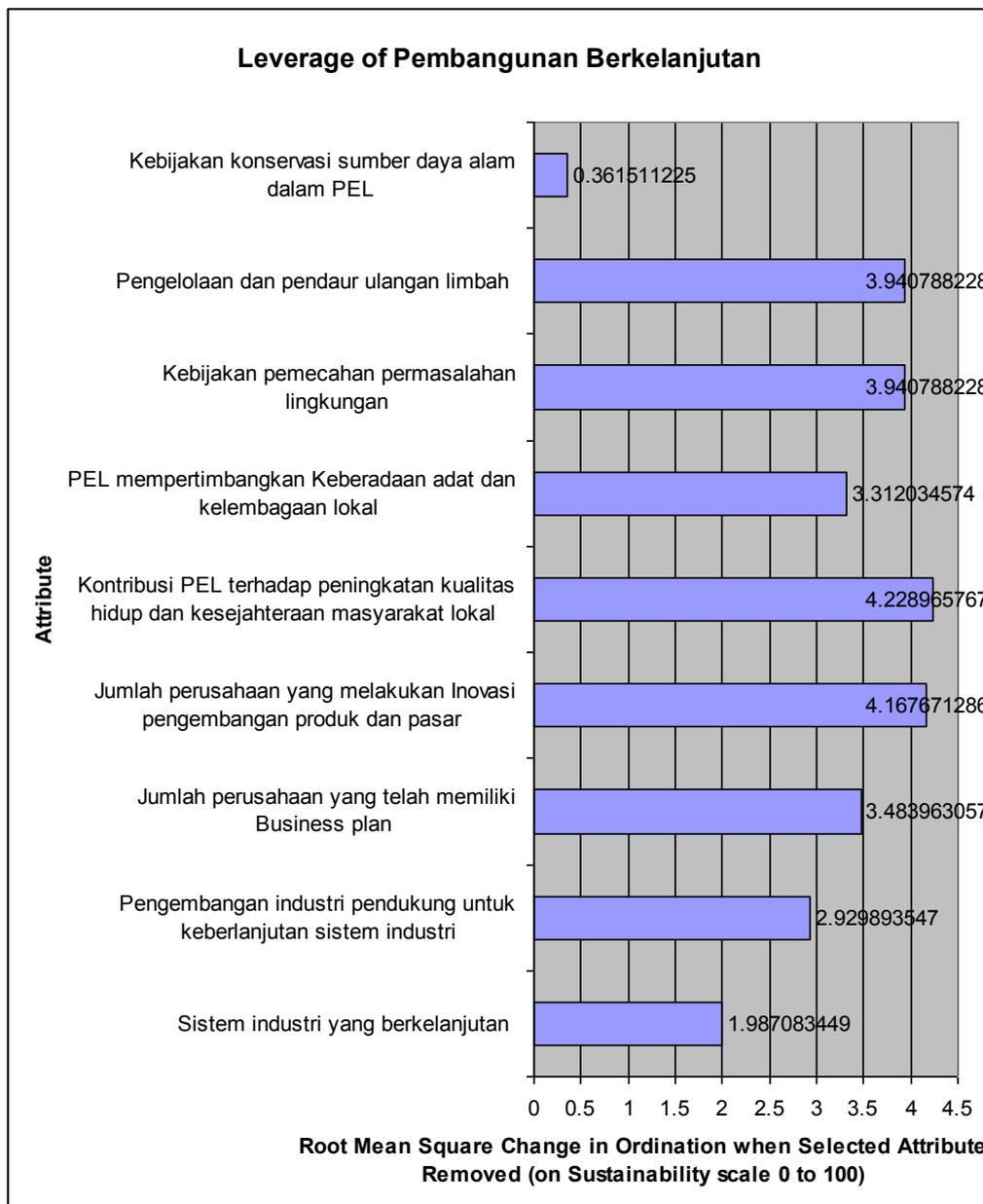


Gambar V.14. Nilai indeks dimensi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta tahun 2019

Faktor Pengungkit utama dari dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta yang diurutkan berdasarkan prioritas adalah sebagai berikut :

- (1) Kontribusi PEL terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal
- (2) Jumlah perusahaan yang melakukan Inovasi pengembangan produk dan pasar,
- (3) Kebijakan pemecahan permasalahan lingkungan dan
- (4) Pengelolaan dan pendaur ulangan

limbah. Hasil analisis atribut pengungkit (*leverage attributes*) untuk dimensi Pembangunan berkelanjutan di Kota Surakarta secara rinci disajikan pada gambar V.15



Gambar V.15. Faktor Pengungkit dimensi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta tahun 2019

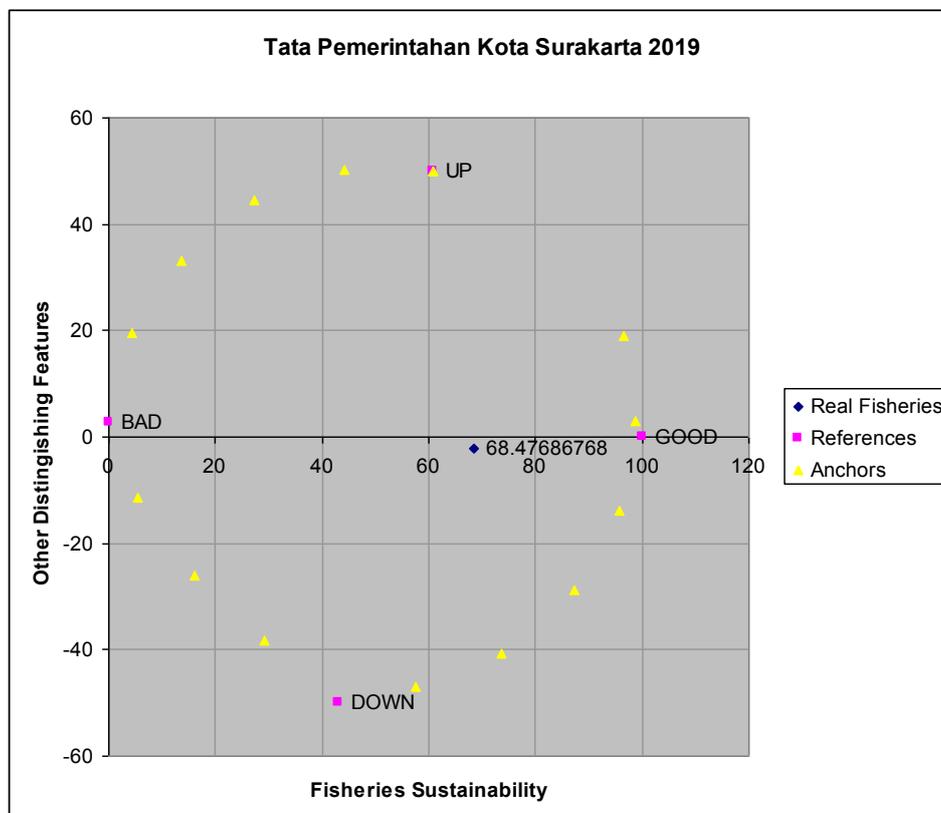
Pada isu pembangunan berkelanjutan, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis di Kota Surakarta sudah saatnya harus mempertimbangkan dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan sungai dengan melibatkan masyarakat di sekitar sungai. Beberapa kelompok lingkungan hidup telah didirikan di masyarakat. Kelompok lingkungan ini memiliki aktivitas bisnis ekonomi seperti pemeliharaan ikan (lele dan mujair), sayur mayur dan pengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Ke depan kegiatan ini perlu dikembangkan lebih luas

agar masyarakat lain dapat merasakan manfaat bagi lingkungan dan dapat menambah pendapatan masyarakat.

Untuk faktor pengungkit jumlah perusahaan yang melakukan inovasi pengembangan produk dan pasar, menjadi strategis di masa mendatang. Saat ini telah terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan inovasi produk dengan menggunakan bahan baku ramah lingkungan, dimana sebagian IKM batik telah menggunakan pewarna alam sebagai bahan baku pewarna untuk batik, bahkan LPPM UNS telah mengembangkan pewarna alam tekstil yang memiliki tingkat kepekatan dan kestabilan warna telah menyamai warna sintetis. Pemkot Surakarta masih memiliki beberapa tugas yang perlu diselesaikan untuk mengembangkan pengolahan limbah industri di beberapa lokasi sentra. Seperti pengolahan limbah tahu tempe di Mojosongo dan Pucangsawit.

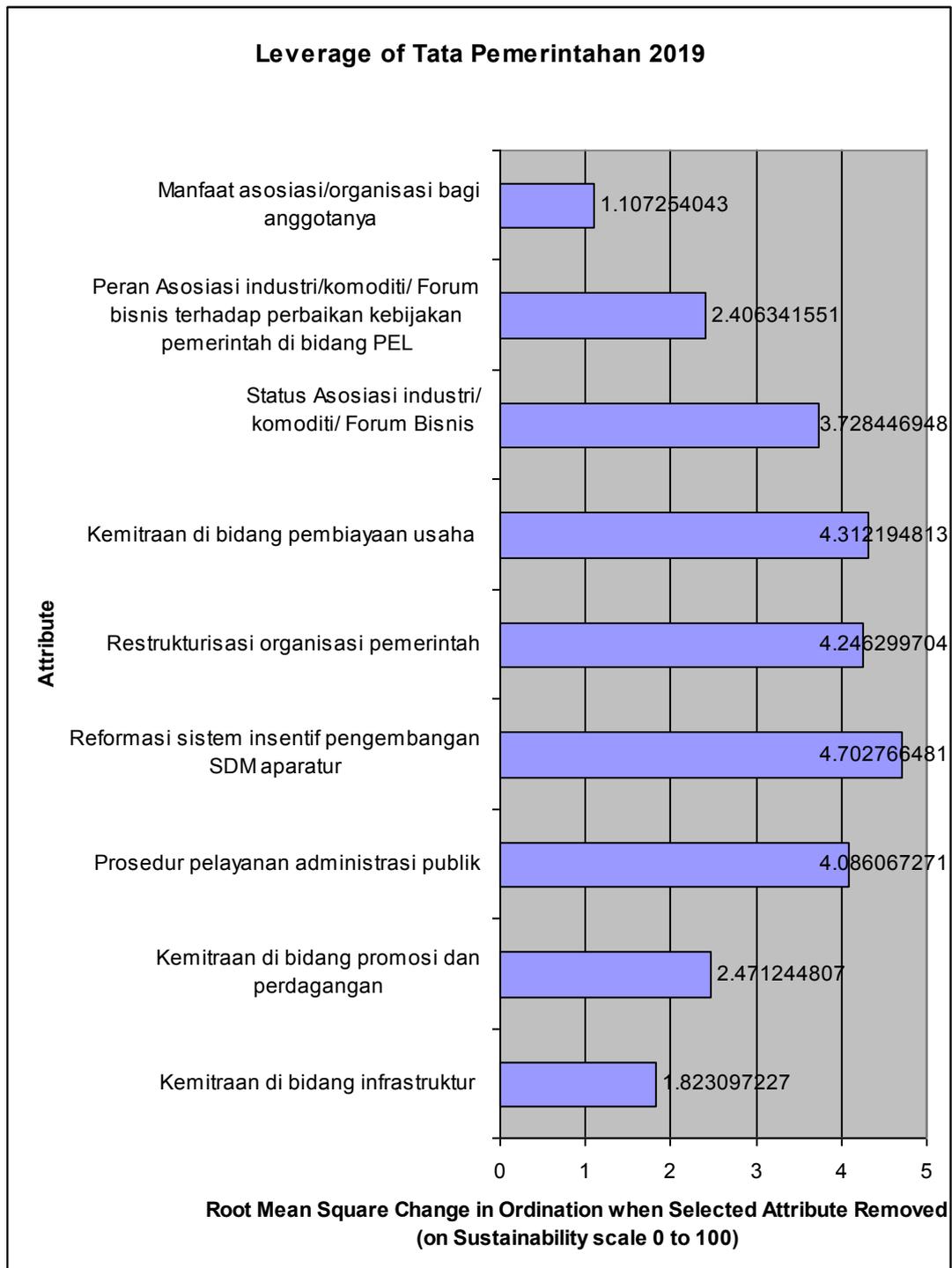
5. DIMENSI TATA PEMERINTAHAN

Jika pada tahun 2015, status dimensi tata pemerintahan dalam kajian PEL di Kota Surakarta memiliki nilai indeks sebesar 61,24, maka pada tahun 2019 meningkat sebesar 7,23 poin menjadi 68,47 poin. Hasil ini menunjukkan nilai tata pemerintahan berada dalam kondisi **Cukup baik**. Secara grafis nilai indeks Tata Pemerintahan disajikan pada gambar V.16.



Gambar V.16. Nilai indeks dimensi Tata Pemerintahan di Kota Surakarta 2019

Faktor Pengungkit (*leverage factor*) utama dari dimensi Tata Pemerintahan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta yang diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut: (1) Reformasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur (2) Kemitraan di bidang pembiayaan bidang usaha (pembiayaan UKM dan IKM) (3) Restrukturisasi organisasi Pemerintahan dan (4) Prosedur pelayanan publik. Secara grafis nilai indeks dimensi Tata Pemerintahan dapat dilihat pada Surakarta secara rinci disajikan pada gambar V.17.



Gambar V.17. Faktor Pengungkit dimensi Tata Pemerintahan tahun 2019

Implementasi sistem insentif pengembangan SDM aparatur saat ini telah mulai berjalan di Pemkot Surakarta, dimana sistem insentif ini didasarkan atas evaluasi (laporan) kinerja capaian yang telah dilakukan oleh ASN di lingkungan pemerintahan kota Surakarta. Menurut UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan Pasal 76 Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Dari Undang-undang ini jelas disebutkan bahwa Kinerja ASN merupakan hasil kerja yang konkrit, dapat diamati, dan dapat diukur secara objektif, serta harus mempertimbangkan target, capaian, hasil, dan manfaat yang telah dicapai.

Peraturan ini menjadi acuan penting bahwa pembuatan rencana program OPD terkait PEL harus sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak manfaat yang lebih luas di masyarakat. Karena itu perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan masukan partisipatif dari masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah penetapan target (sasaran) program dan hasil yang ingin dicapai harus dapat terukur dengan jelas dan konkret. Evaluasi kinerja harus dilakukan satu tahun sekali sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surakarta No 8,41.1/ 173 tahun 2019 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Faktor pengungkit lainnya yang perlu terus ditingkatkan adalah kemitraan di bidang pembiayaan bidang usaha (pembiayaan UKM dan IKM). Berdasarkan beberapa kajian tentang hambatan penyaluran kredit mikro ke UKM / IKM antara lain:

- Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit
- Perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha;
- Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi;
- Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

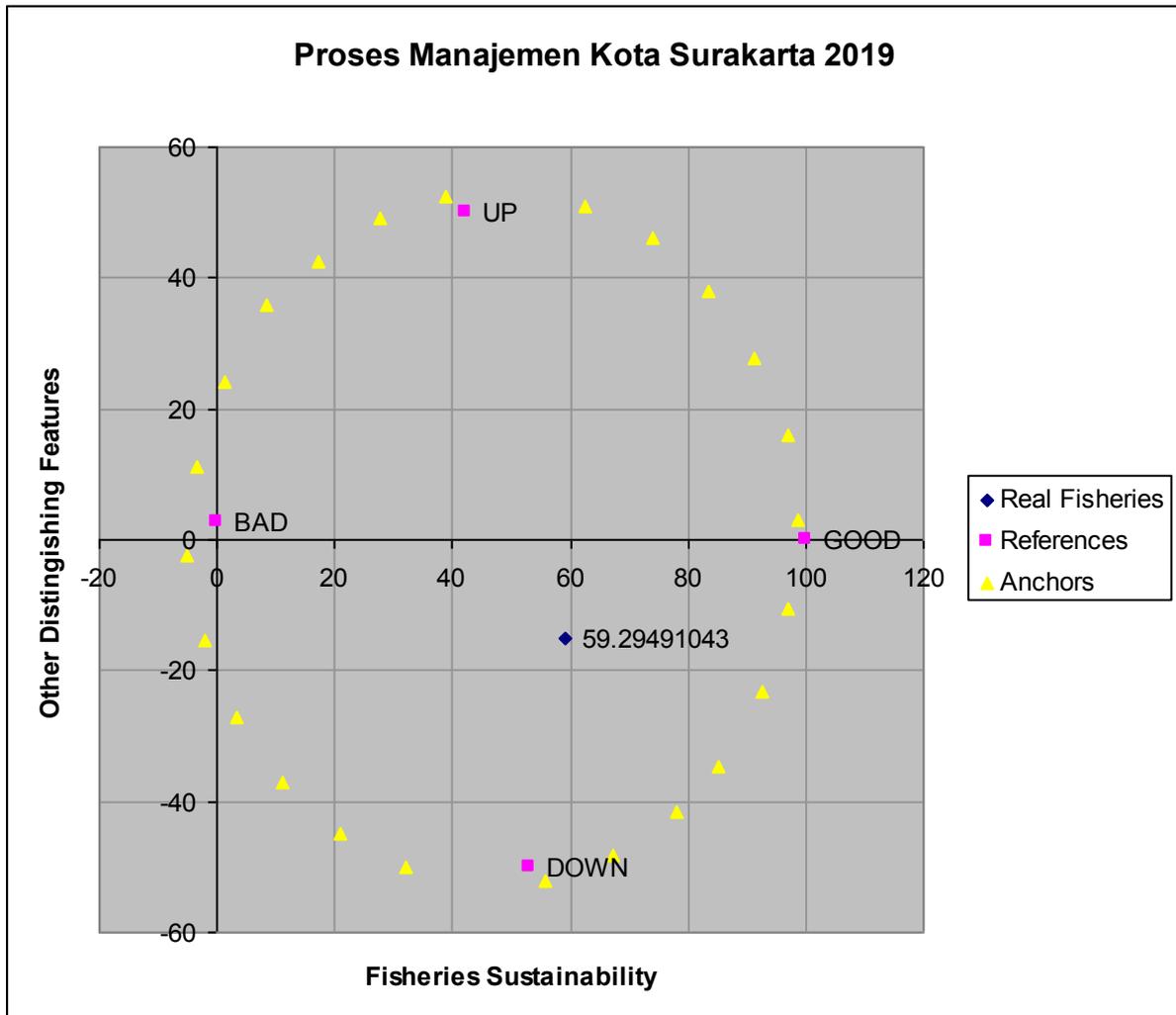
Terkait peningkatan peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM atau *microfinance*) dan Layanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), keberadaan LKM sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitarnya untuk keperluan konsumtif maupun untuk usaha produktif yang relatif tidak bisa dijangkau lembaga keuangan formal. Lembaga keuangan mikro formal terdiri dari bank seperti Bank Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI unit dan non bank seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit

Simpan Pinjam (USP) Koperasi/ KUD, dan Pegadaian. Adapun lembaga keuangan mikro non formal antara lain berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), *Baitul Maal wa Tanwil* (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Mandiri (LPEM), dan Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UESDP). Pengembangan LKM efektif bagi pelayanan permodalan UMKM karena beberapa merupakan sistem pembiayaan *grass root*, secara fisik dekat dengan nasabah sehingga benar-benar memberikan kemudahan, kecepatan pelayanan, dan kemudahan dalam pengawasan. Namun pengembangan LKM menghadapi beberapa permasalahan seperti terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, manajemen, permodalan, masih kurangnya kepercayaan masyarakat, lemahnya jaringan (*networking*) dan inovasi di bidang pemasaran, terbatasnya teknologi informasi yang dimiliki, sistem dan prosedur operasional yang belum mapan, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari otoritas yang berwenang. Untuk mengatasi sebagian masalah ini program perkuatan permodalan pola dana bergulir melalui lembaga keuangan mikro (KSP/USP koperasi) yang dilaksanakan Kementerian Negara Koperasi dan UKM masih dilanjutkan di masa mendatang.

6. DIMENSI PROSES MANAJEMEN

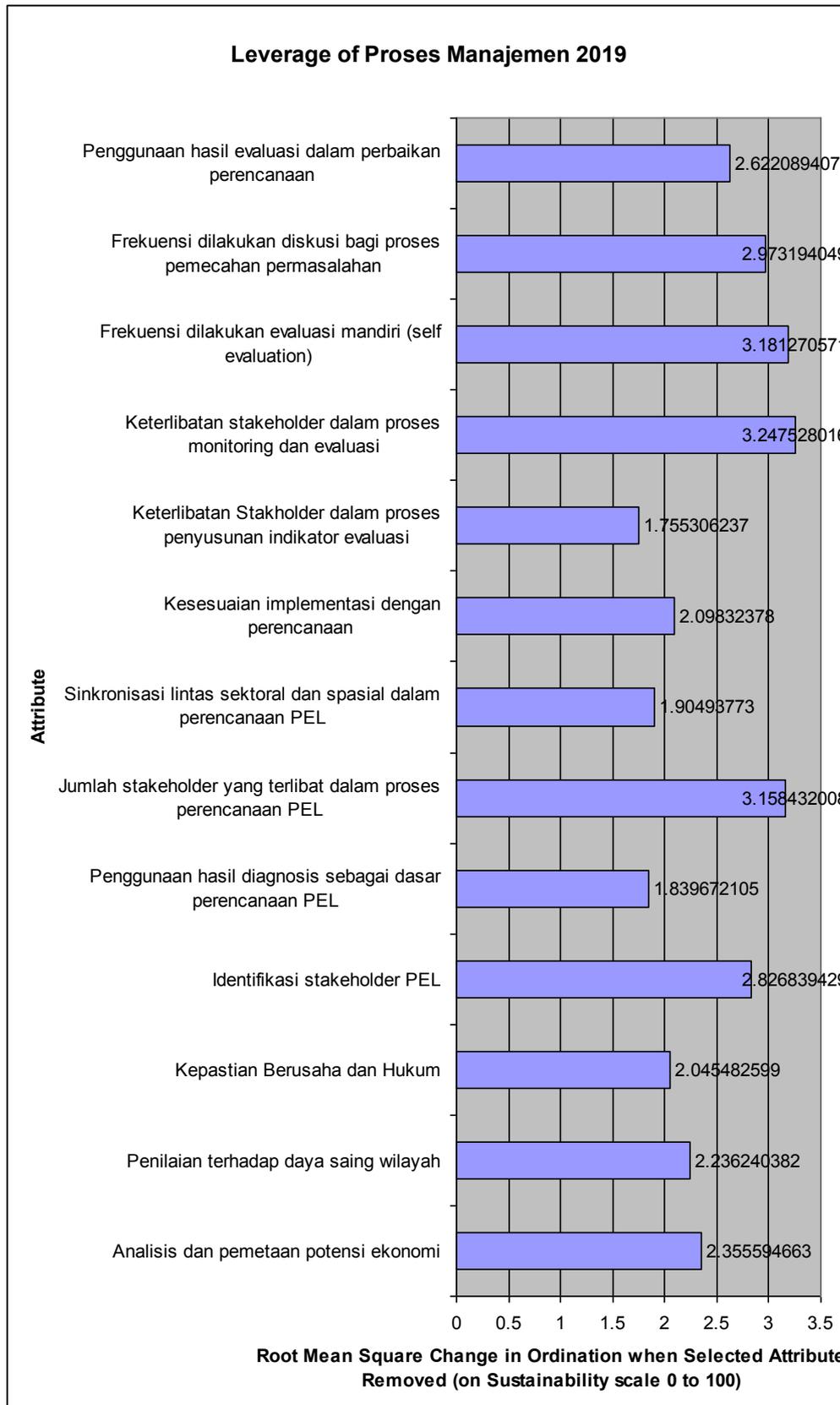
Seperti dijelaskan di pendahuluan, Konsep PEL adalah konsep pembangunan ekonomi lokal dengan melibatkan masyarakat tidak hanya dijadikan objek saja tetapi juga subjek dalam pembangunan ekonomi, sehingga dapat bersama-sama mengambil keputusan terhadap apa yang sebaiknya mereka lakukan terhadap permasalahan mereka dan lingkungan tempat usaha.

Pada tahun 2015, dimensi Proses Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta berada memiliki dengan skor nilai indeks sebesar 53,25 atau berada sedikit di atas angka 50. Maka pada tahun 2019 hasil penilaian dari para *stakeholder* saat ini terdapat peningkatan sebesar 5,95 atau pada posisi nilai indeks sebesar 59,2. Hal ini berarti bahwa dimensi Proses Manajemen terjadi peningkatan status kondisi cukup baik. Secara grafis nilai indeks Proses Manajemen disajikan pada gambar V.18.



Gambar V.18. Nilai indeks dimensi Proses Manajemen di Kota Surakarta

Faktor Pengungkit (*leverage factor*) utama dari dimensi Proses Manajemen dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta yang diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut : (1) Keterlibatan *Stakeholder* dalam proses monitoring dan evaluasi; (2) Frekuensi dilakukan evaluasi mandiri (*self evaluation*); (3) Jumlah stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan PEL dan (4) Frekuensi dilakukan diskusi bagi proses pemecahan permasalahan. Berikut ini gambar Faktor Pengungkit dimensi Proses Manajemen di Kota Surakarta 2019:



Gambar V.19.. Faktor Pengungkit dimensi Proses Manajemen di Kota Surakarta 2019

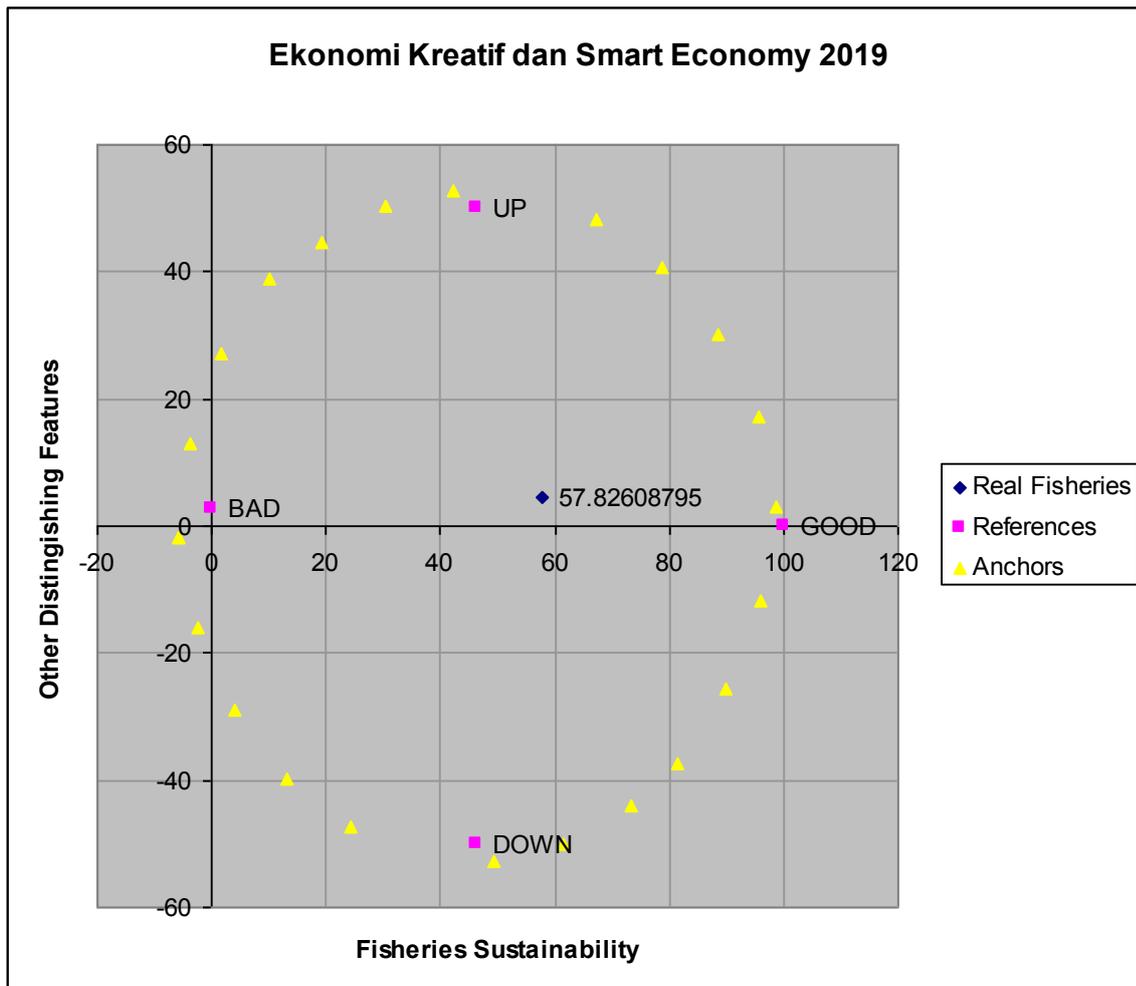
Keterlibatan *stakeholder* (masyarakat) dalam pembangunan bukan saja pada tahap perencanaan PEL (identifikasi masalah dan penentuan rencana aksi bersama), tetapi

stakeholder juga harus dilibatkan hingga pada tahap proses monitoring dan evaluasi kegiatan program yang disusun Pemkot Surakarta. Dengan keterlibatan masyarakat atau *stakeholder* sebagai penentu, subjek dan keterlibatan peran utama dalam pembangunan ekonomi lokal (aksi program bersama) ini semua dalam rangka proses belajar memahami kebutuhan masyarakat dan menyadari dinamika partisipasi masyarakat dalam pembedaan ekonomi lokal.

Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL ini dapat dilakukan pada awal proses pengkajian perencanaan (*ex-ante*), di tengah ketika program sedang berjalan (*on-going*) dan di akhir program sudah dilaksanakan (*ex-post*). Salah satu cara evaluasi masyarakat menggunakan RALED terhadap tujuh dimensi PEL dilakukan untuk menggali informasi terkait indikator proses dan hasil dari suatu kegiatan. Evaluasi juga untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan program yang telah disepakati bersama masyarakat. Biasanya evaluasi dikembangkan untuk mengukur aspek proses dan hasil/dampak dari program. Proses penelusuran sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sendiri yang merasakan manfaat dari program yang dikembangkan bersama pemerintah, LSM atau lembaga lain mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pendokumentasian.

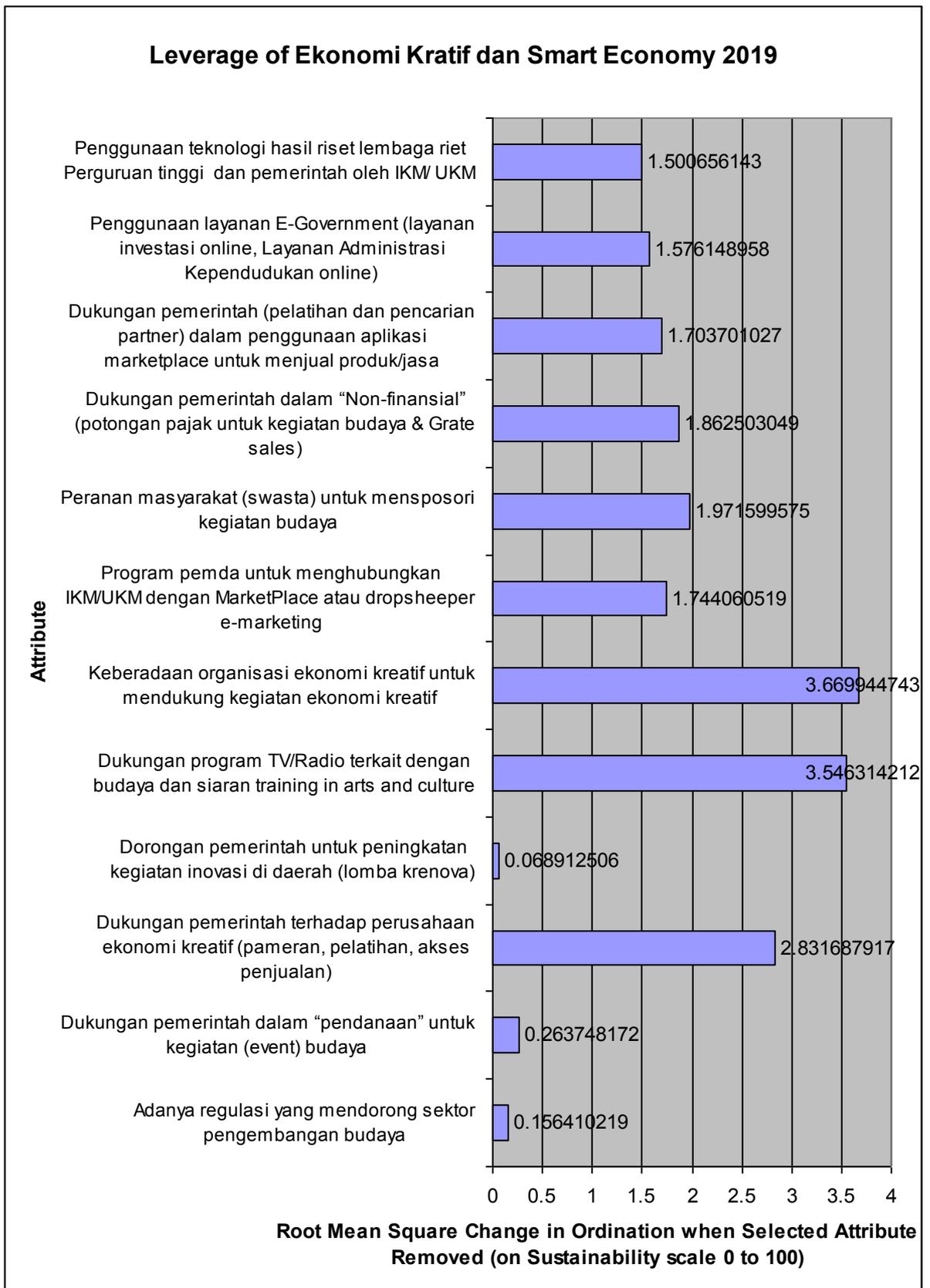
7. DIMENSI EKONOMI KREATIF DAN SMART ECONOMY

Atas permintaan dari *stakeholder* Bappeda Kota Surakarta menambah satu dimensi PEL yang ikatkan dengan ekonomi kreatif dan *smart economy*. Menggunakan software RALED PEL yang dimodifikasi nama kriteria dan *set-up* nilai-nilai pada RALED maka hasil simulasi menghasilkan nilai PEL dimensi ini sebesar 57,8 Point. Point ini didapatkan dari hasil perhitungan terhadap data yang masuk dari 37 responden pengusaha, OPD terkait dan pengurus FEDEP lainnya. Berikut ini hasil pemetaan skor dimensi ekonomi kreatif dan *smart economy*. Hasil ini menunjukkan cukup baik.



Gambar V.20. Nilai indeks dimensi ekonomi kreatif dan smart economy di Kota Surakarta 2019

Faktor Pengungkit (*leverage factor*) utama dari dimensi Ekonomi kreatif dan *smart economy* dalam pengembangan ekonomi lokal di Kota Surakarta yang diurutkan berdasarkan prioritasnya adalah sebagai berikut :



Gambar V.21. Faktor Pengungkit dimensi ekonomi kreatif dan *smart economy*

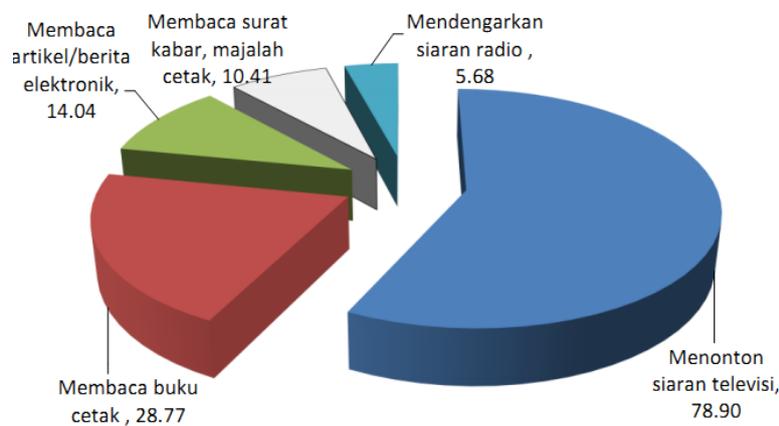
Faktor pendorong ekonomi kreatif dan *smart economy* di Kota Surakarta antara lain:

- a. Keberadaan organisasi ekonomi kreatif untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif
- b. Dukungan program TV/Radio terkait dengan acara kebudayaan, dan acara siaran *training in arts and culture*
- c. Dukungan pemerintah terhadap perusahaan ekonomi kreatif (pameran, pelatihan, akses penjualan)

Menurut Rahardjo (2002), pada mulanya organisasi yang ada dimasyarakat adalah berbentuk organisasi tradisional seperti paguyuban atau kelompok sosial dimasyarakat dengan ciri utama adalah gotong royong untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan disekitar tempat tinggal. Setelah Bung Hatta berkunjung ke negara-negara Skandinavia dan melihat organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat, maka munculah ide untuk mengembangkan organisasi ekonomi tetapi tetap mendasarkan pada azas utama organisasi tradisional yaitu "gotong royong". Sehingga pemerintah saat orde lama telah menggagas koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang cocok dimasyarakat karena tidak meninggalkan azas gotong royong (suara anggota bukan kekuatan modal). Azas yang ditambahkan dalam koperasi selain gotong royong adalah rasional dan kompetitif (daya saing) yaitu ciri dari ekonomi pasar. Menurut Bung Hatta, Koperasi adalah sebuah lembaga *self-help* lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.

Ekonomi kreatif di Kota Surakarta cukup menarik karena di dukung oleh banyak paguyuban-paguyuban industri kreatif (organisasi sosial) seperti sentra batik kauman, sentra batik Laweyan, sentra kain perca, sentra sangkar burung, sentra mebel, sentra blangkon dan sentra letter. Paguyuban ini lebih banyak bergerak di bidang sosial untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Hanya beberapa paguyuban yang mengembangkan organisasi ekonomi kreatif dan sukses memberikan manfaat nyata bagi anggota untuk membantu meningkatkan penjualan produk. Seperti paguyuban sentra batik Kauman mendirikan koperasi batik kauman dan menjual produk anggota di Showber (showroom bersama). Kedepan Pemkot Surakarta akan menjadikan model ini untuk mendorong paguyuban sentra industri IKM/UKM untuk mendirikan kopeasi (legalitas) dan dikelola oleh tenaga profesional untuk membantu meningkatkan penjualan para anggotanya. Dinas Koperasi dan UMKM akan terus mendorong agar koperasi yang telah didirikan di sentra-sentra industri harus dikembangkan menjadi unit usaha yang kokoh, bisa bekerja dalam sistem pasar dengan cara menerapkan prinsip efisiensi dan kreatif.

Salah satu indikator ekonomi kreatif adalah adanya tingkat partisipasi kebudayaan pada aktivitas kebudayaan yang bersifat home-based (cultured'apartment) merujuk pada peranan aktif TV, radio dan berita online (internet) untuk menyebarkan karya seni dan kreativitas karya budaya agar dapat dinikmati dan dipresiasi oleh masyarakat luas bahkan seluruh dunia. Dengan adanya apresiasi yang tinggi akan mendorong pihak swasta untuk terlibat langsung dalam membangun dan membiayai kegiatan budaya dan ekonomi kreatif. Dari buku Laporan Analisis Partisipasi Kebudayaan, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2016. Menonton siaran televisi merupakan tontonan yang sangat menarik dibandingkan aktivitas budaya lainnya seperti mendengarkan siaran radio, membaca surat kabar/koran atau majalah cetak, membaca buku cetak, dan membaca artikel/berita elektronik.



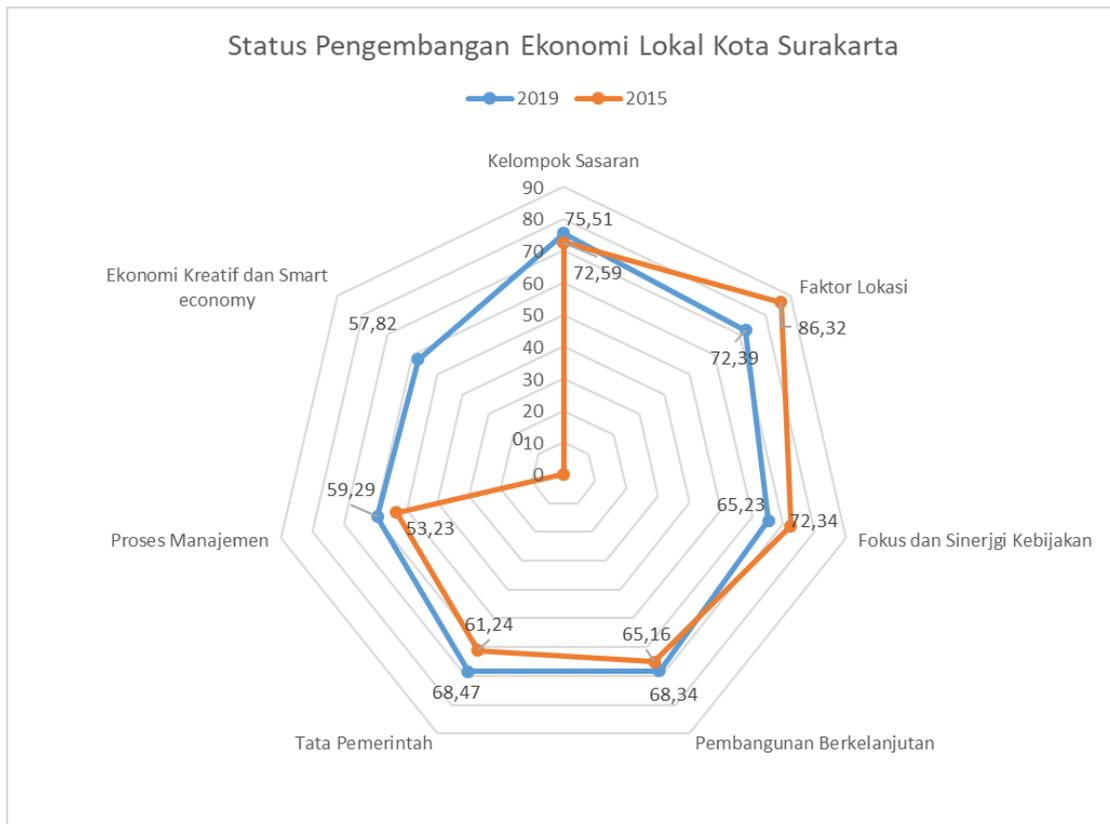
Gambar V.22. Rata-rata Persentase Aktivitas Budaya Responden Di Dalam Rumah (jumlah hari dalam tiga bulan terakhir)

(Sumber= Laporan Analisis Partisipasi Kebudayaan, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2016)

Kedepan Pemkot Surakarta perlu melibatkan lebih banyak lagi stasiun TV lokal maupun nasional untuk menyebarkan aktivitas budaya dan memarkan hasil karya industri kreatif di Kota Surakarta.

8. STATUS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA SURAKARTA

Hasil perhitungan menggunakan RALEL selanjutnya dibuatkan gambar diagram layang-layang, dapat disimpulkan bahwa ketujuh dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan ekonomi kreatif di Kota Surakarta berada pada kondisi cukup baik, dimana terdapat semua dimensi lainnya memiliki nilai antara 50 hingga 80.



Gambar V.23. Status Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta

Berdasarkan data tersebut, dimensi Ekonomi Kreatif dan *Smart economy* harus mendapatkan perhatian serius untuk dilakukan perbaikan karena memiliki skor paling rendah diantara dimensi PEL yang lain. Sedangkan dimensi yang perlu juga mendapat perhatian untuk segera diperbaiki adalah faktor lokasi dimana faktor ini mengalami penurunan signifikan dari 86,32 point menjadi 72,39 poin. Berdasarkan hasil RALED dikemukakan ada beberapa faktor penggerak yang perlu menjadi fokus atau prioritas pertama adalah menyelesaikan masalah upah tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Berdasarkan hasil FGD dengan beberapa pengusaha dan OPD yang terkait, disebutkan bahwa penduduk Kota Surakarta sebenarnya banyak yang belum mempunyai pekerjaan atau bekerja hanya paruh waktu. Sementara itu banyak pelaku bisnis lebih memilih tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Surakarta dengan alasan upah lebih mudah dan etos kerja lebih tinggi. Kenaikan nilai upah yang tinggi di Kota Surakarta belum diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan sikap mental profesional dari para pemuda / penduduk kota Surakarta.

Faktor lain yang menjadi fokus perbaikan adalah infrastruktur energi listrik yang sering mengalami gangguan operasi. Pemerintah daerah perlu memikirkan, mendorong, mensosialisasikan dan memberi contoh penggunaan energi alternatif seperti energi matahari.

Sosialisasi ini dapat dimulai dari tindakan nyata dari beberapa kantor Pemda untuk menggunakan sel surya untuk berbagai keperluan seperti lampu penerangan maupun operasional di kantor seperti mesin fotocopy dan AC

Dari hasil analisis RALED yang didukung dengan diagram layang-layang, dapat disimpulkan bahwa lima dari enam dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota Surakarta berada pada kondisi atau status cukup baik, dimana terdapat ketujuh dimensi memiliki nilai antara 50 hingga 80. Status PEL Kota Surakarta adalah **Cukup baik** dengan nilai total (setelah dikalikan dengan bobot) sebesar **68,14**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.21. Status PEL Kota Surakarta

No	Aspek Dimensi PEL	Skor Dimensi PEL	Bobot	Nilai Indeks
1	Kelompok Sasaran	75,51	0,272	20,54
2	Faktor Lokasi	72,39	0,212	15,35
3	Fokus dan Sinerji Kebijakan	65,23	0,046	3,00
4	Pembangunan Berkelanjutan	68,34	0,129	8,82
5	Tata Pemerintah	68,47	0,055	3,77
6	Proses Manajemen	59,29	0,095	5,63
7	Ekonomi Kreatif dan Smart economy	57,82	0,191	11,04
Total Skor PEL				68,14

Untuk dimensi yang paling rendah dan perlu diperbaiki adalah dimensi ekonomi kreatif dan *smart economy*. Dari hasil analisis dimensi ini memberikan alternatif perbaikan dimulai dari adanya upaya peningkatan jumlah Keberadaan organisasi ekonomi kreatif untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif, melalui pemberdayaan koperasi (organisasi ekonomi) yang ada di sentra-sentra ekonomi kreatif seperti sentra batik Laweyan, sentra kain perca, sentra blangkon, dan sentra mebel (kerajinan kayu). Langkah berikutnya mengajak lebih aktif dukungan program TV/Radio terkait dengan acara kebudayaan, dan acara siaran *training in arts and culture*. Dan tidak lupa meningkatkan dukungan pemerintah terhadap perusahaan ekonomi kreatif melalui pameran, pelatihan, dan akses penjualan (*e-commerce*).

BAB VI

RENCANA AKSI PEL KOTA SURAKARTA

Setelah melakukan analisis dan identifikasi faktor pengungkit PEL menggunakan RALED, maka tahap berikutnya adalah mencari usulan rencana aksi PEL Kota Surakarta. Rencana aksi ini akan dikaitkan dengan indikator output dan pihak penanggung jawab pelaksanaan rencana aksi tersebut. Pada bab ini akan dilanjutkan rencana aksi beberapa isu utama yang akan dibahas pada laporan kinerja PEL Kota Surakarta tahun 2019

VI.1. RENCANA AKSI UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI dan DIMENSI KELOMPOK SASARAN

Dari analisis data pada bab V sebelumnya, terdapat isu utama dikaitkan dengan investasi yaitu isu terjadinya penurunan investasi di sektor industri kecil dan menengah, dan mahal nya upah para pekerja dari kota Surakarta dibanding kabupaten lain. Dari beberapa FGD diungkapkan beberapa usulan program antara lain:

- Mempromosikan Kampung Wisata Batik Kauman dan Laweyan menjadi pusat tujuan wisata nasional dan asing. Menciptakan sentra industri wisata baru seperti kampung industri blangkon
- Dinas terkait bekerja sama dengan Ketua RW, Ketua Sentra Industri dan Perguruan Tinggi untuk menjaring pemuda Surakarta yang memiliki kemauan kuat untuk berwirausaha. Mendatangkan beberapa praktisi langsung dari pengusaha sukses di Solo Raya sebagai mentor utama bagi calon-calon pengusaha muda.
- Pusat layanan investasi masih perlu terus diperbaiki dengan memberikan layanan investasi yang disertai layanan konsultasi investasi (mengintegrasikan peranan PLUT/ konsultan IKM dan UKM untuk jasa konsultasi perbaikan kualitas proses produksi dan kualitas produk dan keuangan)

Tabel VI.1. Rencana Aksi Terkait Penurunan Investasi di Sektor Industri

No	Isu PEL dan Faktor pengungkit PEL	Program	Output		OPD
			Indikator	Satuan	
1	Isu terjadi penurunan investasi di sektor industri	Mempromosikan di level internasional sentra Kampung wisata batik Kauman dan Laweyan menjadi pusat tujuan wisata nasional dan asing	Jumlah sentra yang ikut pameran	%	Disnakerprin Disdag
		Menciptakan sentra industri wisata baru : Kampung permata Jayengan dan sentra Blangkon sebagai kawasan wisata belanja, sejarah, budaya dan edukasi industri kecil	Jumlah sentra baru	Unit sentra	DiskopUKM Disnakerprin Dispar
		Penguatan dan pelatihan wirausaha baru dengan Mendatangkan beberapa praktisi langsung dari pengusaha sukses di Solo Raya sebagai mentor utama bagi calon-calon pengusaha muda.	Jumlah peserta	Orang	DiskopUKM Disnakerprin Disdag
		Pusat layanan investasi dengan memberikan layanan investasi yang disertai layanan konsultasi investasi	Jumlah layanan yang diintegrasikan	Unit layanan	DPMPTSP DiskopUKM

VI.2. RENCANA AKSI UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN (DIMENSI KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN)

Dari analisis pada bab sebelumnya, terdapat beberapa penyebab program pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan yang dianggap kurang efektif. Isu kemiskinan dan pengangguran adalah isu yang ada di Dimensi kesinergian dan fokus kebijakan. Dari Hasil FGD PEL terkait kemiskinan dan pengangguran di Kota Surakarta, ada beberapa akar masalah utama yaitu:

1. Kualitas sumberdaya manusia (tingkat pendidikan) yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.
2. Rendahnya akses dalam mendapatkan modal kerja (IKM)
3. Derasnya penduduk urban (luar kota Surakarta) dalam kehidupan ekonomi kota yang mampu menyaingi (menyingkirkan) tenaga kerja asli penduduk kota. Sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi jasa dan industri yang tinggi tidak mampu menyerap tenaga kerja penduduk miskin perkotaan tetapi malah mengundang penduduk urban dari daerah lain

Karena itu beberapa *stakeholder* dalam FGD tersebut memberikan beberapa usulan program antara lain:

- Pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan dasar.
- Penentuan kantong kemiskinan berbasis RW (penduduk paling miskin). Selanjutnya kantong kemiskinan ini diangkat ekonominya dengan melihat potensi usaha sejenis (atau semacam sentra industri atau sentra usaha lainnya). Selanjutnya melalui kesamaan aktivitas ekonomi dibentuk paguyuban sentra dan koperasi sentra. Dan Pemkot Surakarta dapat memberikan bantuan peralatan dan pemasaran untuk meningkatkan produktivitas produksi dan kualitas produk yang dihasilkan
- Penguatan paguyuban usaha sejenis melalui pendampingan yang intensif dan monitoring yang terus menerus dengan melibatkan tim penanggulangan kemiskinan kelurahan (TPKK) atau perangkat kelurahan seperti ketua RW dan karang taruna.
- Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin. Pelatihan bagi para pemuda di daerah kawasan miskin melalui pemanfaatan Dua pusat pelatihan tenaga kerja yang profesional yang (AK Tekstil Surakarta dan *Solo Techno park*)

Tabel VI.2. Rencana Aksi Terkait Isu Kemiskinan dan Pengangguran

No	Isu PEL dan Faktor pengungkit PEL	Program	Output		OPD
			Indikator	Satuan	
2	Isu Kemiskinan dan Pengangguran	<p>Strategi 1 : Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar:</p> <p>a. Sembako murah langsung di kantong2 miskin (bukan di pasar2 tradisional)</p> <p>b. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)</p> <p>c. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p>	<p>Jumlah KK</p> <p>Jumlah orang (murid)</p> <p>Jumlah orang</p>	orang	<p>Disdag</p> <p>Dinas kesehatan</p> <p>Dinas pendidikan</p>
		<p>Strategi 2 : Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin melalui langkah-langkah sebagai berikut :</p> <p>a. Penentuan kantong kemiskinan berbasis RW (penduduk paling miskin)</p> <p>b. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah ada di daerah tersebut (kain perca, makanan jajan pasar, sangkar burung, blangkon, shuttlecock dll) peningkatan produktivitas melalui pemberian mesin jahit, alat finishing (compressor dan cat semprot), alat potong bulu, dll</p> <p>c. Pembentukan paguyuban usaha sejenis agar memudahkan pembinaan dan monitoring (kebutuhan skill, peralatan, pemodal, dan pemasaran). Paguyuban diarahkan untuk</p>	<p>No RW/ kelurahan</p> <p>Jumlah alat produksi dan Harga barang</p> <p>Jumlah paguyuban</p>	<p>jumlah RW</p> <p>Buah alat & Rp harga</p> <p>Unit</p>	<p>Bappeda</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas pendidikan</p> <p>DiskopUKM</p> <p>Disnakerprin</p>

	<p>diorganisir kepada para pemuda miskin atau kelompok ibu-ibu miskin</p> <p>d. Harus ada pendampingan yang intensif = yang paling efektif mengaktifkan kembali TPKK (Tim Penanggulangan kemiskinan Kelurahan) atau pemuda desa (Karang taruna dan RW untuk pengawasan dan pendampingan bekerja sama dengan OPD terkait)</p> <p>e. Pembentukan koperasi berbadan hukum untuk pelayanan simpan pinjam dan penyaluran KUR, dengan skema subsidi bunga 7 persen melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan kerjasama Bank Solo.</p> <p>f. Mendorong penciptaan merek dan standar mutu produk (PIRT, Halal, dan SNI untuk shuttle cock)</p>	<p>Jumlah Tim pendamping</p> <p>Jumlah koperasi berbadan hukum dan memberikan layanan simpan pinjam</p> <p>Jumlah IKM</p>	<p>Orang (anggota TPKK)</p> <p>Unit</p> <p>Buah</p>	<p>Bappeda Dinas Sosial DiskopUKM Disnakerprin</p>
	<p>g. Pelatihan melalui pemanfaatan Dua pusat pelatihan tenaga kerja yang profesional yang (AK Tekstil Surakarta dan Solo Techno-park); masing-masing kelurahan mengajak tokoh-tokoh sukses di bidang ekonomi yang berasal dari daerah disekitarnya untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi</p>	<p>Jumlah peserta penduduk Surakarta</p>	<p>Orang</p>	<p>Bappeda STP AK Tekstil</p>

VI.3. RENCANA AKSI PADA BIDANG EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA

Isu utama dari bidang ini adalah revitalisasi beberapa faktor ekonomi kreatif dan isu rendahnya kinerja pariwisata di bandingkan daerah lain. FGD yang dilakukan memberikan beberapa usulan berkenaan bidang ekonomi kreatif dan peningkatan pariwisata antara lain:

- Penguatan organisasi ekonomi kreatif dengan mendorong paguyuban mendirikan koperasi IKM sentra (yang sudah berbadan hukum/legalitas) dan dikelola oleh tenaga profesional untuk membantu meningkatkan penjualan para anggotanya.
- Pemkot Surakarta mulai melibatkan lebih banyak lagi stasiun TV lokal maupun nasional untuk menyebarluaskan aktivitas budaya dan memamerkan hasil karya industri kreatif di Kota Surakarta.
- Dukungan pemerintah untuk mengangkat beberapa UKM/IKM yang terpilih yang memiliki potensial untuk dikembangkan dan memiliki visi untuk maju.
- Pengoptimalan peranan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif dengan luas 5000 m2 yang berada di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon. Dimana tujuan awal adalah menjadi salah satu pusat pengembangan industri kreatif. Dimana fungsi tujuan sentra ini antara lain= tempat produksi (kain batik cap), menjadi pusat pembelajaran bagi pengunjung yang datang dan tempat penjualan produk – produk IKM industri kreatif.
- Dengan adanya jalan Tol Trans Jawa, Pemerintah mengajak bersama asosiasi wisata (ASITA, PHRI, dan paguyuban sentra IKM) untuk mengembangkan paket wisata dengan konsep one day tour atau tur satu hari atau dua hari (Sabtu dan Minggu) dengan menyiapkan beberapa rute wisata yang menarik untuk turis lokal maupun asing.
- Pemkot Surakarta juga perlu melakukan kajian ilmiah Pengembangan jalan yang dapat dinikmati turis (hiburan dan makanan) di sore dan malam hari antara Kraton Kasunanan hingga Keraton Mangkunegara. Sehingga dapat menyamai keramaian Jalan Malioboro Yogya atau Kuta di Bali.
- Revitalisasi beberapa pusat budaya Keraton Mangkunegara sebagai pusat budaya Jawa dengan mementaskan seni dan budaya seperti drama, tari-tarian, fashion-show, pameran lukisan maupun seni kontemporer lainnya.
- Mengusulkan rute bus Damri yang melewati beberapa objek wisata (sentra IKM), keraton museum untuk meningkatkan minat wisatawan mengunjungi objek wisata budaya.
- Revitalisasi fungsi dan peran ruang kreatif, seperti Solo techno-park, AKA Tekstil, GWO Sriwedari, sebagai ruang ekonomi kreatif yang dapat memaksimalkan kegiatan komunitas ekonomi kreatif.

Tabel VI.3. Rencana Aksi Terkait Isu PEL dan Faktor Pengungkit PEL

No	Isu PEL dan Faktor pengungkit PEL	Program	Output		OPD
			Indikator	Satuan	
3	Isu Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata (Kinerja pariwisata Kota Surakarta masih jauh tertinggal dari kota wisata lain)	Peningkatan Keberadaan organisasi ekonomi kreatif untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Pemkot mendorong paguyuban sentra industri IKM/UKM untuk mendirikan koperasi (legalitas) dan dikelola oleh tenaga profesional untuk membantu meningkatkan penjualan para anggotanya.	Unit koperasi di sentra industri kreatif	Unit koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
		Pemkot Surakarta melalui OPD terkait perlu melibatkan lebih banyak lagi stasiun TV lokal maupun nasional untuk menyebarkan aktivitas budaya dan memamerkan hasil karya industri kreatif di Kota Surakarta.	Jumlah acara siaran dan jam tayang di level regional dan nasional	Buah dan Menit acara	Diskominfo Bappeda
		Dukungan pemerintah terhadap perusahaan ekonomi kreatif (pameran, pelatihan, akses penjualan). OPD untuk mengangkat beberapa UKM/IKM yang terpilih yang memiliki potensial untuk dikembangkan dan memiliki visi untuk maju	Jumlah UKM / IKM Kreatif	Unit	DiskopUKM Disnakerprin Disdag
		Pengotimalan peranan Sentra Industri Kreatif di semanggi	Jumlah kunjungan dan belajar ekonomi kreatif	Orang	Disnakerprin

		Pengembangan paket wisata dengan konsep one day tour atau tur satu hari atau dua hari (sabtu dan minggu)	Jumlah tour baru	buah	BAPPPEDA Dispar ASITA, PHRI, dan paguyuban sentra
		Kajian ilmiah Pengembangan jalan yang dapat dinikmati turis (hiburan dan makanan) di sore dan malam hari antara Kraton Kasunanan hingga Keraton Mangkunegara.	Laporan kajian	Buah	Bappeda Dispar
		Revitalisasi beberapa pusat budaya Keraton Mangkunegara sebagai pusat budaya Jawa	Jumlah event	Buah	Bappeda Dispar
		Mengusulkan rute bus Damri yang melewati beberapa objek wisata (sentra IKM), keraton museum untuk meningkatkan minat wisatawan	Jumlah rute damri	Buah	Bappeda Dishub
		Revitalisasi fungsi dan peran ruang kreatif, seperti Solo techno-park, AKA Tekstil, GWO Sriwedari, sebagai ruang ekonomi kreatif	Jumlah event	Buah	Bappeda Dispar

VI.4. RENCANA AKSI PADA DIMENSI LOKASI PELAKU USAHA (UKM/IKM)

Isu utama dari bidang ini adalah kenaikan nilai upah yang tinggi di Kota Surakarta belum diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan sikap mental profesional, dan infrastruktur energi listrik yang sering mengalami gangguan operasi. FGD yang dilakukan memberikan beberapa usulan berkenaan bidang Pelaku usaha antara lain :

- Pemkot Surakarta perlu melakukan kajian komprehensif terkait para pekerja, :
 - Memberikan subsidi transportasi bagi para pekerja
 - Pemberian subsidi untuk rumah susun atau rumah sewa bagi para pekerja
 - Pembelian sembako murah melalui koperasi pekerja (anggota),
 - Pemberian subsidi kesehatan mengingat iuran BPJS bagi para pekerja
 - Pemberian subsidi pendidikan kepada anak pekerja
- Perlunya pelatihan peningkatan ketrampilan para pekerja dan metal (produktif) untuk mengimbangi kenaikan nilai upah yang tinggi di Kota Surakarta.
- Masalah infrastruktur energi listrik yang sering mengalami gangguan operasi. Pemot Surakarta perlu mendorong, mensosialisasikan dan memberi contoh penggunaan energi alternatif seperti energi matahari, penggunaan energi surya di kantor-kantor pemda

Tabel VI.4. Rencana Aksi Pada Dimensi Lokasi Pelaku Usaha (Ukm/Ikm)

No	Isu PEL dan Faktor pengungkit PEL	Program	Output		OPD
			Indikator	Satuan	
4	Dimensi faktor lokasi	Pelatihan para pekerja dan calon pekerja untuk peningkatan ketrampilan para pekerja dan metal (produktif) untuk mengimbangi kenaikan nilai upah yang tinggi di Kota Surakarta.	Pekerja	Orang	Dinas pendidikan Bappeda STP AK Tekstil
		infrastruktur energi listrik yang sering mengalami gangguan operasi. Pemerintah daerah perlu mensosialisasikan dan memberi contoh penggunaan energi alternatif seperti energi matahari (kantor Pemda untuk menggunakan sel surya untuk berbagai keperluan seperti lampu penerangan maupun operasional di kantor seperti mesin fotocopy dan AC)	OPD yang menerapkan energi ramah lingkungan	Unit OPD	BAPPPEDA
		Pemkot Surakarta perlu melakukan kajian yang komprehensif terhadap beberapa usulan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan subsidi (potongan harga hingga 50%) bagi para pekerja (“pemilik kartu pekerja” kota Surakarta) untuk angkutan bis kota (Damri batik). • Pemberian subsidi untuk rumah susun atau rumah sewa beberapa aset pemkot yang dijadikan rumah tinggal • Pembelian sembako murah melalui koperasi pekerja (anggota), • Pemberian subsidi kesehatan mengingat iuran BPJS • Pemberian subsidi pendidikan kepada anak pekerja melalui pemberian “ Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta / BPMKS” non tunai Siswa Winasis. 	Laporan Kajian	Buah	BAPPPEDA Dinas perhubungan Dinas perumahan Dinas perdagangan Dinas kesehatan Dinas pendidikan

VI.5. RENCANA AKSI PADA DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Isu utama pembangunan berkelanjutan adalah peranan masyarakat untuk mengatasi masalah limbah rumah tangga dan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan dan penduduk.

Beberapa usulan yang dapat diambil oleh Pemkot untuk mengaktifkan peranan masyarakat antara lain:

- Mengaktifkan kembali beberapa kelompok lingkungan hidup telah didirikan di masyarakat. melalui aktivitas bisnis ekonomi seperti pemeliharaan ikan (lele dan mujair), sayur mayur dan pengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos.
- Mendorong dan meningkatkan peranan perusahaan yang melakukan inovasi pengembangan produk ramah lingkungan (menggunakan bahan baku dan proses produksi ramah lingkungan) dan menciptakan pasar yang peduli produk ramah lingkungan.
- Terus mendorong dibangun beberapa sentra pengolahan limbah komunal di sentra industri dan daerah padat penduduk

Tabel VI.5. Rencana Aksi Pada Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

No	Isu PEL dan Faktor pengungkit PEL	Program	Output		OPD
			Indikator	Satuan	
5	Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah perusahaan yang melakukan inovasi pengembangan produk ramah lingkungan masih (bahan baku ramah lingkungan), mendorong IKM bekerja sama dg LPPM UNS untuk menyediakan pewarna alam sebagai bahan baku pewarna untuk batik.	Inovasi produk ramah lingkungan	Unit produk	BAPPPEDA STP
		Mengaktifkan kelompok lingkungan hidup telah didirikan di masyarakat, melalui aktivitas bisnis ekonomi seperti pemeliharaan ikan (lele dan mujair), sayur mayur dan pengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos. OPD dapat Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan pengolahan pangan mandiri meski lahan yang dimiliki terbatas.	Kelompok lingkungan hidup	Buah	Dinas Pertanian
		Membangun beberapa IPAL komunal di sentra industri dan daerah padat penduduk. Seperti pengolahan limbah tahu tempe di Serengan, Mojosongo dan Pucangsawit.	IPAL komunal	Unit	Dinas Lingkungan Hidup

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kota Surakarta Pemerintah Kota Surakarta merupakan hasil kajian terhadap beberapa indikator ekonomi dan beberapa isu terkait dengan Pengembangan Ekonomi Lokal. Pembuatan laporan ini merupakan satu rangkaian siklus pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal. Bappenas dalam pelaksanaan program PEL menekankan pada pendekatan partisipatif masyarakat dalam menilai dan menyusun rencana aksi.

Menyadari begitu luasnya program-program pembangunan ekonomi lokal yang harus dikaji, maka laporan ini hanya menyajikan beberapa point penting sesuai isu-isu yang terkait PEL dan faktor pengungkit PEL yang dihasilkan RALIED. Beberapa usulan rencana aksi yang dapat diambil oleh Pemkot Surakarta antara lain:

VII.1.1. INVESTASI DAN DIMENSI KELOMPOK SASARAN

Meskipun Kinerja investasi Surakarta mengalami pertumbuhan tetapi lebih banyak ditopang beberapa proyek pemerintah, tetapi kenaikan investasi konstruksi ini tidak diimbangi oleh kenaikan belanja modal (pembelian mesin / peralatan produksi) dan konsumsi bahan baku industri. Hal ini dapat dilihat dari menurun karena nilai investasi dalam bentuk inventori yang terus mengalami penurunan signifikan. Beberapa usulan program kegiatan rencana aksi untuk meningkatkan investasi dan peranan dimensi kelompok sasaran pada PEL antara lain: Integrasi fungsi pusat layanan investasi sebagai pusat layanan investasi yang disertai layanan konsultasi investasi (mengintegrasikan peranan PLUT/ konsultan IKM dan UKM). Usulan lain adalah mendorong promosi Kampung Wisata Batik Kauman dan Laweyan menjadi pusat tujuan wisata dan sebagai ruang ekonomi kreatif. Disamping itu Pemkot didorong untuk menciptakan sentra industri wisata baru seperti kampung industri Blangkon Serengan dan kampung industri permata Jayengan.

Kegiatan lain yang perlu ditindak lanjuti adalah menumbuhkembangkan pemuda Kota Surakarta untuk menjadi wirausaha baru. Program ini diperbaiki dengan mendatangkan beberapa praktisi langsung dari pengusaha sukses di Solo Raya sebagai mentor utama bagi calon-calon pengusaha muda.

VII.1.2. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran adalah isu yang ada di Dimensi kesinergian dan fokus kebijakan. Dari hasil analisis beberapa kota di Jawa Tengah, terlihat Kota Surakarta merupakan kota dengan proporsi penduduk miskin terbanyak. Ini menandakan bahwa program perbaikan ekonomi penduduk miskin harus menjadi hal yang serius untuk diperbaiki. Jebakan ketidakmampuan penduduk miskin untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan sebagai akar segala ketakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia dan isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals atau MDGs. Dari hasil diskusi FGD *stakeholder* ada beberapa akar masalah utama yaitu:

1. Kualitas sumberdaya manusia (tingkat pendidikan) yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.
2. Rendahnya akses dalam mendapatkan modal kerja (IKM)
3. Derasnya penduduk urban (luar kota Surakarta) dalam kehidupan ekonomi kota yang mampu menyaingi (menyingkirkan) tenaga kerja asli penduduk kota.

Langkah –langkah pengurangan kemiskinan penduduk Kota Surakarta Karena itu beberapa *stakeholder* dalam FGD tersebut memberikan beberapa usulan program antara lain:

- Pemberian bantuan sosial dan peningkatan pelayanan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan dasar.
- Penentuan kantong kemiskinan berbasis RW (penduduk paling miskin). Selanjutnya kantong kemiskinan ini diangkat ekonominya dengan melihat potensi usaha sejenis (atau semacam sentra industri atau sentra usaha lainnya). Selanjutnya melalui kesamaan aktivitas ekonomi dibentuk paguyuban sentra dan koperasi sentra. Dan Pemkot Surakarta dapat memberikan bantuan peralatan dan pemasaran untuk meningkatkan produktivitas produksi dan kualitas produk yang dihasilkan
- Penguatan paguyuban usaha sejenis melalui pendampingan yang intensif dan monitoring yang terus menerus dengan melibatkan tim penanggulangan kemiskinan kelurahan (TPKK) atau perangkat kelurahan seperti ketua RW dan karang taruna.
- Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin. Pelatihan bagi para pemuda di daerah kawasan miskin melalui pemanfaatan Dua pusat pelatihan tenaga kerja yang profesional yang (AK Tekstil Surakarta dan *Solo Techno park*

VII.1.3 Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata

Kinerja pariwisata Kota Surakarta masih jauh tertinggal dari kota wisata lain di Indoensia. Meskipun Kota Surakarta memiliki akar wisata Jawa yang kuat tetapi peranan ekonomi kreatif

untuk meningkatkan daya tarik wisata budaya masih dirasakan kurang. Hal ini terbukti dari 37 responden (sebagian besar adalah pemilik usaha) yang dikumpulkan indikator dimensi ekonomi kreatif dan smart economy masih berkisar nilai 57,8 (cukup baik). Dari hitungan menggunakan RALED diperoleh tiga faktor penguat yang bisa menjadi penguat untuk meningkatkan kinerja ekonomi kreatif dan smart economy, antar lain=

Faktor pendorong ekonomi kreatif dan smart economy di Kota Surakarta antara lain:

- Penguatan organisasi ekonomi kreatif dengan mendorong paguyuban mendirikan koperasi IKM sentra (yang sudah berbadan hukum/legalitas) dan dikelola oleh tenaga profesional untuk membantu meningkatkan penjualan para anggotanya.
- Pemkot Surakarta mulai melibatkan lebih banyak lagi stasiun TV lokal maupun nasional untuk menyebarkan aktivitas budaya dan memamerkan hasil karya industri kreatif di Kota Surakarta.
- Dukungan pemerintah untuk mengangkat beberapa UKM/IKM yang terpilih yang memiliki potensial untuk dikembangkan dan memiliki visi untuk maju.
- Pengoptimalan peranan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Kreatif di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwo, sebagai pusat pengembangan industri kreatif. Dimana fungsi tujuan sentra ini antara lain= tempat produksi (kain batik cap), menjadi pusat pembelajaran bagi pengunjung yang datang dan tempat penjualan produk – produk IKM industri kreatif.
- Pemerintah mengajak bersama asosiasi wisata (ASITA, PHRI, dan paguyuban sentra IKM) untuk mengembangkan paket wisata dengan konsep one day tour atau tur satu hari atau dua hari (Sabtu dan Minggu) dengan menyiapkan beberapa rute wisata yang menarik untuk turis lokal maupun asing.
- Pemkot Surakarta juga perlu melakukan kajian ilmiah Pengembangan jalan yang dapat dinikmati turis (hiburan dan makanan) di sore dan malam hari antara Kraton Kasunanan hingga Keraton Mangkunegara. Sehingga dapat menyamai keramaian Jalan Malioboro Yogya atau Kuta di Bali.
- Revitalisasi beberapa pusat budaya Keraton Mangkunegara sebagai pusat budaya Jawa dengan mementaskan seni dan budaya seperti drama, tari-tarian, fashion-show, pameran lukisan maupun seni kontemporer lainnya.
- Mengusulkan rute bus Damri yang melewati beberapa objek wisata (sentra IKM), keraton museum untuk meningkatkan minat wisatawan mengunjungi objek wisata budaya.
- Revitalisasi fungsi dan peran ruang kreatif, seperti Solo techno-park, AKA Tekstil, GWO Sriwedari, sebagai ruang ekonomi kreatif yang dapat memaksimalkan kegiatan komunitas ekonomi kreatif.

VII.1. 4. DIMENSI LOKASI PELAKU USAHA (UKM/IKM)

Kenaikan nilai upah yang tinggi di Kota Surakarta belum diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan sikap mental profesional, dan infrastruktur energi listrik yang sering mengalami gangguan operasi, adalah dua hal yang perlu dibenahi. Karena itu pemkot Surakarta perlu melakukan kajian komprehensif terkait para pekerja seperti kajian subsidi transportasi bagi pekerja, rumah susun bagi pekerja, kartu sembako murah bagi pekerja, dan kartu pendidikan bagi buruh / pekerja

Untuk memecahkan masalah kualitas infrastruktur energi listrik yang rencah, Pemkot Surakarta dapat mendorong, mensosialisasikan dan memberi contoh penggunaan energi alternatif seperti energi matahari, penggunaan energi surya di kantor-kantor pemda

VII.1. 5 DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Hasil kajian dan FGD menyimpulkan bahwa perlu peranan masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan seperti mengaktifkan kembali beberapa kelompok lingkungan hidup telah didirikan di masyarakat. Aktivitas ini melalui pemberdayaan bisnis ekonomi lokal seperti pemeliharaan ikan (lele dan mujair), sayur mayur dan pengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos. Pemkot juga perlu mendorong dan meningkatkan peranan perusahaan yang melakukan inovasi pengembangan produk ramah lingkungan (menggunakan bahan baku dan proses produksi ramah lingkungan) dan menciptakan pasar yang peduli produk ramah lingkungan. Pemkot juga terus menerus mendorong dibangun beberapa sentra pengolahan limbah komunal di sentra industri dan daerah padat penduduk dan penggunaan infrastruktur ramah lingkungan untuk menopang infrastruktur listrik yang masih kurang maksimal.

VII.1.6 STATUS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA SURAKARTA

Hasil perhitungan menggunakan RALEL selanjutnya dibuatkan gambar diagram layang-layang, dapat disimpulkan bahwa ketujuh dimensi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan ekonomi kreatif di Kota Surakarta berada pada kondisi cukup baik, dimana terdapat semua dimensi lainnya memiliki nilai antara 50 hingga 80.

Dimensi yang perlu juga mendapat perhatian untuk segera diperbaiki adalah Dimensi faktor lokasi dimana faktor ini mengalami penurunan signifikan dari 86,32 point menjadi 72,39 poin. Berdasarkan hasil RALEL dikemukakan ada beberapa faktor penggerak yang perlu menjadi fokus atau prioritas pertama adalah menyelesaikan masalah upah tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar. Berdasarkan hasil FGD dengan beberapa pengusaha dan OPD yang terkait, disebutkan bahwa penduduk Kota Surakarta sebenarnya banyak yang

belum mempunyai pekerjaan atau bekerja hanya paruh waktu. Sementara itu banyak pelaku bisnis lebih memilih tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Surakarta dengan alasan upah lebih mudah dan etos kerja lebih tinggi. Kenaikan nilai upah yang tinggi di Kota Surakarta belum diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan sikap mental profesional dari para pemuda / penduduk kota Surakarta.

VII.2. SARAN UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini, banyak indikator PEL, ekonomi kreatif dan smart economy belum memuaskan banyak pihak karena keterbatasan waktu dan jumlah peserta yang terlibat dalam penyusunan indikatornya. Ke depan model yang ada di laporan ini dapat diperbaiki dengan fokus pada perbaikan indikator ekonomi kreatif dan smart economy.

Dalam pengumpulan data ke depan diharapkan Pihak BAPPPEDA dapat melibatkan perangkat kuesioner berbasis android sehingga data yang dikumpulkan jauh lebih banyak dan langsung pada pelaku usaha ketika melakukan pengisian aplikasi perizinan, melakukan pameran dan berbagai kegiatan yang melibatkan dunia usaha dalam kegiatan di Pemkot.